

**ANALISIS PELAKSANAAN *SHARIAH GOVERNANCE* DALAM PERMASALAHAN
PRINCIPAL-AGENT PEMBIAYAAN *MUDHĀRABAH* PADA
BANK SULSELBAR SYARIAH MAKASSAR**



Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih
Gelar Sarjana Akuntansi pada Jurusan Akuntansi
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
UIN Alauddin Makassar

Oleh :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

AL UMMUL NASTAINUL

10800113073

ALAUDDIN
M A K A S S A R

JURUSAN AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

2017

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Al Ummul Nastainul
NIM : 10800113073
Tempat/Tanggal Lahir : Bima, 3 Juni 1995
Jurusan : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Alamat : Jl. Manuruki II Lr. 7A Asrama Lembayung
E-mail : alummulnastainul.asta@gmail.com
HP : +6285-333-630-032
Judul : “Analisis Pelaksanaan *Shariah Governance* dalam Permasalahan *Principal-Agent* Pembiayaan *Mudhārabah* pada Bank Sulselbar Syariah Makassar”

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat atau tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, November 2017
Penyusun,

Al Ummul Nastainul
NIM: 10800113073



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Kampus I : Jl. Slt. Alauddin No. 63 Makassar Tlp. (0411) 864928 Fax 864923
Kampus II : Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36 SamataSungguminasa - GowaTlp. 841879 Fax 8221400

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berjudul “ Analisis Pelaksanaan *Shariah Governance* dalam Permasalahan *Principal-Agent* Pembiayaan *Mudhārabah* pada Bank Sulselbar Syariah” yang disusun oleh Al Ummul Nastainul, NIM : 10800113073, Mahasiswa Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada tanggal 29 November 2017, bertepatan dengan 10 Rabi’ul-Awwal 1439 H, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Akuntansi.

Makassar, 29 November 2017
10 Rabi’ul-Awwal 1439 H

DEWAN PENGUJI

Ketua : Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag.
Sekretaris : Dr. H. Abd. Wahab, SE., M.Si.
Penguji I : Jamaluddin M., S.E., M.Si.
Penguji II : Saiful, SE., M.S.A., Ak.
Pembimbing I : Prof. Dr. H. Muslimin Kara, M.Ag.
Pembimbing II : Sumarlin, S.E., M.Ak.

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Diketahui Oleh:
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam,
UIN Alauddin Makassar

Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag
NIP. 19580221 198703 1 002

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji dan syukur bagi Allah SWT, penguasa alam semesta dan raja manusia atas segala rahmat, taufiq dan hidayah-Nya. Tidak lupa kita panjatkan salawat dan salam kepada Nabi Besar Muhammad bin Abdullah SAW sebagai pembawa risalah kebenaran dari Allah SWT, yang menuntun umat manusia menuju jalan kebahagiaan hidup baik didunia dan akhirat. Dengan segala kekuasaan dan kasih sayang-Nya telah memberikan kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul **“Analisis Pelaksanaan *Shariah Governance* dalam Permasalahan *Principal-Agent* Pembiayaan *Mudhārabah* pada Bank Sulselbar Syariah”**. Tugas Akhir ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa proses penyusunan tugas akhir ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini penyusun mengucapkan rasa terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Musafir Pababbari, M.Si, selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
2. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
3. Teristimewa buat kedua orangtua tercinta Ayahanda Maryono dan Ibu Hajnah yang telah berkorban demi pendidikan yang penulis jalani.
4. Bapak Jamaluddin Majid, SE., M.Si dan Memen Suwandi, SE., M.Si, selaku Ketua dan Sekertaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.

5. Bapak Prof. Dr. H. Muslimin Kara, M. Ag. dan Sumarlin, SE., M. Ak., selaku dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam menyusun tugas akhir ini.
6. Bapak dan Ibu dosen Jurusan Akuntansi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar yang telah mengajar dan mendidik mulai dari semester awal hingga penulis menyelesaikan studinya diperguruan tinggi ini.
7. Ibu Fitrah beserta keluarga yang telah memberikan *support* yang besar kepada penulis.
8. Bapak Ahmadin dan Ibu Nurjannah yang telah berkorban untuk kesuksesan pendidikan penulis.
9. Kepada Abang Khaerunnas dan Kakak Ningsih yang telah memberikan semangat dan arahan bagi penulis.
10. Teman-teman mahasiswa Akuntansi B Angkatan 2013 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam terutama Nurfajriani, Riza dan Fita yang telah menyediakan waktu dan tenaga dalam memberikan masukan serta menjadi penyemangat, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Rekan-rekan seperjuangan di lokasi KKN yang selalu dirindukan Sahrul, Araaf, Sulhan, Mail, Andi, Miming, Ulfa, Titi, Nini, atas segala bantuannya dan kebersamaannya selama ini.
12. Rania dan Nur abiyustiran selaku saudara perampuan yang selalu setia dan senantiasa menemani, menasehati, mendorong dan mendoakan penulis.
13. Rahma, Yati, Novi, Aniatun dan saudari-saudari yang belum sempat penulis sebutkan di pondok lembayung yang telah menjadi sahabat dan keluarga terbaik dengan berbagai suka dan duka.

Akhirnya, sebagai penutup penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan, “Manusia merupakan kejadian sempurna, tetapi kebanyakan dari mereka tidak luput dari kesalahan, oleh karena itu penulis selalu

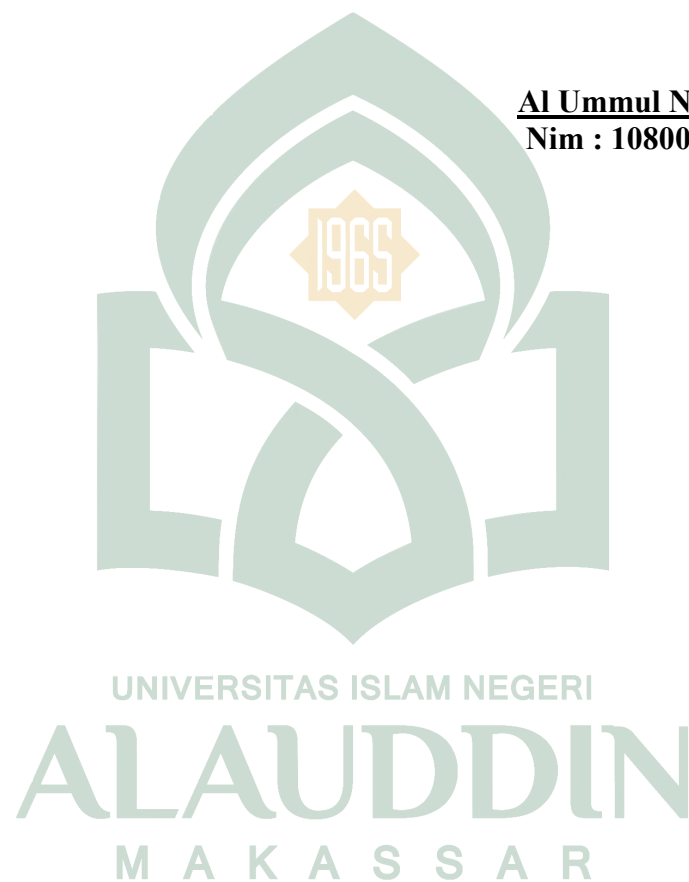
mengharapkan kritik dan saran demi pengembangan wawasan penulis kedepannya.
Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat ridha-Nya kepada kita semua, Amin Yaa
Rabbal ‘Alamin.

Wasalamu Alaikum Wr. Wb

Makassar, November 2017

Penulis

Al Ummul Nastainul
Nim : 10800113073



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR TABEL	ix
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1-10
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Penelitian Terdahulu.....	8
E. Manfaat Penelitian.....	9
BAB II PEMBAHASAN.....	11-35
A. Teoretis Kepatuhan.....	11
B. <i>Agency Theory</i>	13
C. Hubungan Keagenan dalam Perpektif Islam	15
D. <i>Shariah Governance</i>	18
E. Konsep dan Nilai Dasar dalam Akad <i>Mudhārabah</i>	29
F. <i>Agency Problem</i> pada Kontrak Pembiayaan <i>Mudhārabah</i> Bank Syariah.....	32
G. Rerangka Pikir.....	35
BAB III METODE PENELITIAN.....	36-41
A. Jenis dan Lokasi Penelitian.....	36
B. Pendekatan Penelitian.....	36
C. Jenis dan Sumber Data.....	37
D. Objek Penelitian.....	37
E. Metode Pengumpulan Data.....	38
F. Instrumen Penelitian	39
G. Teknik Analisis Data	39
H. Penyajian Keabsahaan Data.....	40

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42-82
A. Gambaran Umum Perusahaan	42
1. Sejarah Singkat PT Bank Sulselbar Syariah	42
2. Visi Dan Misi Bank Sulselbar Syariah	47
3. Struktur Organisasi PT Bank Sulselbar Syariah	50
B. Pembahasan Data Hasil Penelitian	57
1. Prosedur Penyaluran Dana Pembiayaan <i>Mudhārabah</i> pada Bank Sulselbar Syariah	57
2. <i>Shariah Governance</i> Ditinjau dari Nilai Shiddiq, Amanah, Tabligh, Mas’uliyah dan Keadilan pada Pembiayaan <i>Mudhārabah</i> Bank Sulselbar Syariah	62
3. Tinjauan <i>Shariah Governance</i> dalam Permasalahan <i>Principal-Agent</i> Pembiayaan <i>Mudhārabah</i> Bank Sulselbar Syariah	76
4. Upaya Bank Sulselbar Syariah dalam Mengatasi Permasalahan <i>Principal-Agent</i> Pembiayaan <i>Mudhārabah</i> Bank Sulselbar Syariah Makassar	79
BAB V PENUTUP	83
A. Kesimpulan	83
B. Saran	83
DAFTAR PUSTAKA	84-90
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1: Rerangka Pikir.....	35
Gambar 2: Teknik Analisis Data.....	40



DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Komposisi Pembiayaan <i>Mudhārabah</i> Bank Sulselbar Syariah	2
Tabel 2 : Penelitian Terdahulu	8



ABSTRAK

Nama : Al Ummul Nastainul

NIM : 10800113073

Jurusan : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Judul : “Analisis Pelaksanaan *Shariah Governance* dalam Permasalahan *Principal-Agent* Pembiayaan *Mudhārabah* Bank Sulselbar Syariah”

Pelaksanaan akad pembiayaan *mudhārabah* seringkali di dasari pada *agency theory*. *Agency theory* yang melekat pada bisnis perbankan syariah dikhawatirkan dapat menggugurkan nilai-nilai syariah yang menjadi dasar bisnis yang dijalankan. Situasi seperti ini menjadikan bank syariah selalu mengutamakan hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai yang seharusnya dipraktikkan dalam bisnis Islam. Tujuan pelaksanaan pembiayaan *mudhārabah* sendiri pada dasarnya untuk menumbuhkan masyarakat yang selalu mengutamakan kejujuran (*Shiddiq*), amanah (kepercayaan), saling terbuka (*Tabligh/transparansi*), bertanggungjawab (akuntabilitas) dan yang paling penting adanya keadilan dalam berbisnis. Tetapi dalam kondisi sekarang hal-hal tersebut bertolak belakang, karena bisnis yang selalu mengutamakan *profit oriented*. Akibat adanya konsep amanah yang sampai hari ini masih dibangun dalam bingkai *Agency theory*, untuk itu penelitian kali ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan konsep *shariah governance* yang dijalankan perbankan syariah dalam *agency theory* yang melekat pada pembiayaan *mudhārabah*.

Penelitian kualitatif ini dilakukan pada Bank Sulselbar Syariah dengan menggunakan pendekatan kritis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep *shariah governance* yang diterapkan dalam bingkai *agency theory* pada pembiayaan *mudhārabah* Bank Sulselbar Syariah sebagian besar masih mendasarkan pengelolaan akad *mudhārabah* pada sikap egois dan materialistik sehingga pelaksanaan nilai-nilai syariah dalam konsep *shariah governance* belum menjadi bagian integral dari Bank Sulselbar Syariah. Konsep syariah yang dibangun masih belum mampu menetralkan *agency problems* yang muncul sehingga dalam menanganinya Bank Sulselbar Syariah cenderung menciptakan nilai rasionalisme yang mementingkan konsep laba di atas tujuan yang paling utama yaitu menciptakan kemaslahatan yang terbentuk dari rasa ketakwaan kepada Allah SWT.

Kata Kunci : Implementasi *Shariah Governance*, *Agency Problems*, Pembiayaan *Mudhārabah*

ABSTRACT

Name : Al Ummul Nastainul

NIM : 10800113073

Majors` : Accounting

Faculty : Islamic Economics and Business

Title : *"Implementation Of Shariah Governance In The Problems Of The Principal-Agent Of The Mudhārabah Financing At Islamic Bank Sulselbar Makassar"*

The implementation of *mudhārabah* financing contracts is often based on *agency theory*. *Agency theory* which is attached to the business of sharia banking is feared to abort the sharia values that are the basis of the business being run. Such situations make Islamic banks always put things that are against the values that should be practiced in Islamic business. The purpose of *mudhārabah* self- financing is basically to cultivate a society that always prioritizes honesty (Siddiq), trust, openness (Tabligh / transparency), responsibility (accountability) and, most importantly, justice in business. But in the present conditions these things are the opposite, because business is always prioritized *profit oriented*. Due to the existence of the concept of trust that to this day is still built in the frame of *Agency theory*, for the purpose of this study aims to find out the implementation of the concept of *shariah governance* that runs sharia banking in *agency theory* inherent in financing *mudhārabah*.

This qualitative research was conducted at Bank Sulselbar Syariah by using a critical approach. The results showed that the concept of *shariah governance* applied in the frame of *agency theory* on the financing of *mudhārabah* Bank Sulselbar Syariah largely still base the management of *mudhārabah* contract on the attitude of selfish and materialistic so that the implementation of sharia values in the concept of *shariah governance* has not become an integral part of the Bank Sulselbar Syariah. The concept of sharia is still not able to neutralize *agency problems* that arise so that in handling it Bank Sulselbar Syariah tends to create the value of rationalism that emphasizes the concept of profit above the most important goal is to create the benefit that is formed from the sense of piety to Allah SWT.

Keywords: Implementation of *Shariah Governance*, *Agency Problems*, *Mudhārabah Financing*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Banyak negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Inggris dan negara-negara berkembang seperti Malaysia dan Indonesia serta organisasi internasional seperti *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) telah memberikan pedoman dan peraturan untuk praktik terbaik tata kelola perusahaan. Begitu pula dengan industri keuangan Islam dalam perkembangannya pun perlu adanya inovasi baru dalam rangka memperbaiki sistem tata kelola perusahaan agar lebih kompetitif dibandingkan dengan sistem konvensional yang sudah ada (Al Mansour, 2015). Sistem tata kelola yang baik tentunya akan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap manajemen dan operasional lembaga perbankan syariah (Rama dan Novela, 2015). *Corporate governance* pada konvensional dan syariah memiliki banyak perbedaan sudut pandang. Hal yang paling pokok adalah peletakan ideologi tauhid dalam akuntansi syariah dengan ideologi rasionalisme dalam akuntansi konvensional sehingga tujuan dari usaha dalam perspektif konvensional pada umumnya adalah maksimalisasi laba sementara perspektif syariah bertujuan pada kesejahteraan umat ('Aabid dan Suprayogi, 2016).

Seiring dengan perkembangannya sebagai lembaga intermediasi yaitu penghubung antara pemilik dana dengan pihak yang membutuhkan dana, sehingga bank syariah selalu dihadapkan pada berbagai risiko yang cukup tinggi. Salah satu risiko yang dihadapi perbankan syariah yaitu terkait dengan penerapan sistem bagi hasil dalam praktik pembiayaan *mudhārabah*, dimana karakteristik akad ini pihak bank menyediakan 100% kebutuhan modal usaha sedangkan pihak pengusaha menyediakan jasa pengelola usaha. Sebagai *shahibul al-mal*, bank tidak diperbolehkan turut campur

dalam kegiatan sehari-hari pihak pengelola usaha (Hadi, 2011). Hal ini menimbulkan hubungan keagenan antara bank dengan nasabah. Dalam ruang lingkup perusahaan, masalah *agency* biasa terjadi antara hubungan pemilik perusahaan (*principal*) dengan manajemen (*agent*) sementara pada pembiayaan *mudhārabah* masalah *agency* terjadi dalam hubungan *shahibul maal* (*principal*) dan *mudharib* (*agent*). Masalah keagenan ini timbul karena adanya asimetri informasi antara agen dan prinsipal. Adanya ketidakseimbangan informasi (*asymmetric information*) sehingga ada salah satu pihak yang memiliki keuntungan informasi lebih banyak dari pihak lain (Ardiansyah, 2014). Dengan kondisi tersebut mengakibatkan *agent* dapat bertindak tidak jujur (dusta) dengan menggunakan sisi subyektifitasnya untuk mendapatkan keuntungan yang sifatnya pribadi (egois). Hal ini disebabkan akibat nasabah tidak ingin membagi keuntungan dengan bank. Sikap ini timbul karena manusia memiliki sifat egois yang dapat berakibat pada kerugian bukan hanya pada sisi nasabah tetapi juga pihak bank (Putriandini dan Irianto, 2012).

Adanya risiko yang tinggi terkait ketidakjujuran nasabah sehingga menjadikan komposisi penyaluran dana kepada masyarakat yang lebih banyak dalam bentuk perdagangan (*murabahah*). Hal inipun terjadi pada Bank Sulselbar Syariah seperti yang ditunjukkan pada Tabel berikut :

Tabel 1
Komposisi Penyaluran Dana Pembiayaan *Mudhārabah*

Penyaluran Dana	2016	2015
	(Dalam jutaan rupiah)	(Dalam jutaan rupiah)
Murabahah	424.247	460.467
Mudhārabah	84.926	82.736

Sumber : Laporan Keuangan Publikasi Unit Usaha Syariah PT Bank Sulselbar.

Berdasarkan tabel di atas, membuktikan komposisi dengan sistem bagi hasil kurang berjalan maksimal. Masalah keagenan yang terjadi dalam pembiayaan *mudhārabah* pada bank syariah menimbulkan risiko penyimpangan yang sangat besar, ini disebabkan karena perbankan syariah belum siap untuk menyalurkan dananya dengan sistem bagi hasil serta kurangnya SDM yang menguasai hukum syariah. Ardiansyah (2014) mengungkapkan bahwa *agency problems* pada produk-produk perbankan syariah sangat penting dibahas mengingat masih minimnya skema pembiayaan *mudhārabah* yang seharusnya produk unggulan perbankan syariah dan pembeda dari perbankan konvensional. Kenyataan ini menunjukkan bahwa praktik perbankan syariah masih tidak bisa terlepas dari pola pikir konvensional yang didasari teori keagenan. Dalam paradigma konvensional, kontrak *mudhārabah* termasuk dalam hubungan *agency* atau *agency relationship* (Maharani, 2008). Salah satu karakteristik *agency theory* adalah sikap untuk memanfaatkan peluang dengan mengejar keuntungan sebebaskan-bebasnya (*unconstrained opportunism*). Melalui transformasi nilai-nilai syariah pada tata kelola organisasi Islam (*shariah Governance*) seharusnya dapat mendekonstruksi *agency theory* menjadi lebih humanis, bukan ikut terlarut dalam nilai egoistik dan kapitalistik. Untuk itu jika penerapan prinsip bagi hasil kurang diterapkan pada perbankan syariah maka ironi dimana nilai-nilai syariah seperti keadilan (*justice*), persamaan (*equality*), kebenaran (*truth*), kepercayaan (*trust*), kebaikan (*kindness*), kejujuran (*honesty*) dan pertanggungjawaban (*responsibility*) kurang maksimal dijalankan pada praktik perbankan syariah (Waluyo, 2015).

Hasil penelitian Putriandini dan Irianto (2012) menemukan bahwa dalam proses pengendalian yang dilakukan perbankan syariah dalam meminimalisir risiko yang terdapat pada sistem bagi hasil ditemukan beberapa nilai-nilai konvensional seperti adanya ketidakpercayaan (Su'udzon), kewaspadaan dan ketidakjujuran nasabah. Hal ini

terjadi akibat dari keinginan bank dan nasabah dalam mencapai keuntungan maksimal yang bersumber dari manusia yang memiliki sifat egois yang memupuk keuntungan pribadi. Konflik kepentingan yang mewarnai praktik pembiayaan *mudhārabah* pada bank syariah selalu menjadi perhatian, hal ini terjadi karena perbankan syariah sendiri selalu dihadapkan pada dua sisi yaitu, tuntutan adanya kepatuhan syariah pada setiap kegiatan operasionalnya, sementara disisi lain *agency theory* justru bersumber dari produk yang mereka jalankan. Hal inilah yang menjadi kekhawatiran banyak pihak, ketika *agency theory* telah menjadi bagian dalam produk perbankan syariah, maka secara tidak langsung moralitas yang terbentuk bukan lagi berdasarkan pada sifat *feminism* yang dibingkai dalam keimanan kepada Allah SWT tetapi telah dirasionalkan yang menjadikan manusia memiliki sifat materialistik dan saling mengeksploitatif. Kondisi tersebut dapat memicu adanya risiko reputasi tersendiri yang dikawatirkan akan menimbulkan persepsi dikalangan masyarakat bahwa bisnis perbankan syariah merupakan pergantian nama saja sedangkan *minsed* pelakunya tetap konvensional (Ascarya dan Yumanita, 2005).

Pelaksanaan sistem bagi hasil yang cenderung menurun menunjukkan bank syariah masih belum mampu menempatkan diri pada posisi yang siap melakukan *sharing risk* dengan nasabahnya. Dominasi pembiayaan skema non bagi hasil menunjukkan bahwa bank syariah masih pada posisi yang hanya siap melakukan *transfer risk* kepihak nasabahnya (Waluyo, 2015). Hal ini perlu menjadi perhatian utama praktisi perbankan syariah terutama DPS yang berperan sebagai auditor internal yang menjaga kepatuhan syariah pada aktivitas perbankan. Jika transaksi yang dilakukan perbankan syariah tidak lagi membangun keseimbangan baik risiko dan keuntungan seperti istilah yang kita kenal yaitu “*al-kharaju bidh dharmani*” dan “*al-ghunmu bil gurma*” yang mana Islam melarang setiap jenis transaksi yang didalamnya

tidak terjadi keseimbangan antara risiko dan keuntungan (Wahyudi, 2013 dalam Mulawarman dan Yasid, 2016). Dengan kata lain, Islam melarang setiap jenis transaksi yang menghasilkan keuntungan tanpa adanya kesediaan menanggung risiko. Konsep tata kelola syariah (*shariah governance*) yang diterapkan perbankan syariah seharusnya dapat menstimulasi lahirnya nilai-nilai konvensional yang terwujud dalam kontrak *mudhārabah*. Tapi faktanya, pelaksanaan nilai-nilai syariah dalam akad *mudhārabah* perbankan syariah cenderung memudar. Hal ini disebabkan karena nilai kepatuhan seperti kejujuran, amanah, tabligh, mas'uliyah dan keadilan pada pembiayaan *mudhārabah* telah dibangun dalam bingkai *agency theory*. Anggraeni (2011), juga mengungkapkan bahwa masalah agensi dapat menggugurkan sifat amanah yang dimiliki seseorang. Ketika dilain pihak dalam hal ini *mudharib* tidak amanah, maka diharapkan sistem, prosedur serta penyelesaian masalah yang diambil perbankan syariah juga menjunjung tinggi nilai-nilai syariah. Tindakan inilah yang perlu ditingkatkan perbankan syariah untuk mencerminkan bisnis yang sesuai dengan konsep-konsep Islam. Perbankan syariah memerlukan suatu mekanisme yang dapat menilai kepatuhan bank syariah terhadap prinsip dan norma syariah melalui *shariah governance* sebagai bagian dari *corporate governance* (Saputro, 2010).

Agency theory yang melekat dalam pembiayaan *mudhārabah* bank syariah menjadi tantangan yang sangat besar. Tantangan tersebut lahir dari lingkup pengendalian bank syariah sendiri yaitu bagaimana seseorang atau organisasi merespon/mengendalikan dirinya dalam situasi atau kondisi apapun. Adanya *agency problems* pada pembiayaan *mudhārabah* memicu lahirnya pola pikir konvensional pada perbankan syariah. Hal inilah menjadi tanda tanya besar ketika status perbankan sebagai organisasi Islam yang menuntut adanya nilai-nilai kepatuhan sementara, dalam kondisi lain perbankan syariah dihadapkan pada situasi yang juga menuntut mereka untuk

berprilaku yang sama dengan perbankan konvensional. Kondisi inilah yang menjadikan bank syariah terlarut dalam masalah *agency*, sehingga nilai-nilai syariah yang dijunjung tinggi telah menjadi prioritas kedua dan konsep laba adalah yang paling utama. Dari fenomena yang disebutkan di atas, penelitian kali ini mencoba menelaah kondisi pelaksanaan *shariah governance* yang diwakili oleh konsep kejujuran, amanah, tabligh (transparansi), mas'uliyah (akuntabilitas), dan keadilan yang dijalankan dalam bingkai *agency theory* yang terjadi pada pembiayaan *mudhārabah*. Sebab tujuan dari pelaksanaan pembiayaan *mudhārabah* adalah untuk menumbuhkan nilai-nilai kepatuhan bukan hanya pada sisi *shahibul maal* tetapi juga *mudharib*. Sementara tujuan pelaksanaan *shariah governance* sendiri sebagai suatu sistem, peraturan dan proses yang digunakan untuk mewujudkan budaya kepatuhan dalam mengelola risiko perbankan Islam serta memonitoring, mengatur dan mendorong kinerjanya secara efektif agar menghasilkan nilai tambah bagi *stakeholders* sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Purnamasari dan Darma, 2015). Kedua hal di atas secara keseluruhan diterapkan demi terwujudnya nilai-nilai syariah.

Untuk itu, peneliti melihat dua kondisi yang menarik dijalankan perbankan syariah dan menjadi perhatian peneliti yaitu kondisi pertama, adanya konsep tata kelola syariah yang dibangun atas dasar nilai-nilai syariah sehingga menjadikan bank syariah perlu menjalankan semua aktivitasnya berdasarkan konsep syariah salah satunya pada pelaksanaan akad *mudhārabah* sementara kondisi kedua, lahirnya *agency theory* (teori yang melahirkan sifat manusia untuk senantiasa bersifat oportunis yang diwarnai konflik kepentingan) yang justru melekat pada produk pembiayaan *mudhārabah* sendiri. Kondisi inilah yang perlu ditelaah lebih lanjut mengenai pelaksanaan praktik syariah yang seharusnya terwujud dalam pembiayaan *mudhārabah* yaitu pelaksanaan nilai kejujuran, amanah, transparansi (tabligh), akuntabilitas (mas'uliyah) dan keadilan.

B. Rumusan Masalah

Masalah agensi pada produk *mudhārabah* merupakan masalah yang relevan dimana potensi adanya asimetri informasi pada produk tersebut dapat menyebabkan ada salah satu pihak yang dirugikan terkait relevansi informasi yang diberikan pihak *mudharib* pada *shahibul al-mal* (Bank syariah). Dari hubungan tersebut dapat memicu pihak-pihak yang terlibat dalam mitra tersebut bertindak selayaknya perbankan konvensional. *Theory agency* memang sangat intens dengan konsep konvensional yang berlandaskan sistem kapitalisme. Tingginya risiko yang dialami perbankan, sehingga hal inipun memicu pihak-pihak perbankan syariah masih mempertahankan sifat, perilaku serta nilai-nilai konvensional yang muncul dalam mengelola risiko penyaluran dana pembiayaan *mudhārabah*. Adanya sifat manusia yang selalu mementingkan kepentingan pribadi (*egois*), materialistik (keinginan memupuk laba yang maksimal) sehingga hal tersebut perlu menjadi perhatian serius ketika situasi tersebut telah menjadi bagian dalam pelaksanaan produk yang dijalankan dengan nilai-nilai syariah. Hal inilah yang menjadi dilema besar bank syariah dalam menjalankan pembiayaan dengan sistem bagi hasil. Dilema tersebut lahir dari konsep syariah yang harus dijalankan serta adanya *agency theory* yang penanganannya juga dituntut untuk selalu menghadirkan konsep syariah, bukan sebaliknya perbankan syariah justru ikut terlarut dalam nilai-nilai yang terwujud akibat hubungan kontraktual yang terjadi dalam pembiayaan *mudhārabah*. Berdasarkan masalah di atas, maka peneliti ingin mengemukakan beberapa pokok permasalahan antara lain:

1. Bagaimana implementasi *shariah governance* ditinjau dari pemenuhan nilai *shiddiq* (Kejujuran), *amanah* (kepercayaan), *tabligh* (Transparansi), *mas'uliyah* (Akuntabilitas) dan keadilan pada pembiayaan *mudhārabah* Bank Sulselbar syariah?

2. Bagaimana upaya yang dijalankan Bank Sulselbar syariah dalam mengatasi masalah *principal-agent* pada pembiayaan *mudhārabah*?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian berdasarkan perumusan masalah di atas yaitu :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan *shariah governance* ditinjau dari pelaksanaan nilai *shiddiq* (Kejujuran), *amanah* (kepercayaan), *tabligh* (Transparansi), *mas'uliyah* (Akuntabilitas) dan keadilan pada pembiayaan *mudhārabah* Bank Sulselbar Syariah.
2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Bank Sulselbar syariah dalam mengatasi masalah *principal-agent* pada pembiayaan *mudhārabah*.

D. Penelitian Terdahulu

Tabel 2
Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
Rama dan Novela (2015)	<i>Shariah Governance</i> dan Kualitas Tata Kelola Perbankan Syariah	Penelitian ini menemukan bahwa praktik <i>shariah governance</i> berpengaruh signifikan terhadap kualitas tata kelola perusahaan bank syariah. Implikasi penelitian ini adalah dorongan bank syariah untuk meningkatkan kualitas <i>shariah governance</i> demi meningkatkan kinerja tata kelola dan kepercayaan publik terhadapnya.
Ardiansyah (2014)	Bayang-Bayang Teori Keagenan pada Produk Pembiayaan Perbankan Syariah	Penelitian mencoba mengeksplorasi kurangnya musyarakah dan <i>mudhārabah</i> yang timbul akibat agensi teori. Solusi yang ditawarkan yaitu prosedur yang ketat dan kriteria yang lebih tinggi untuk pembiayaan <i>mudharabah</i> agar mencapai tingkat optimal. Kedua mengoptimalkan sistem bagi hasil dengan seleksi dan mengetahui karakter nasabah

Purnamasari dan Darma (2015),	Pengaruh Implementasi Syariah Governance terhadap Loyalitas Nasabah	Hasil menunjukan bahwa keadilan dan kepatuhan syariah memiliki efek positif yang signifikan terhadap loyalitas pelanggan sedangkan akuntabilitas, transparansi, tanggungjawab, independensi tidak memiliki efek positif yang signifikan terhadap loyalitas pelanggan.
‘Aabid dan Suprayogi (2015),	Penerapan Tata Kelola Lembaga Keuangan Islam (Studi Kasus pada PT. BPRS Jabal Nur Surabaya)	Hasil menunjukan bahwa pengawasan kepatuhan syariah belum diungkapkan secara penuh (<i>Full disclosure</i>) kepada <i>stakeholders</i> sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi PT BPRS Jabal Nur, karena semua dokumen bersifat terkendala atau rahasia.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis : penelitian ini menggunakan teori kepatuhan sebagai landasan peran perbankan syariah dan posisi nasabah dalam berperilaku dan mengaplikasikan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan bisnisnya. Teori ini memberikan makna bahwa perbankan syariah sebagai lembaga yang mengaplikasikan prinsip-prinsip syariah, maka prioritas utamanya bukan pada pencapaian laba secara maksimal tetapi bisnis yang dibangun dengan bertujuan untuk pencapaian kemaslahatan bagi semua pihak didalamnya begitupun, bagi nasabah yang menggunakan jasa perbankan syariah untuk modal bisnisnya perlu menanamkan nilai-nilai syariah sebagai wujud tanggungjawabnya kepada Tuhannya serta sesama manusia lainnya.

2. Manfaat Praktis :

- a. Bagi perbankan syariah, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan evaluasi terkait tata kelola perbankan syariah yang perlu disesuaikan dengan filosofi dasar perbankan syariah.

- b. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan terkait peran dari otoritas perbankan dalam tata kelola perbankan syariah.
- c. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan acuan serta bahan referensi untuk penelitian sejenis dimasa akan datang.

3. Manfaat Regulasi : Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembentukan standar akuntansi syariah terkait tata kelola perusahaan syariah yang baik (*good shariah governance*) sebab regulasi sebelumnya yang dikeluarkan *International Financial Service Board* (IFSB) belum komprehensif masih mengacu pada prinsip-prinsip yang sama dengan *corporate governance* pada perbankan konvensional.

BAB II

TINJAUAN TEORETIS

A. Teoretis Kepatuhan

Kepatuhan berasal dari kata dasar patuh, yang berarti disiplin dan taat (Achmad, 2009). Kepatuhan berarti bersifat patuh, ketaatan, tunduk, patuh pada ajaran dan aturan. Teoretis *compliance* dikembangkan oleh Green dan Kreuters, 1991 (dalam Mahfudhoh dan Rohman, 2015) yang menurutnya kepatuhan adalah ketaatan melakukan sesuatu yang dianjurkan atau respon yang diberikan terhadap sesuatu diluar subjek. Sementara menurut Niven, 2002 (dalam Mahfudhoh dan Rohman, 2015) mengatakan kepatuhan sebagai sejauh mana perilaku seseorang sesuai dengan ketentuan. Dalam tata kelola perusahaan kepatuhan (*compliance*) adalah mengikuti suatu spesifikasi, standar, atau hukum yang telah diatur dengan jelas yang biasanya diterbitkan oleh lembaga atau organisasi yang berwenang dalam suatu bidang tertentu (Wikipedia, 2013). Kepatuhan juga disebutkan dalam firman Allah QS An-Nisa/ 4:59.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.

Jika dikaitkan dengan perbankan syariah yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah, maka perbankan syariah harus menjalankan operasinya sesuai dengan amanah yang terkandung dalam aturan-aturan/hukum secara adil dalam perbankan syariah. Selain itu, ayat di atas juga mengungkapkan bahwa setiap manusia perlu mentaati dan

mendasarkan dirinya pada Al-qur'an dan As-sunnah, salah satunya dalam bermuamalat. Terdapat sebuah nilai mendasar dalam ajaran Islam yang terkandung dalam Al-qur'an dan As-sunnah, yaitu nilai tauhid. Tauhid adalah inti ajaran Islam yang dibawakan oleh seluruh Nabi dan Rasul setiap zaman. Teoretis kepatuhan dalam perspektif Islam (syariah) mengindikasikan ketaatan kita pada nilai-nilai ajaran tauhid (Allah). Nilai tauhid merupakan nilai yang mendasari seluruh kepercayaan, pemikiran dan tindakan seseorang sesuai aturan-aturan syariah. Kepatuhan syariah dalam perbankan syariah bertujuan untuk menciptakan moralitas dan spiritual kolektif yang apabila dikaitkan dengan aktivitas bisnis, maka akan terwujud realitas bisnis Islam. Dalam kontrak *mudhārabah* kepatuhan disini bukan hanya terfokuskan pada perbankan syariah saja tetapi, kepatuhan disini mencakup perilaku *mudharib* (nasabah). Rumitnya persoalan yang dihadapi perbankan syariah akibat *agency problems* yang melekat pada pembiayaan *mudhārabah*, hal ini muncul disebabkan oleh faktor eksternal bank yaitu sebagian masyarakat melakukan berbagai tindakan-tindakan yang dapat melanggar hukum. Salah satunya, risiko ketidakjujuran masyarakat dalam menjalankan produk *mudhārabah*. Sebab, pembiayaan *mudhārabah* harus didukung dengan kondisi masyarakat yang jujur dan amanah.

Fungsi kepatuhan yaitu sebagai tindakan yang bersifat preventif, untuk memastikan kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank Syariah sesuai dengan aturan-aturan yang syariah (Waluyo, 2016). Saramawati dan Lubis (2014) mengatakan bahwa sebagai sebuah ladang kepercayaan bagi para *stakeholders*, maka sejatinya aturan main dalam perbankan syariah sudah menjadi keharusan agar setiap tindakan operasional senantiasa sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Menurut Junusi (2012) *shariah compliance* merupakan ketaatan bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariah yang artinya bank dalam operasinya mengikuti

ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya menyangkut tata-cara bermuamalat secara Islam. Tujuan kepatuhan dalam bisnis Islam adalah agar bisnis yang dijalankan dapat bernilai tauhid yang dapat direpresentasikan untuk kemaslahatan umat.

B. *Agency Theory*

Kebanyakan transaksi konvensional sebagian besar mendasarkan paradigmanya pada teori keagenan (*Agency Theory*). *Agency theory* yang lahir dalam dekade kapitalisme yang mantap menjadikan teori ini semakin identik dengan semangat dan jiwa kapitalisme. *Agency theory* sendiri tidak bisa dilepaskan dari pemikiran kaum profesional kapitalis sebagai usaha untuk mengurangi pertentangan atau konflik dari pihak-pihak yang mengadakan kontrak karena usaha yang dijalankannya memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya akibat adanya kontrak tersebut. Jensen dan Meckling (1976) juga menyatakan bahwa ada konflik kepentingan antara prinsipal (penyalur dana) dan agen (pengelola dana) dalam mengelola perusahaan. Masing-masing pihak berbuat untuk kepentingannya sendiri (*self interest*) dengan mengorbankan pihak lain. Eisenhardt, 1989 (dalam Ujiyantho dan Pramuka, 2007) menyatakan bahwa teori agensi menggunakan tiga asumsi sifat manusia yaitu: (1) manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri (*self interest*), (2) manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa mendatang (*bounded rationality*), dan (3) manusia selalu menghindari resiko (*risk averse*). Menurut Halim et al., (2005) juga mengatakan bahwa *agency theory* memiliki asumsi bahwa masing-masing individu semata-mata termotivasi oleh kepentingan diri sendiri sehingga menimbulkan konflik kepentingan antara *principal* dan *agent*.

Agency Problem disebabkan akibat agen berinteraksi secara langsung dalam kegiatan operasional usahanya sehingga mengetahui lebih banyak informasi mengenai bisnisnya, sedangkan prinsipal hanya mengandalkan laporan yang dibuat oleh agen

untuk mengetahui informasi terkait bisnis yang dijalankan. Ketidakharmonisan antara *principal* dan *agent* inilah disebabkan adanya *asymmetric information* (Kholmi, 2010). *Asymmetric information* yaitu informasi yang tidak seimbang yang disebabkan karena adanya distribusi informasi yang tidak sama antara prinsipal dan agen. Akibatnya informasi yang diperoleh prinsipal kurang lengkap, sehingga tetap tidak dapat menjelaskan kinerja agen yang sesungguhnya dalam mengelola kekayaan prinsipal yang telah dipercayakan kepada agen (Kholmi, 2010). *Agency Theory* sangat relevan bagi perbankan syariah (Anhara, 2015). Hal ini dapat terlihat pada penerapan sistem bagi hasil pada pembiayaan modal *mudhārabah*, asimetri informasi yang timbul akibat hubungan antara pihak pertama (*shahibul maal*/bank syariah) menyediakan modal dan pihak kedua (*mudharib*/nasabah) yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan nisbah yang disepakati dalam akad (Trianti, 2014).

Teori keagenan menekankan pada penyelesaian dua masalah yang dapat terjadi akibat hubungan kontraktual antara agen dan prinsipal, yaitu: *pertama*, masalah keagenan yang muncul karena perbedaan tujuan *principal* dan *agent* serta sulit atau mahal biaya bagi *principal* untuk memverifikasi hasil kerja *agent* yang sesungguhnya; dan *kedua*, masalah *risk-sharing* yang muncul karena perbedaan preferensi terhadap resiko antara *principal* dan *agent* (Ardiansyah, 2014). Sigit, 2006 (dalam Lewaru, 2015) juga mengemukakan bahwa permasalahan *agency theory* dalam konteks teori perusahaan dapat juga timbul karena terjadinya perbedaan “kepentingan ekonomis” antara *agent* dan *principal*. Lebih lanjut, menurut Beach. 2007:2 (dalam Multifiah et al., 2015) terdapat dua tipe model *principal-agent* yaitu: (1) model aksi tersembunyi (*moral hazard*) pada model ini *principal* tidak dapat mengobservasi/mengamati tindakan yang dilakukan agen, misalnya sejauh mana agen

menyelesaikan tugas, (2) model informasi tersembunyi (*adverse selection*), pada model ini agen memiliki informasi yang bersifat pribadi dan mengetahui cara lebih baik dari pada *principal*. Selain itu, akibat dari karakteristik dari *mudhārabah* adalah bahwa bank tidak dimungkinkan untuk terlibat dalam manajemen usaha *mudharib*, mengakibatkan bank memiliki kesulitan tersendiri dalam penilaian maupun pengendalian terhadap investasi yang diberikan. Pada hubungan seperti ini diperlukan adanya kejujuran, kepercayaan dan pertanggungjawaban antara nasabah dan bank mengenai informasi usaha khususnya untung dan rugi usaha.

C. Hubungan Keagenan Dalam Perpektif Islam

Hubungan keagenan yang mengemukakan bahwa manusia senantiasa bersifat oportunis dan senantiasa diwarnai konflik kepentingan, oleh sejumlah pihak dianggap bermasalah dan tidak sejalan dengan prinsip Islam. Bentuk relasi yang mendasari keberadaan hubungan tersebut muncul dari konsep dasar amanah dalam rangka kemutlakan tunggal atas kuasa ilahi. Secara lebih rinci nilai yang terbentuk dari dasar kolaborasi antara *shahibul maal* dan *mudharib* bukan semata-mata pada peningkatan *profit/maximize utility*, namun tujuan tersebut merupakan tujuan yang mewujudkan tujuan utama yakni memaksimalkan rahmat. Dalam *agency theory* penekanan pendelegasian wewenang dan pertanggungjawaban hanya terbatas pada hubungan sesama manusia. Sedangkan dalam Islam, hal tersebut mengandung suatu nilai yang lebih tinggi yang mempunyai nuansa religius, dimana pendelegasian wewenang dan pertanggungjawaban yang ada dalam Islam merupakan manifestasi dari *khalifatul fil ardh*. Untuk itu dalam mewujudkan *agency theory* dalam kerangka syariah maka setiap manusia perlu mendasarkan hubungan kontraktualnya pada konsep persaudaraan. Begitu pula Islam sangat menjunjung tinggi nilai persaudaraan (*ukhuwah*) yang

mendorong seseorang untuk saling mencintai, mempercayai serta mengutamakan orang lain yang dimotivasi atas keimanan kepada Allah SWT (Ummah, 2013).

Teori Akuntansi Syariah memberikan *guidance* tentang bagaimana seharusnya akuntansi syariah itu dipraktikkan. Dengan bingkai *faith* (keimanan), teori (*knowledge*) dan praktik akuntansi syariah (*action*) akan mampu menstimulasi terciptanya realitas ekonomi-bisnis yang bertauhid. Realitas ini adalah realitas yang di dalamnya sarat dengan jaringan kerja kuasa ilahi yang akan menggiring manusia untuk melakukan tindakan ekonomi-bisnis yang sesuai dengan Sunnatullah (Anggraei, 2011). *Agency theory* sama sekali tidak obyektif dan netral, tapi sebaliknya ia sarat dengan nilai kapitalistik yang dalam faktanya sangat eksploitatif. *Agency theory* secara samar memiliki kemampuan untuk merasionalkan, menormalisasi, dan melegitimasi berbagai macam instrumen yang digunakan untuk mengendalikan pekerjaannya yang seolah-olah kaum buruh memperoleh banyak manfaat dari sistem yang sesungguhnya sangat eksploitatif (Chwastiak, 1999 dalam Anggraeni, 2011). Islam mengajarkan ummatnya untuk mendahulukan sikap positif dalam melihat hubungan kontrak antar sesama manusia terlebih lagi terhadap sesama muslim. Hal ini akan mewujudkan sikap saling percaya dari para pelaku bisnis.

Pandangan Islam didasarkan atas sikap yang mengutamakan persaudaraan dan amanah, meskipun demikian dalam dinamika kehidupan khususnya bisnis Islam tidak menutup kemungkinan terjadinya tindakan-tindakan yang dapat merugikan orang lain. Hal ini dapat dilihat dari adanya terminologi seperti, munafik dan fasik yang mengharuskan adanya tindakan antisipatif berupa pengawasan untuk menghalangi perilaku yang merugikan. Dari sisi pengawasan, kita bisa melihat keterhubungan sekaligus perbedaan antara konsep teori agensi dan konsep Islam. Baik sistem konvensional maupun Islam sama-sama mendorong adanya pengawasan yang dianggap

mampu mengurangi terjadinya kecurangan. Namun model pengawasan bisnis dalam perspektif Islam memiliki perbedaan dari apa yang telah disebutkan dalam teori agensi. Pengawasan dalam Islam adalah lebih kepada menjaga sesuatu yang telah diamanatkan kepadanya, dan menganggap sesuatu tersebut adalah milik yang kuasa sehingga segalanya akan kembali padannya. Dalam *agency theory* pengawasan dilakukan semata-mata untuk melindungi harta perusahaan serta menghindari risiko kerugian.

Rasionalitas yang terwujud dalam *agency theory* tidak lebih dari rasionalitas utilitarianisme dimana semua kalkulasi berpulang pada utilitas-hedonis yang implikasinya memang dapat memarginalkan sifat-sifat “feminin” manusia (seperti : rasa, intuisi, spiritual, saling membantu, saling menghormati, saling percaya, jujur, dan lain-lainnya) (Anggraeni, 2011). Untuk itu Islam sangat menekankan rasa persaudaraan dan menutamakan musyawarah dalam mengatasi hubungan agensi dengan demikian tidak dibangun dari akar *self-interest*, tetapi dengan cinta. Cinta akan tetap memberi kemanfaatan materi, saling berbagi dan kebermaknaan hidup. Mudahnya, bila konsep kekayaan hanya dipandang sebagai bentuk ekonomi semata, maka yang terjadi adalah konflik kepentingan di atas hubungan kooperatif. Tetapi bila konsep kekayaan dipandang sebagai bentuk trilogi, maka ada proses trust yang masuk dalam mekanisme hubungan, trust yang didasari oleh cinta dan saling berbagi. Didasari atas filosofi Islam maka untuk menjamin bahwa etika bisnis telah dilaksanakan dan mencegah penyimpangan, terdapat dua konsep pengawasan, yakni pengawasan pribadi (Internal) dan pengawasan dari luar (eksternal). Pada dasarnya seorang muslim mengawasi dirinya sendiri yang merupakan implementasi dari sifat amanah dan untuk melengkapi pengawasan secara pribadi maka dilakukan pengawasan dari luar.

D. *Shariah Governance*

Seiring dengan perkembangan industri perbankan syariah khususnya di Indonesia antara lain ditandai dengan semakin beragamnya produk perbankan syariah dan bertambahnya sekmen pasar pelayanan perbankan syariah, maka penerapan tata kelola yang baik bagi lembaga perbankan syariah menjadi sebuah keharusan yang tak terbantahkan. Bahkan bank syariah harus terampil sebagai pionir terdepan dalam mengimplementasikan *Good Corporate Governance* (GCG) tersebut. Dalam kerangka itulah IFSB (*Islamic Financial Service Board*), sebuah penetapan standar internasional untuk regulasi lembaga keuangan Islam, pada tahun 2009 menerbitkan standar *Good Corporate Governance* (GCG) untuk lembaga keuangan syariah yang merupakan pedoman pelaksanaan tata kelola perusahaan lembaga keuangan syariah disemua negara atau yang lebih dikenal dengan istilah *Good Shariah Governance* (GSG) (Rama dan Novela, 2015).

Konsep tata kelola ini penting bagi lembaga keuangan syariah dengan berbagai alasan, menurut Al gaoud dan lewis, 2009 (dalam Nofianti dan Irfan, 2014) mengungkapkan karena permasalahan *governance* pada perbankan syariah ternyata berbeda dengan perbankan konvensional. Pertama, bank syariah memiliki kewajiban untuk mematuhi prinsip-prinsip syariah (*shariah compliance*) dalam bisnisnya. Karenannya, Dewan Pengawas Syariah Memainkan peran yang penting dalam *governance structure* perbankan syariah. Kedua karena potensi terjadinya *asymmetry information* sangat tinggi pada perbankan syariah maka permasalahan *agency theory* menjadi sangat relevan. Ketiga, dari perspektif budaya nilai-nilai etika bisnis Islam menjadi karakter inherent dalam praktik bisnis perbankan. Sistem *shariah governance* dibutuhkan oleh lembaga keuangan syariah demi menumbuhkan kepercayaan dari para *stakeholders* dan publik secara umum bahwa seluruh praktek dan aktivitas yang

dilakukan sudah sesuai dengan syariah. Sementara menurut Maradita (2014) *shariah governance* dimaksudkan agar aktivitas bisnis yang dijalankan benar-benar dapat mencapai tujuannya, baik tujuan *حَبْلُ مِنَ اللَّهِ* (Habluminallah) dan *حَبْلُ مِنَ النَّاسِ* (Hablumminannas).

penerapan *shariah governance* di perbankan syariah dalam rangka memastikan operasional bank syariah tetap sesuai koridor syariah, menerapkan *shariah compliance* (memenuhi kepatuhan pada prinsip syariah) (Purnomo, 2016). Menurut Zulhelmy dan Rahman (2009) mengatakan bahwa untuk menerapkan sistem tata kelola Islam yang baik (*good shariah governance*) perlu disinyali dengan penerapan sistem akuntansi yang baik pula. Sistem tata kelola ini juga diperlukan untuk menghindari terjadinya risiko syariah (*shariah risk*), yaitu suatu bentuk risiko yang muncul karena disebabkan adanya ketidakpatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah (Rama, 2015). Hal ini sangat beralasan, karena apabila *shariah governance* sudah menjadi jiwa bagi semua pihak yang terlibat di perusahaan (*stakeholders*), maka kecurangan, spekulasi, *insider-trading* dan sebagainya akan dapat diminimalisasi. Menurut Junusi (2012) bahwa dalam ajaran Islam, kelima prinsip GCG yang diterapkan pada perbankan konvensional yaitu prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*) tidak sesuai dengan norma dan nilai islami dalam aktivitas dan kehidupan seorang muslim. Untuk itu Islam sangat intens mengajarkan diterapkannya prinsip-prinsip adalah Shiddiq (Kejujuran), Amanah (Kepercayaan), Tabligh (Transparansi dan Keterbukaan), Fathonah (Kecerdasan), Tawazun (Keseimbangan), Mas'uliyah (Akuntabilitas), Akhlaq (Moral dan Integritas), 'Al-Adl (Keadilan), Hurriyah (Independensi dan kebebasan yang bertanggungjawab), Ihsan (Profesional), Wasathan (Kewajaran), Ghirah (Semangat), Idarah (Pengelolaan), Khilafah (Kepemimpinan), Aqidah (Kepercayaan dan

Keyakinan), Ijabiyah (Berfikir Positif), Raqabah (Pengawasan), Qira'ah dan Ishlah yaitu organisalah yang terus belajar dan selalu melakukan perbaikan), Zuhud (menghindari hal-hal keduniawian) (Junusi, 2012).

Pelaksanaan *shariah governance* pada perbankan syariah sendiri dapat dilihat dari dua perspektif, yaitu perspektif makro dan mikro. Nilai-nilai syariah dalam perspektif mikro menghendaki semua dana yang diperoleh dalam sistem perbankan syariah perlu dikelola dengan hati-hati. Menurut Haniffa, 2001 (dalam Ardinsyah, 2014) bahwa prinsip dasar paradigma syariah merupakan multi paradigma yang *holistic*, mencakup keseluruhan dimensi wilayah mikro dan makro. Pertama, dimensi mikro prinsip dasar paradigma syariah adalah individu yang beriman kepada Allah SWT (tauhid) serta menaati segala aturan dan larangan-Nya. Pencapaian tujuan syariah tersebut dilakukan untuk menguatkan etika dan moral iman (*faith*), taqwa (*piety*), kebaikan (*righteousness*), ibadah (*workship*), serta barakah (*blessing*). Kedua, dimensi makro prinsip syariah meliputi politik, ekonomi dan sosial. Dalam dimensi politik, menjunjung tinggi musyawarah dan kerjasama. Sedangkan dalam dimensi ekonomi, melakukan usaha halal, mematuhi larangan bunga, dan memenuhi kewajiban zakat. Selanjutnya dalam dimensi sosial yaitu mengutamakan kepentingan umum dan amanah. Berdasarkan paradigma diatas maka dalam penelitian kali ini nilai-nilai syariah yang perlu ditekankan perbankan syariah pada pembiayaan *mudhārabah* yaitu dari segi mikro yaitu:

1. Shiddiq (Kejujuran)

Kejujuran artinya benar dalam perkataannya dan perbuatannya (Nofianti dan Irfan, 2014). Kejujuran merupakan ajaran Islam yang mulia. Kejujuran adalah dasar dari segalanya dan sekaligus kunci menuju tempat yang mulia dihadapan Allah dan terhormat dihadapan manusia. Sifat jujur perlu ditanamkan didalam diri seseorang

maupun dalam berorganisasi, karena kejujuran memiliki makna tanggungjawab moral seseorang terhadap nilai-nilai dan norma-norma agama dan masyarakat (Yulianti, 2013). Kejujuran dalam dunia bisnis merupakan prinsip bisnis yang harus dijunjung tinggi (Ismanto, 2012). Sikap jujur dapat dikatakan sebagai fadilah yang menentukan status dan kemajuan perseorangan maupun masyarakat (Ilham, 2016). Menegakkan prinsip kejujuran adalah salah satu kemaslahatan dalam hubungan antara individu. Anjuran untuk berlaku jujur cukup banyak disebutkan dalam Al-qur'an diantaranya pada surah At-Taubah ayat 119 yang artinya :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّٰدِقِينَ ﴿١١٩﴾

Terjemahnya:

“ Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar”.

Firman Allah diatas menganjurkan kita untuk berperilaku jujur dalam setiap tingkah laku, baik jujur dalam perbuatan dan perkataan. Tidak semua orang sanggup berperilaku jujur dalam setiap tingkah laku mereka, hanya mereka yang terbiasa dengan kejujuran dan bersama orang-orang yang jujur lah yang sanggup istiqomah dalam kejujuran. Selain itu perintah bertakwa dapat diartikan sebagai anjuran untuk berperilaku jujur, karena salah satu ciri orang yang bertakwa adalah bersifat jujur (Mursal dan Suhadi, 2015). Dunia bisns modern saat ini kadang sulit untuk mendapatkan kejujuran. Fenomena kehidupan saat ini secara nasional memperlihatkan kejujuran seakan semakin dijauhi masyarakat (Mursal dan Suhadi, 2015). Sementara ketidakjujuran (kebohongan) menjadi bagian keseharian masyarakat. Dunia perbankan syariah sekarang seharusnya menjadi bisnis keuangan yang lebih mengedepankan moral, etika, kejujuran, keadilan dan kemaslahatan bila dibandingkan keuntungan finansialnya, walaupun sebagai entitas bisnis keuntungan merupakan salah satu tujuan (Waluyo, 2016). Akan tetapi dalam

berbagai penelitian menunjukkan bahwa tujuan bank syariah sebagian besar masih berorientasi pada laba (*profit oriented*) bukan berbasis sosial (*social-based*).

2. Amanah (Pemenuhan Kepercayaan)

Amanah (Kepercayaan) artinya benar-benar bisa dipercaya (Nofianti dan Irfan, 2014). Jika satu urusan diserahkan kepadanya, niscaya orang percaya bahwa urusan itu akan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Amanah berasal dari bahasa arab yaitu *amuna, ya'munu, amanah*, artinya dipercaya, jujur, lurus, setia. Dari akar kata yang sama terbetuk kata *amina, ya'manu, amnan*, artinya aman, sentosa. Kata iman juga berasal dari akar kata yang sama dengan amanah, yaitu *Amana, yu'minu, Imaan* (Yunus dalam Mursal dan Suhadi, 2015). Dalam tataran kehidupan praktis, tiga kata ini (amanah, iman, dan aman) memiliki hubungan yang erat. Salah satu pembuktian iman adalah amanah, sifat amanah akan mengantarkan pada keamanan, dan keamanan akan semakin mantap jika berangkat dari sifat amanah yang didasari keimanan. Dalam dunia bisnis, amanah memegang peranan penting dalam pengembangan berbagai bisnis. Kemaslahatan dalam bentuk keseimbangan (untung rugi, plus minus, harapan dan resiko, kewajiban dan hak, dan lain sebagainya) dalam hidup bermasyarakat akan terealisasi jika muamalah (interaksi dan transaksi) antar sesama dilakukan dengan penuh amanah dan saling percaya. Firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 283 yaitu:

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا
الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

“....Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan barang siapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Ayat di atas mengungkapkan betapa pentingnya sifat amanah dalam interaksi sosial maupun transaksi finansial. Allah mengiringi kata amanah dengan perintah bertakwa kepada-Nya. Hal ini jelas menunjukkan bahwa amanah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari ketakwaan. Menurut Agung dan Herwanto (2017), mengatakan bahwa terdapat tiga konsep amanah yaitu: (1) Amanah kepada Allah SWT, dalam hal ini amanah dapat diartikan lebih luas sebagai bentuk kewajiban hamba kepada Tuhannya, (2) Lingkungan (sesama manusia dan alam), dalam hal ini amanah dapat dilihat dari karakter terpuji dan tugas yang harus dilaksanakan, (3) Diri sendiri, pada konsep ini amanah dilihat sebagai sesuatu yang harus dikerjakan untuk kebaikan dirinya. Amanah dalam segi yang lebih luas meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan hubungan interpersonal antara manusia dan hubungan dengan sang penguasa alam, yaitu Allah. Ibnu Katsir, 2013 (dalam Agung dan Husni, 2016), amanah adalah semua tugas atau beban agama yang meliputi perkara dunia dan akhirat yang ditujukan kepada manusia. Konteks Islam (Al-qur'an) amanah dapat dilihat dari berbagai dimensi. Didalam Al-qur'an terdapat beberapa makna amanah yaitu : Al-qur'an surah Al-Azhab : 7, amanah disebut sebagai tugas atau kewajiban, Al-Baqarah : 283, Amanah sebagai hutang atau janji yang harus ditunaikan. Surah An-Nisa : 58, Amanah sebagai tugas yang harus disampaikan pada yang berhak, Surah Al-Anfal : 27, tentang menjaga amanah. Surah Al-Mukmin : 8, anjuran memelihara amanah. Sehingga dapat disimpulkan aspek dua aspek amanah yaitu adanya karakter positif dan kemampuan melakukan tugas.

3. Tabligh (Transparansi dan Keterbukaan)

Tabligh (Transparansi) artinya menyampaikan. Tidak ada yang disembunyikan meski itu menyinggung (Nofianti dan Irfan, 2014). Tabligh juga berarti menyampaikan risalah dari Allah tentang kebenaran yang harus ditegakkan dimuka bumi. Dalam dunia

bisnis menyampaikan risalah (informasi) kebenaran dapat diwujudkan dalam bentuk sosialisasi praktik bisnis yang baik dan bersih. Termasuk mencontoh perilaku bisnis Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Transparan dapat diartikan menyampaikan hal yang benar. Panduan Humanitarian Forum Indonesia (HFI) dalam Fatmawati et al., (2016), ada 6 prinsip transparansi yang dikemukakan yaitu : (1) Adanya informasi yang mudah dipahami dan diakses. (2) Adanya publikasi dan media mengenai proses kegiatan. (3) Adanya laporan berkala mengenai pendayagunaan sumber daya dalam perkembangan proyek. (4) Laporan tahunan. (5) Website atau media publikasi informasi. (6) pedoman dalam penyebaran informasi. Nilai tabligh sendiri dapat diartikan oleh umat muslim dengan mengkomunikasikan dan menyampaikan segala sesuatu informasi dengan baik kepada siapapun (Amalia dan Herianingrum, 2015). Orang yang memiliki dan menerapkan nilai tabligh ini akan menyampaikan segala sesuatu informasi dengan benar dan dengan tutur kata yang tepat. Sebagaimana firman Allah SWT yaitu:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Terjemahnya:

“.....Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar” (QS. An-Nisa : 9).

Dalam sebuah perikatan atau perjanjian, keterbukaan antara kedua belah pihak sangat diperlukan terutama dalam menyampaikan hal yang benar. Menurut Isna (2016), mengatakan bahwa prinsip transparansi merupakan keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan. Keterbukaan dalam menyampaikan informasi maksudnya adalah bahwa informasi yang disampaikan harus lengkap, benar dan tepat waktu kepada semua pihak pemangku kepentingan. Keterbukaan ini sekaligus merupakan bentuk

pertanggungjawaban terhadap *stakeholders*. Transparansi adalah prinsip yang menjamin kebebasan akses atau siapapun untuk memperolehnya, baik informasi tentang tata kelola, proses pembuatan, implementasi, dan hasil-hasil kebijakan (Taufiq, 2015). Transparansi adalah kebijakan terbuka untuk pengendalian. Secara langsung dengan pengungkapan informasi diharapkan bisa menghasilkan persaingan bisnis yang sehat, toleransi, dan kebijakan didasarkan pada preferensi publik.

4. Mas'uliyah (Akuntabilitas)

Mas'uliyah (Akuntabilitas) adalah kewajiban individu atau penguasa untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan tugas dan kewenangan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan (Nofianti dan Irfan, 2014). Akuntabilitas menurut Samawati dan Lubis (2015), merupakan kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban perusahaan sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Bila akuntabilitas ini diterapkan, maka perusahaan akan terhindar dari *agency problem* (benturan kepentingan peran). Sementara menurut Tahir et al., (2016) mengatakan bahwa akuntabilitas adalah pertanggungjawaban dari seseorang atau kelompok orang yang diberi amanat untuk menjalankan tugas tertentu kepada pihak pemberi amanat baik secara vertikal maupun horizontal.

Konsep akuntabilitas menurut Lewis, 2006 (dalam Kiswanto dan Mukhibad, 2011) merupakan pusat dari Islam. Bahkan konsep akuntabilitas dalam Islam lebih luas cangkupannya dari pada konsep akuntabilitas dalam akuntansi. Konsep akuntabilitas dalam Islam tidak hanya akuntabilitas kepada *stakeholders* saja tetapi juga kepada Allah dan masyarakat. Hal ini dikarenakan hukum Islam yang berdasarkan syariah (*comprehensive ethic*) mengatur cara yang lebih spesifik bagaimana kegiatan komersial dibentuk, bagaimana bisnis harus diorganisasi dan diatur dan sebagaimana lapoan keuangan harus dibuat. Konteks Islam, akuntabilitas demikian ditafsikan sebagai

pertanggungjawaban kepada Tuhan melalui pembuatan informasi yang tersedia secara bebas, pengungkapan informasi yang jujur dan relevan (Lewis, 2006). Menurut Lewis (2006), Sifat teoretis syariah Islamiah membahas tiga dimensi yang saling terkait sebagai bentuk pertanggungjawab yaitu: (i) memenuhi kewajiban kepada Allah dan selalu mencari kesenangan-Nya dengan memenuhi peran sebagai wakil-Nya di bumi; (ii) memenuhi kewajiban kepada masyarakat; dan (iii) memenuhi kebutuhan sendiri. Secara tidak langsung akuntabilitas ada ketika terjadi kontrak antara *principal* dan *agent*.

Konsep akuntabilitas dalam Islam berasal dari Al-qur'an yang mana mengacu pada asas pertanggungjawaban. Menurut Maali et al., 2006 dan Abu Tapanjeh, 2009 (dalam Junaidi, 2015), mengatakan bahwa menurut ekonomi Islam, akuntabilitas dibutuhkan untuk menghasilkan pengungkapan yang benar dan adil serta transparan. Akuntabilitas utama adalah kepada Allah SWT karena semua tindakan akan dimintai pertanggungjawaban baik di dunia maupun diakhirat. Konsep dasar akuntabilitas menurut Islam berdasarkan prinsip-prinsipnya berbagi dengan nilai adil, *rahmatan lil alamin* dan maslahah (kepentingan masyarakat). Oleh karena itu pengungkapan fakta keuangan dan non keuangan harus berisi informasi yang benar, akurat dan tersedia bebas untuk penggunaannya. Telah ditekankan dalam Al-qur'an mengenai konsep akuntabilitas yaitu salah satunya dinyatakan dalam surah Al-Baqarah : 284.

لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنْ تُبَدُّوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ



Terjemahnya:

“Kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikan, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu. Maka Allah mengampuni siapa yang dikehendaki-Nya

dan menyiksa siapa yang dikehendaki-Nya; dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu”.

Ayat diatas menegaskan bahwa petanggungjawaban meliputi perintah, dan hal-hal yang dilarang serta memiliki konsekuensi atau hukuman. Dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas sebagai konsep etika dengan beberapa perilaku moral yang terlibat di dalamnya. Ini mencakup konsep seperti tanggung jawab melakukan kewajiban, pertanggungjawaban atas apa yang telah dilakukan berkenaan dengan kewajiban, penegakan dan pertanggungjawaban untuk melakukan perintah, dan kesalahan dalam kasus pembangkangan. Yasmin et al., 2014 (dalam Yunanda et al., 2016) menyatakan bahwa masalah pertanggungjawaban yang dikomunikasikan akan sangat penting bagi organisasi amal berbasis agama sebagai dana sumbangan dan penggunaan dana yang sering dimaksudkan untuk memenuhi kewajiban keagamaan demi kesejahteraan masyarakat.

5. Keadilan

Nilai keadilan merupakan nilai yang sangat penting dalam etika kehidupan sosial dan bisnis (Siregar, 2015). Nilai keadilan esensinya menetapkan sesuatu hanya pada tempatnya dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak serta melakukan sesuatu sesuai posisinya (Adiansyah, 2014). Kata adil berasal dari kata Arab ‘Adl yang secara harfiah bermakna sama. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, adil berarti sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar dan sepatutnya (Mursal dan Suhadi, 2015). Dengan demikian, seseorang disebut berlaku adil apabila ia tidak berat sebelah dalam menilai sesuatu, tidak berpihak kepada salah satu, kecuali keberpihakannya kepada siapa saja yang benar sehingga ia tidak akan berlaku sewenang-wenang. Al-Qur’an juga menegaskan kata Adl dalam surah Al-Maidah : 8 yaitu :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلّٰهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اَعْدِلُوا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۚ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) Karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. berlaku adillah, Karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Keharusan adil di sini menyangkut sikap semua orang yang berada pada posisi membuat keputusan, pelayanan, dan lain-lain, baik di lingkungan keluarga, atau masyarakat dan negara, baik bidang hukum, ekonomi, politik, atau bidang-bidang lainnya. Menurut Velasquez, 2005 (dalam Wulandari, 2010) menyatakan bahwa masalah keadilan dibagi dalam tiga kategori yaitu : (1) Keadilan Distribusi, Keadilan yang berkaitan dengan distribusi yang adil atas keuntungan dan beban dalam masyarakat. (2) Keadilan Retribusi, Keadilan yang berkaitan dengan pemberlakuan hukuman yang adil pada pihak-pihak yang melakukan kesalahan. Hukuman yang adil adalah pertama, hukuman yang layak diterima oleh pihak-pihak yang melakukan kesalahan. kedua, hukuman tersebut diberikan kepada orang-orang yang benar melakukan apa yang dituduhkan. Ketiga, hukuman tersebut haruslah konsisten dengan proporsional dengan kesalahan. (3) Keadilan Kompensasi, kompensasi yang adil adalah kompensasi yang proporsional dengan nilai kerugian yang diterima. Hakikat nilai keadilan dalam syariah Islam berdasarkan aksioma, bahwa manusia adalah *khalifatul fil ardh*. Hal ini mengandung pengertian bahwa manusia dalam menjalankan fungsinya sebagai khalifah Allah di muka bumi dituntut untuk mampu mendistribusikan rahmat kepada seluruh makhluk yang ada. Dalam suatu perusahaan, untuk mewujudkan suatu keadilan dapat dilakukan dengan cara yaitu memberikan kesempatan yang sama kepada

stakeholders dalam penggunaan sumber daya yang ada, memberikan kesempatan kepada *stakeholders* untuk mendapatkan informasi dan memberikan kesamaan hak kepada *stakeholders* untuk menikmati laba sebagai hasil dari pengolahan sumberdaya (Slamet, 2001 dalam Wulandari, 2010).

Keadilan sebagai konsep mengacu pada kesetaraan dalam memberikan hak dan mematuhi kewajiban tanpa adanya diskriminasi. Mursal dan Suhadi (2015) mengungkapkan bahwa adil memiliki makna, melekatkan sesuatu pada tempatnya; menempatkan secara proporsional dan perlakuan setara atau seimbang. Adapun makna keadilan di sisi lain sering diartikan sebagai sikap yang selalu menggunakan ukuran sama, bukan ukuran ganda. Sikap inilah yang membentuk seseorang untuk tidak berpihak pada salah satu yang berselisih. Menurut Al-Ashfihani (dalam Mursal Suhadi, 2015), adil dinyatakan sebagai memperlakukan orang lain setara dengan perlakuan terhadap diri sendiri. Di mana ia berhak mengambil semua yang menjadi haknya, dan/atau memberi semua yang menjadi hak orang lain. Secara langsung keadilan terletak pada keharmonisan menuntut hak dan kewajiban. Sementara dalam aspek normatif, Islam memandang keadilan sebagai sesuatu yang harus ditegakkan dan tugas khalifah (manusia dan pemimpin) untuk mewujudkannya. Hal inilah yang kemudian menjadikan Islam sebagai agama universal yang menjamin keberlangsungan tatanan kehidupan yang berkeadilan dimuka bumi sebagai ejawantah *rahmatan lil 'aalamin* yang diemban pada setiap muslim, dimanapun berada (Lukman et al., 2016).

E. Konsep dan Nilai Dasar dalam Akad Mudhārabah

Mudhārabah berasal dari kata *adhdharbu fil ardhi*, yaitu bepergian untuk urusan dagang (Adhim, 2008). Hal ini diungkapkan pula dalam firman Allah SWT dalam QS. Al-Muzzammil: 20 yang berbunyi : “Mereka bepergian dimuka bumi mencari karunia Allah SWT”. Hal ini dapat diartikan bahwa akad *mudhārabah* diperbolehkan dalam

Islam. Menurut PSAK nomor 59 paragraf 6, *Mudhārabah* adalah akad kerjasama usaha antara *shahibul maal* (pemilik dana) dan *mudharib* (pengelola dana) dengan nisbah bagi-hasil menurut kesepakatan di muka. Keuntungan usaha secara *mudhārabah* dibagi sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak sedangkan apabila rugi ditanggung *shahibul maal* (pemilik modal), selama hal itu bukan akibat kelalaian *mudharib*. Akad *mudhārabah* diperbolehkan dalam Islam karena bertujuan untuk saling membantu antara pemilik modal dan seseorang yang ahli dalam memutar uang (usaha/dagang). Selain itu tujuan dilaksanakannya akad *mudhārabah* yaitu untuk membentuk serta terwujudnya masyarakat yang taat akan aturan dan nilai-nilai syariah. Kontrak ini telah diatur dalam fiqih muamalah dan memiliki dasar hukum dalam Islam. Ulama fiqih sepakat bahwa *mudhārabah* disyaratkan dalam Islam berdasarkan hadits di riwayatkan dari Ibnu Abbas (dalam Maharani, 2008) yaitu :

كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا، وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًا، وَلَا يَشْتَرِيَ بِهِ ذَابَّةً ذَاتَ كَبِدٍ رَطْبَةٍ، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ، فَبَلَغَ شَرْطُهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ (رواه الطبراني في الأوسط عن ابن عباس).

Terjemahnya:

“Bahwa Syaidina Abbas bin Abdul Muthalib jikalau memberikan dana kepada mitra usahanya secara *mudhārabah* ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu menyalahi aturan, yang bersangkutan harus bertanggung jawab atas dana tersebut. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya.” (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas).

Dalam melaksanakan kontrak *mudhārabah* harus memenuhi beberapa rukun atau syarat, (1) pelaku akad minimal dua pihak yang bertindak sebagai pemilik modal (*shahib al-maal*) dan pelaksana usaha (*mudharib*). (2) objek *mudhārabah* dimana objek dari *shahib al-maal* berupa modal kerja sedangkan objek *mudharib* adalah keahlian,

ketrampilan, *selling skill*, *management skill*, dan lain-lain. (3) kesepakatan antara kedua belah pihak tanpa adanya paksaan untuk terikat dalam kontrak *mudhārabah* sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya masing-masing. (4) Nisbah bagi hasil yaitu hak untuk menerima hasil usaha bagi masing-masing pihak (Maharani, 2008). Bagi hasil pada *mudhārabah* dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode, yaitu bagi laba (*profi sharing*) dan bagi pendapatan (*revenue sharing*). Bagi laba, dihitung dari pendapatan setelah dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana *mudhārabah*. Sedangkan bagi pendapatan, dihitung dari total pendapatan pengelolaan *mudhārabah* (Alfie dan Khanifah, 2007). Sementara menurut ahli fiqih syafi'iyah (dalam Alfie dan Khanifah, 2007) mengatakan bahwa semua beban/biaya dalam *mudhārabah* tidak boleh diambilkan dari dana pembiayaan *mudhārabah*, maka perhitungan bagi hasil hanya dapat dilakukan dengan cara *revenue sharing* (bagi pendapatan).

Secara umum *mudharabah* terbagi menjadi dua jenis yaitu (Hulam, 2010) :

- a. *Mudhārabah mutlaqah*, yakni *mudhārabah* yang cangkupan sangat luas dan tidak terikat kepada syarat-syarat tertentu seputar materi usaha, waktu dan daerah bisnis. Pada akad ini dana yang diterima dari *shahibul maal* (pemilik harta) ke *mudharib* (penerima dana) yang memberikan kekuasaan yang sangat besar.
- b. *Mudhārabah muqayyad*, yakni *mudhārabah* yang terikat kepada syarat-syarat tertentu mengenai batasan materi usaha, waktu, atau tempat usaha. Pada akad ini seringkali mencerminkan *shahibul maal* memasuki dunia usaha.

Dalam mengaplikasikan akad *mudhārabah*, pihak Bank Syariah harus memastikan bahwa usaha tersebut dikelola dengan baik dan taat asas berdasarkan

perjanjian yang telah disepakati. Suatu akad yang dibuat baik syarat yang dikandungnya harus mampu mewujudkan keinginan para pihak untuk tujuan kemaslahatan baik bagi individu, kelompok maupun masyarakat baik dalam aspek sosial maupun ekonomi secara menyeluruh (Maulana, 2014). Untuk itu perlu diketahui bahwa hakikat akad *mudhārabah* dalam Islam adalah akad yang disunnahkan dengan tujuan saling tolong-menolong antara yang tidak mampu dan memiliki keahlian hal ini seperti yang diisyaratkan dalam Al-quran yang mewajibkan setiap muslim untuk saling tolong-menolong dalam hal kebaikan dan ketakwaan (Alfie dan Khanifah, 2007). Hal inilah yang perlu kita junjung tinggi dalam menjalankan hubungan kontraktual antar sesama muslim.

F. *Agency Problems pada Kontrak Pembiayaan Mudhārabah Bank Syariah*

Agency theory adalah teoretis yang menjelaskan tentang hubungan antara *principal* dan *agent* dimana *principal* mendelegasikan wewenang kepada *agent* dalam hal pengelolaan usaha sekaligus pengambilan keputusan dalam perusahaan (Jensen dan Meckling, 1976). Karakteristik *agency theory* adalah sikap untuk memanfaatkan peluang dengan mengejar keuntungan sebebas-bebasnya (*unconstrained opportunism*) (Maharani, 2008). Menurut Stiglitz, 1987 dan Pratt & Zeckhauser, 1985, Gilardi, 2001 (dalam Multifiah et al., 2015), hubungan *principal-agent* terjadi apabila tindakan yang dilakukan seseorang yang memiliki dampak pada orang lain atau ketika seseorang sangat tergantung pada tindakan orang lain. Karim, 2001 (dalam Friyanto, 2013) menegaskan munculnya *asimetry information* pada kontak *mudhārabah* karena *mudharib* sebagai agent memiliki banyak informasi pada dua aspek yaitu : (1) *mudharib* mendesain kontrak dengan *shahibul maal*, sehingga *mudharib* lebih memiliki kemampuan untuk mengobservasi permintaan maupun memproduksi usaha (2) hanya

mudharib yang mampu mengobservasi tingkat usaha dan upaya yang telah dilakukan tanpa campur tangan *shahibul maal*.

Secara spesifik *agency problem* yang terjadi dalam kontrak *mudhārabah* adalah ketika kepentingan *entrepreneur* atau *mudharib* bertentangan dengan *shahib al-maal*. *Mudharib* bertindak mengabaikan hubungan kontraktual dan mendorong untuk bertindak tidak berdasarkan kepentingan *shahib al-maal*. Pihak *shahib al-maal* dalam kontrak *mudhārabah* tidak diperbolehkan ikut campur dalam masalah pengelolaan usaha sehingga *mudharib* memiliki informasi privat yang lebih besar dan membuka peluang asimetri informasi (Maharani, 2008). Sementara hasil penelitian yang dilakukan Friyanto (2013), menemukan bukti terkait masalah utama dalam implementasi produk pembiayaan *mudhārabah*, antara lain:

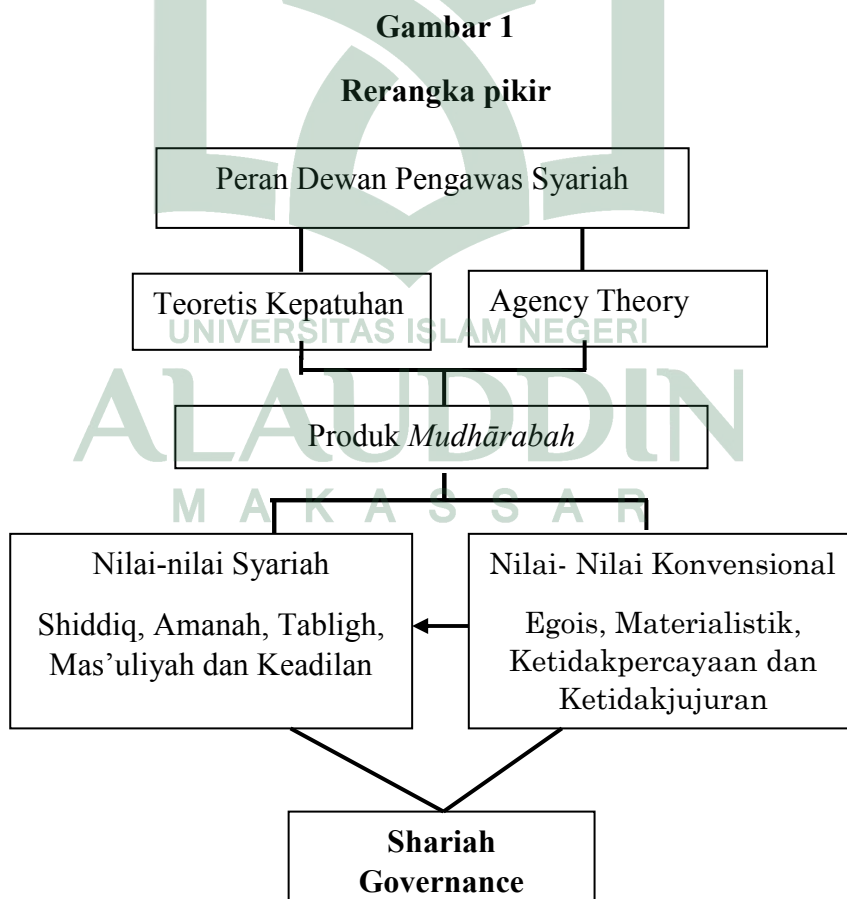
1. Keseriusan nasabah dalam menjalankan bisnis yang dibiayai bank. Dalam kenyataannya perusahaan-perusahaan *mudharib/musyarik* tidak selalu memenuhi harapan bank. Seringkali, kewajiban-kewajiban atas pembiayaan kepada bank tidak dipenuhi dengan baik, perkembangan perusahaan tersendat-sendat bahkan ada kemungkinan menjadi pembiayaan macet.
2. Pelanggaran ketentuan yang telah disepakati sesuai perjanjian, sehingga dalam menjalankan bisnis yang dibiayai bank tidak sesuai lagi dengan kesepakatan. Adanya kekhawatiran dari bank terhadap penyalahgunaan penggunaan dana (*side streaming*) dimana nasabah tidak menggunakan dananya sesuai dengan apa yang tertera dalam perjanjian atau akad, bagaimanapun juga bank tidak mungkin mengawasi secara terus menerus.
3. Pengelolaan internal perusahaan *mudharib/ musyarik* yang belum dilakukan secara profesional sesuai standar pengelolaan yang disepakati antara bank dan nasabah.

4. Kelalaian nasabah/*mudharib* dalam menjalankan bisnis yang dibiayai bank. Kenyataan ini menimbulkan banyak masalah. Nasabah (*mudharib*) masih menyembunyikan keuntungan usaha yang sesungguhnya, dan ini merupakan pemicu problema keanggenan bagi bank syariah.
5. Bank syariah selaku pemilik modal (*shahibul maal*) masih belum yakin dengan kejujuran nasabah dalam melaporkan hasil usahanya. Dalam be-berapa kasus masih terdapat nasabah (*mudharib*) yang tidak amanah (*moral hazard*).

Beberapa temuan di atas menggambarkan posisi yang lebih menguntungkan bagi *mudharib* dalam kemampuan mengakses informasi lebih banyak dalam pengelolaan dana sehingga kemungkinan risiko untuk berlaku curang cukup besar tetapi apabila terjadi kerugian yang bukan disebabkan kesalahan *mudharib* sepenuhnya ditanggung oleh *shahibul maal* sedangkan untuk melakukan pemeriksaan yang bertujuan menemukan apakah kerugian disebabkan oleh *mudharib* atau bukan tidak mudah dan mahal. Kondisi ini memberi peluang besar *mudharib* untuk melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan kepentingan *shahibul al-maal* sebagai pemilik dana melalui manipulasi data-data keuangan, produksi maupun penjualan untuk memperoleh keuntungan sepihak. Dalam kasus kontrak *mudhārabah*, manajer memiliki hak penuh atas perusahaan sehingga *agency problem* timbul dalam bentuk pemakaian dana *shahib al-maal* yang tidak produktif dan pelaporan laba yang tidak sebenarnya. Keberhasilan pelaksanaan pendanaan bagi hasil, bagaimanapun akan bergantung pada solusi masalah keagenan berupa asimetri informasi yang muncul pada kontrak tersebut (Ahmed, 2000 dalam Maharani, 2008).

G. Rerangka pikir

Sistem mudharabah pada dasarnya dibangun dari 2 teoretis utama yaitu teoretis kepatuhan dan *agency theory*. Kedua teoretis ini secara teoretis dan konsep sangat bertolak belakang. Untuk itu peran Dewan Pengawas Syariah sangat diperlukan untuk mempertahankan sisi syariahnya. Teoretis-teoretis diatas telah dijalankan dalam sistem syariah pada produk mudharabah. Dampak pengaplikasian akad ini yang menjadikan *agency problem* terjadi dan dikhawatirkan dapat memicu hilangnya nilai syariah dan menciptakan manusia kembali pada *agency theory* yang merubah manusia selalu mementingkan diri sendiri dan mengutamakan konsep laba. Konsep konvensional inilah yang perlu dirubah dan diminimalisir oleh konsep syariah dalam struktur *good shariah governance* (GSG).



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Data kualitatif merupakan data yang tidak disajikan dan tidak dapat diukur dengan angka-angka secara langsung, akan tetapi diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi yang diinterpretasikan oleh peneliti atau dengan kata lain data kualitatif merupakan data yang disajikan dalam kata-kata yang mengandung makna. Hal ini membutuhkan penelitian eksploratif dimana penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan pengetahuan atau dugaan yang sifatnya masih baru dan untuk memberikan arahan bagi penelitian selanjutnya. Penelitian ini dilakukan di kota Makassar dengan mengambil objek penelitian pada PT. Bank Sulselbar Syariah Makassar Jl. DR Ratulangi No. 7 Ruko Blok C1-C2. Informan dalam penelitian yaitu orang-orang yang memiliki pengetahuan cukup terkait bidang yang diteliti.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan paradigma kritis. Paradigma kritis menganggap bahwa sains seharusnya memiliki misi untuk mengubah dunia dan memberdayakan para pelakunya, yaitu melihat apa yang sesungguhnya ada dibalik permukaan (Efferin, 2015). Penelitian kritis adalah bagian dari aktivitas berbasis nilai-nilai tertentu untuk membebaskan manusia. Dengan demikian paradigma kritis menganggap, bahwa dalam manusia ada berbagai struktur tersembunyi yang tanpa disadari telah membentuk dan mengarahkan cara kita memandang dunia sekitar. Akibatnya manusia kurang dapat merealisasikan potensi yang dimiliki dan terjebak dalam asumsi-asumsi bahwa sadar yang telah tercipta sebelumnya. Meskipun manusia

memiliki berbagai pilihan dalam bertindak, pilihan tersebut telah terbatas oleh pandangan mereka tentang yang nampaknya mungkin dipilih. Untuk merealisasikan potensi dirinya, manusia harus menembus realitas permukaan, dan melihat jauh ke dalam sehingga mereka menyadari kapasitas yang dimiliki untuk mengubah dunia yang ada. Peneliti perlu membongkar mitos yang ada dan menyingkap tabir yang menyelubungi tampilan dipermukaan melalui teori, mengamati proses terjadinya krisis dan/atau konflik, melihat keterkaitan, melihat masa lalu dan mempertimbangkan berbagai kemungkinan dimasa depan.

C. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini data primer dan data sekunder. Data primer lebih mengacu pada informasi yang diperoleh langsung dari pengamatan objek yang diteliti misalnya informasi yang diperoleh melalui wawancara dengan informan yang telah ditentukan sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber yang telah ada atau dengan kata lain data diperoleh secara tidak langsung melainkan melalui media perantara.

D. Objek Penelitian

Penelitian ini melibatkan manusia sebagai pelaku yang mampu membentuk dunianya. Manusia adalah makhluk yang aktif yang mampu menciptakan realitas sosial atau dunianya melalui pemberian sistem makna (Espa, 2014). Adapun identitas informan dalam penelitian kali ini pada Bank Sulselbar Syariah yaitu: Muh. Fiqri Erdiansyah yang menjabat sebagai *Account Officer*.

E. Metode Pengumpulan Data

Pelaksanaan penelitian ini membutuhkan data penelitian, dimana untuk mengumpulkan data yang diperlukan digunakan dua metode yaitu metode primer dan metode sekunder. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Wawancara Mendalam

Wawancara digunakan sebagai tehnik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Wawancara mendalam dilakukan secara langsung dengan informan secara terpisah di lingkungannya masing-masing. Wawancara dilakukan dengan informan yang dianggap berkompeten dan mewakili.

2. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan penelusuran dengan menggunakan referensi dari buku, jurnal, makalah dan perundang-undangan terkait dengan objek penelitian untuk mendapatkan konsep dan data-data yang relevan dengan permasalahan yang dikaji sebagai penunjang penelitian. Misalnya mengenai sejarah dari Bank Sulselbar Syariah itu sendiri.

3. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan pengumpulan data berupa data-data sekunder yang berupa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pembiayaan mudharabah.

4. Internet searching

Internet searching merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan berbagai tambahan referensi yang bersumber dari *internet* guna melengkapi referensi

penulis serta digunakan untuk menemukan fakta atau teori berkaitan masalah yang diteliti.

F. Instrumen Penelitian

Penelitian kualitatif ini penulis sendiri menjadi instrumen atau alat penelitian, seperti halnya yang ditulis Nasution (dalam Sugiyono, 2005: 59) bahwa dalam penelitian kualitatif tidak ada pilihan lain dari pada menjadikan manusia sebagai instrumen penelitian utama. Hal tersebut dikarenakan segala sesuatunya belum mempunyai bentuknya yang pasti. Oleh karena itu penulis sebagai instrumen harus divalidasi, seberapa jauh penulis siap melakukan penelitian dengan menggunakan teknik wawancara mendalam. Penelitian yang menggunakan wawancara peneliti menggunakan pedoman wawancara yaitu berupa daftar pertanyaan terbuka, peneliti juga menggunakan berupa alat penunjang yang dapat mengukur ataupun menggambarkan fenomena yang diamati. Adapun alat-alat penelitian yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian perekam suara, kamera dan alat tulis. Selain itu juga, penelitian ini dilakukan dengan mengunduh (*download*) data yang dibutuhkan berupa *annual repor*.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah dengan menggunakan analisis secara kualitatif yaitu melalui pelaksanaan, penalaran, penganalisaan serta menarik kesimpulan yang dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

Gambar 2

Teknik Analisa Data



H. Penyajian Keabsahan Data

Pengujian keabsahan data penelitian kualitatif untuk mendapatkan nilai kebenaran terhadap penelitian disebut juga dengan uji kredibilitas (*credibility*). Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif dapat dilakukan antara lain dengan cara perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, dan *membercheck* (Afiyanti, 2008). Namun karena penelitian ini menggunakan berbagai

sumber data dan teori dalam menghasilkan data dan informasi yang akurat, maka cara yang tepat digunakan adalah dengan menggunakan metode triangulasi, adapun dalam penelitian ini menggunakan dua dari empat jenis triangulasi untuk menyelaraskan dengan penelitian ini, yaitu :

1. Triangulasi sumber data, yaitu menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Misalnya, selain melalui wawancara dengan informan, peneliti juga menggunakan peneliti bisa menggunakan sumber data pendukung lainnya seperti dokumen tertulis, arsip, dokumen sejarah, catatan resmi, catatan atau tulisan pribadi dan gambar atau foto. Tentu masing-masing cara itu akan menghasilkan bukti atau data yang berbeda, yang selanjutnya akan memberikan pandangan (*insights*) yang berbeda pula mengenai fenomena yang diteliti. Berbagai pandangan itu akan melahirkan keluasan pengetahuan untuk memperoleh kebenaran handal.
2. Triangulasi Teori, yaitu hasil akhir penelitian kualitatif berupa sebuah rumusan informasi atau *thesis statement*. Informasi tersebut selanjutnya dibandingkan dengan perspektif teori yang relevan untuk menghindari bias individual peneliti atas temuan atau kesimpulan yang dihasilkan. Selain itu, triangulasi teori dapat meningkatkan kedalaman pemahaman asalkan peneliti mampu menggali pengetahuan teoretis secara mendalam atas hasil analisis data yang telah diperoleh.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Perusahaan

1. Sejarah Singkat PT Bank Sulselbar Syariah

PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan (Perseroan) didirikan dengan nama PT Bank Pembangunan Sulawesi Selatan Tenggara sesuai dengan Akta Notaris Raden Kadiman di Jakarta No. 95 tanggal 23 Januari 1961. Kemudian berdasarkan Akta Notaris Raden Kadiman No.67 tanggal 13 Juli 1961 nama PT Bank Pembangunan Sulawesi Selatan Tenggara (“**PT BP SULSELRA**”) diubah menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan Tenggara (“**PT BPD SULSELRA**”). Berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara No. 002 tahun 1964 tanggal 12 Februari 1964, PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan Tenggara dilebur kedalam Bank Pembangunan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dengan modal dasar Rp 250 juta. Dengan pemisahan antara Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan dengan Propinsi Tingkat I Sulawesi Tenggara, maka pada akhirnya perseroan berganti nama menjadi Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan sesuai dengan Peraturan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor 2 tahun 1976 tentang Perubahan Pertama Kalinya Peraturan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pendirian Bank Pembangunan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara.

Lahirnya Peraturan Daerah No. 01 tahun 1993 dan penetapan modal dasar menjadi Rp 25 miliar, Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dengan sebutan Bank BPD Sulsel dan berstatus Perusahaan Daerah (PD). Selanjutnya dalam rangka perubahan status dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) diatur dalam Peraturan Daerah No. 13 tahun 2003 tentang Perubahan Status Bentuk Badan

Hukum Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dari PD menjadi PT dengan Modal Dasar Rp 650 miliar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI berdasarkan Surat Keputusan No. C-31541.HT.01.01 TH 2004 tanggal 29 Desember 2004 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan di singkat Bank Sulsel, dan telah diumumkan pada Berita Negara Republik Indonesia No. 13 tanggal 15 Februari 2005, tambahan No. 1655/2005. Perseroan telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kota Makassar dengan No. TDP.503/0590/DP-0480/KPP tanggal 3 Januari 2005.

Pada Tahun 2007, Perseroan telah membentuk Unit Usaha Syariah yakni Bank SulSelBar Syariah yang menjalankan kegiatan usaha perbankan dengan prinsip-prinsip Syariah. Pelaksanannya dimulai sejak 28 April 2007 dengan Surat Izin Prinsip dari Bank Indonesia No. 9/20/DPbS/Mks tanggal 20 April 2007 perihal Persetujuan Prinsip Pembukaan Kantor Cabang Syariah. Dilanjutkan dengan meresmikan pembukaan Kantor Cabang Syariah Sengkang pada tanggal 28 April 2007. Disusul dengan pembukaan Kantor Cabang Syariah Maros pada tanggal 28 Nopember 2007 dan Kantor Cabang Syariah Makassar pada tanggal 30 Desember 2008. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 24 tanggal 15 Agustus 2008 yang dibuat di hadapan Rakhmawati Laica Marzuki, S.H., Notaris di Makassar, jo Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diaktakan No.02 tanggal 1 Mei 2009 yang dibuat oleh Notaris Rakhmawati Laica Marzuki, S.H., telah dilakukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan yaitu dengan meningkatkan besarnya modal dasar menjadi sebesar Rp 1,6 Triliyun, perubahan telah disetujui oleh Mentri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusannya No: AHU-46963.AH.01.02 Tahun 2009 tanggal 30 September 2009.

Perseroan kemudian mengalami perubahan nama dari PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat berdasarkan Akta Pernyataan Tentang Keputusan Para Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Bank Sulsel No. 16 Tanggal 10 Februari 2011 yang dibuat di hadapan Rakhmawati Laica Marzuki, SH, Notaris di Makassar. Perubahan ini telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan nomor AHU-11765.AH.01.02 Tahun 2011 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan. Perubahan nama ini juga telah memperoleh persetujuan Bank Indonesia berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 13/32/KEP.GBI/2011 Tentang Perubahan Penggunaan Izin Usaha Atas Nama PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan Disingkat PT Bank Sulsel Menjadi Izin Usaha Atas Nama PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat disingkat PT Bank Sulselbar.

Tercantum dalam Akta Notaris Rakhmawati Laica Marzuki, SH di Makassar Nomor 16 Tanggal 10 Februari 2011 dan Persetujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan nomor AHU- 11765. AH.01.02 tanggal 08 Maret 2011 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, maka bidang usaha Bank Sulselbar terdiri dari :

a. Perbankan Konsumer

Produk kredit konsumer yang terdiri dari Kredit Pegawai (Kredit Umum Lainnya/KUL), Kredit Multiguna, Kredit DPRD, Kredit Peensiunan, Kredit Pemilikan Motor, Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Kredit simpanan konsumer terdiri dari tiga yaitu Giro, Tabungan dan Deposito.

b. Perbankan Komersil dan Mikro

Produk komersial terdiri dari tiga yaitu Kredit Konstruksi, Kredit Usaha Mandiri (KUM), Kredit PEMDA dan Kredit Sindikasi. Produk komersial didominasi oleh Kredit Giro dan deposito lembaga/perusahaan. Produk kredit mikro terdiri dari Kredit Pundi Usaha Rakyat (PUR), Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kredit Pusaka Mandiri (PUNDI) dan Kredit SUP 005. Produk Simpanan mikro didominasi produk Tabungan dengan segmentasi nasabah petani dan nelayan serta pengusaha kecil.

c. Unit Usaha Syariah

Bank Sulselbar Syariah memiliki produk Pembiayaan yang terdiri dari dua yaitu Pembiayaan Komersial Syariah dan Pembiayaan Konsumer Syariah. Produk Pendanaan terdiri dari tiga yaitu Giro Syariah, Tabungan Syariah dan Deposito Syariah. Selain itu ada beberapa produk pembiayaan syariah yang ditawarkan oleh persero dalam hal ini Unit Usaha Syariah bank Sulselbar sebagai berikut :

1) Pembiayaan Graha Berkah iB

Pembiayaan Graha Berkah iB merupakan fasilitas pembiayaan konsumtif dengan pola syariah yang diberikan kepada perorangan untuk membeli rumah atau keperluan renovasi/membangun rumah tinggal yang disesuaikan dengan kebutuhan pembiayaan dan kemampuan masing-masing pemohon menggunakan akad *murabahah* (Jual Beli).

2) Pembiayaan Oto Berkah iB

Pembiayaan Oto Berkah iB merupakan fasilitas pembiayaan konsumtif dengan pola syariah yang diberikan kepada perorangan untuk pembelian kendaraan bermotor jenis mobil, yang disesuaikan dengan kebutuhan pembiayaan dan kemampuan masing-masing pemohon menggunakan akad *murabahah* (Jual Beli).

3) Modal Kerja Mitra iB

Modal Kerja Mitra iB merupakan fasilitas pembiayaan dengan akad *Al Mudhārabah* (Bagi Hasil) yang diberikan kepada nasabah/Mitra Bank Sulselbar Syariah untuk memenuhi kebutuhan modal kerjanya yang disesuaikan dengan kebutuhan pembiayaan dan kemampuan nasabah/Mitra untuk mengelola pembiayaan. Melalui pembiayaan modal kerja, bank menyediakan modal kerja bagi kelancaran usaha nasabah, dan nasabah akan mengembalikan pembiayaan berdasarkan bagi hasil yaitu pendapatan dari hasil kegiatan bisnis yang dibiayai, yang penetapannya ditentukan berdasarkan kesepakatan antara bank dan nasabah.

4) Gadai Emas Berkah iB

Gadai Emas Berkah iB merupakan fasilitas pembiayaan berdasarkan prinsip Qardh yang diberikan kepada nasabah berdasarkan kesepakatan, yang disertakan dengan Surat Gadai sebagai penyerahan marhun (barang jaminan) untuk jaminan pengembalian seluruh atau sebagian hutang nasabah kepada Perseroan.

Sementara untuk jasa-jasa Unit Usaha Syariah (UUS) Bank Sulselbar yaitu:

a) Kartu ATM UUS Bank Sulselbar

Kartu ATM UUS Bank Sulselbar tergabung dalam jaringan ATM bersama yang dapat diakses pada puluhan ribu terminal ATM berlogo ATM bersama di seluruh Indonesia. Fitur-fitur layanan ATM Bank Sulselbar antara lain informasi saldo, penarikan tunai, transfer antar bank. Jumlah pemegang kartu ATM Syariah pada tahun 2016 sebanyak 14.963 *card holders*.

b) Kiriman uang (*wakalah*)

Kiriman uang yang diberikan dengan akad *wakalah* yaitu pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak (*muwakkil*) kepada pihak lain (*wakil*) dalam hal-hal yang boleh diwakilkan.

c) Jaminan bank (*kafalah*)

Jaminan yang diberikan oleh bank kepada pihak ketiga penerima jaminan atas pemenuhan kewajiban tertentu nasabah bank selaku pihak yang dijamin kepada pihak ketiga dimaksud. Jaminan bank diberikan dengan akad *kafalah* yaitu transaksi penjaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga atau yang bertanggung (*makful lahu*) untuk memenuhi kewajiban pihak kedua (*makful 'anhu/ashil*).

2. Visi Dan Misi Serta Nilai Budaya Perusahaan

Dalam upaya pembentukan budaya perusahaan, pada tahun 2010 Bank Sulselbar merumuskan visi dan misi serta nilai budaya kerja yang ditetapkan melalui surat keputusan Direksi No. SK/002/DIR/I/2011 tanggal 12 Januari 2011 tentang Perubahan Visi, Misi dan Tagline Bank Sulselbar yang juga telah disetujui Dewan Komisaris.

a. Visi PT Bank Sulselbar

Visi PT Bank Sulselbar adalah “Menjadi Bank Kebanggaan dan Pilihan Utama membangun Kawasan Indonesia Timur”. Adapun arti visi bagi Bank Sulselbar yaitu :

1) Bank Kebanggaan

Bank Sulselbar berkeinginan untuk memberikan rasa bangga kepada masyarakat dengan menyediakan produk yang kompetitif dan bernilai tinggi serta layanan yang berkualitas.

2) Pilihan Utama

Bank Sulselbar berkeinginan untuk menjadi *bank of choice* bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan akan layanan dan jasa perbankan dimanapun kami berada.

3) Membangun Kawasan Indonesia Timur

Bank Sulselbar berkeinginan untuk menjadi *market leader* yang menyediakan layanan dan jasa perbankan yang berkualitas di Kawasan Timur Indonesia serta turut serta berkontribusi aktif dalam pembangunan di Kawasan Timur Indonesia.

b. Misi PT Bank Sulselbar

- 1) Memberikan pelayanan prima yang berkualitas dan terpercaya
- 2) Mitra strategi PEMDA dalam menggerakkan sektor riil
- 3) Memberikan nilai tambah optimum bagi *stakeholder*

c. Moto

Dalam rangka mengantisipasi perkembangan dunia perbankan saat ini dan akan datang serta persaingan global, Bank Sulselbar Syariah memiliki moto “Maju Bersama Meraih Berkah” artinya Bank Sulselbar Syariah memiliki tekad untuk secara terus menerus meningkatkan kinerja dan memiliki kemampuan dalam melaksanakan tugas yang diamanatkan *stakeholders* dengan penuh rasa tanggungjawab dedikasi yang tinggi dalam upaya keberhasilan bersama-sama.

d. Nilai-Nilai Budaya PT Bank Sulselbar

Nilai-nilai Budaya merupakan pedoman yang telah disepakati dan tertanam pada seluruh karyawan Bank Sulselbar yang menjadi acuan atau panduan perilaku untuk mencapai visi dan misi Bank Sulselbar. Bank Sulselbar menguraikan nilai-nilai budaya perusahaan ke dalam 5 (lima) panduan perilaku yang disingkat dengan PRIORITAS PRIMA, yaitu :

1) Profesional

Kami selalu meningkatkan kemampuan untuk menjadi ahli dibidangnya agar dapat memahami arah dan tujuan kerja, bertanggung jawab terhadap hasil yang dicapai dan menghasilkan kinerja yang cepat, tepat dan akurat.

2) Inovasi

Kami mengembangkan ide baru untuk menghasilkan sistem, teknologi, produk dan layanan unggulan dan dapat memberikan nilai tambah kepada *stakeholder* dan siap untuk mengantisipasi perubahan.

3) Kerjasama

Kami meningkatkan sinergi antar individu, unit kerja dan institusi dengan membagi fungsi dan peran yang sesuai serta tetap memperhatikan hubungan baik antar individu dengan prinsip kesetaraan untuk mencapai sasaran perusahaan.

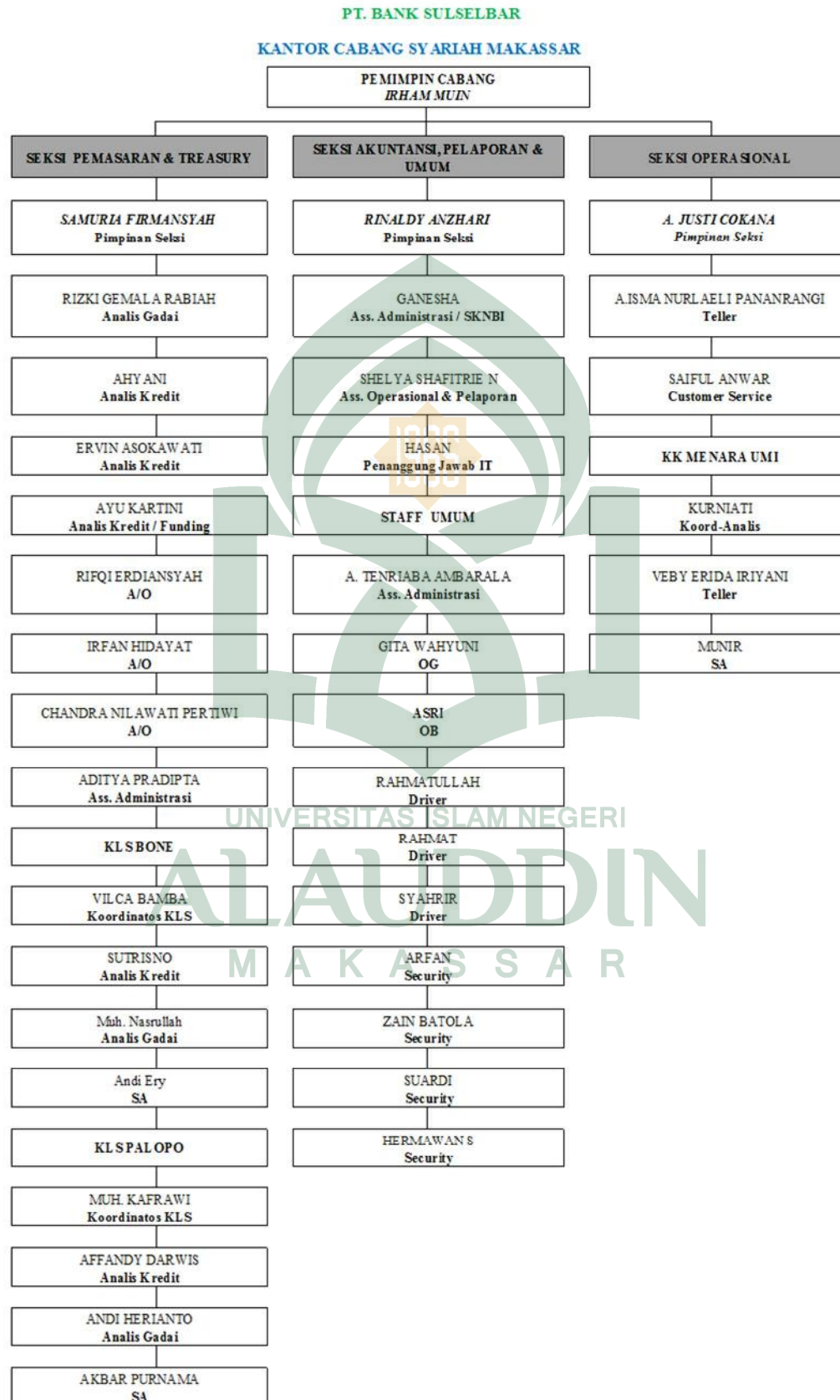
4) Integritas

Kami berpegang teguh pada etika bisnis perusahaan, jujur, menyatukan kata dengan perbuatan dan mengutamakan kepentingan perusahaan di atas kepentingan pribadi.

5) Layanan Prima

Kami memberikan layanan dengan sepenuh hati, menggunakan kemampuan maksimal, layanan yang cepat dan tepat serta memberikan nilai tambah sesuai standar layanan untuk mencapai kepuasan dan loyalitas nasabah.

3. Struktur Organisasi Bank Sulselbar Svariah



Berdasarkan pada skema di atas, berikut penjelasan mengenai tugas dan tanggung jawab bagian-bagian tersebut:

a. Pimpinan Cabang

- 1) Bertanggungjawab terhadap pencapaian seluruh target cabang yang telah ditetapkan oleh perusahaan.
- 2) Bertanggungjawab terhadap seluruh aktivitas operasional cabang, dengan melakukan supervisi terhadap setiap unit/seksi dicabang demi pencapaian target pemasaran dan operasional sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.
- 3) Bertanggungjawab terhadap penyaluran pembiayaan yang disalurkan melalui cabang dan juga melakukan monitoring dan pengawasan agar tetap *comply-with* dengan ketentuan yang telah ditentukan.
- 4) Bertanggungjawab terhadap peningkatan kualitas SDM.
- 5) Bertanggungjawab atas kondisi cabang agar tetap kondusif.
- 6) Bertanggungjawab atas monitoring pembinaan terhadap nasabah pembiayaan.

b. Pimpinan Seksi Akuntansi dan Pelaporan

- 1) Memonitoring mutasi pada neraca dan laba rugi.
- 2) Melakukan review transaksi teller dan berkoordinasi dengan teller.
- 3) Memonitoring angsuran bulanan nasabah.
- 4) Melakukan edukasi dan sosialisasi perbankan syariah.
- 5) Melakukan pemeriksaan data-data untuk pencairan pembiayaan dan penagunjawab VBS (*virtual Banking System*) secara langsung.

- 6) Melakukan koordinasi RAK ataupun giro antar bank dengan divisi UUS (Unit Usaha Syariah)
- 7) Melakukan koordinasi kasie umum, kasie pemasaran perihal putusan pembiayaan.
- 8) Menjaga stabilitas cabang yaitu menjaga keharmonisan kinerja secara internal dan secara eksternal.
- 9) Menyampaikan laporan bulanan cabang ke kantor pusat ataupun ke Bank Indonesia serta anggota komite kantor cabang.
- 10) Bertanggungjawab terhadap pencapaian target pendanaan dan target-target operasional lainnya yang telah ditetapkan oleh cabang kasie akuntansi dan pelaporan, SA Supervisor, *Head Teller*, penanggungjawab kunci brankas.

c. Bagian Umum

- 1) Memonitoring pegawai, membuat daftar gaji, membuat daftar uang makan, membuat surat-surat keluar dan menggandakan surat masuk.
- 2) Menjaga barang inventaris kantor dan membuat daftar penyusutan ATI (Aktiva Tetap dan Inventaris).
- 3) Melaksanakan transaksi jaminan dan juga melaksanakan penagihan.
- 4) Memonitoring kebutuhan ATC (Alat Tulis Cetak).
- 5) Bertanggungjawab terhadap pencapaian target pendanaan dan target-target operasional lainnya yang telah ditetapkan oleh cabang.

d. Teller

1) Melakukan transaksi tunai dan non tunai, membuat laporan kas, memonitoring posisi saldo kas untuk fungsi kontrol maka ditugaskan untuk melakukan transaksi *Back Officer*.

2) Melayani nasabah yang akan membuka rekening.

3) Bertanggungjawab terhadap pencapaian target pendanaan dan target-target operasional lainnya yang telah ditetapkan oleh cabang.

4) Penanggungjawab kunci kombinasi lemari berkas.

e. *Costumer service* (CS)

1) Bertanggungjawab atas pelayanan kepada seluruh nasabah secara prima juga menjelaskan berbagai produk simpanan/pembiayaan kepada nasabah secara efisien dan efektif namun tetap menjaga kerahasiaan bank.

2) Memonitoring pembukuan rekening simpanan secara reguler.

3) Melakukan koordinasi dengan kasie keuangan dan teller perihal aktivitas rekening simpanan.

4) Menjaga keharmonisan kerja dengan seluruh bagian.

5) Mengupdate pengetahuan mengenai produk perbankan syariah, menguasai materi KYC (*Know Your Costumer*) pada saat melakukan aktivitas pembukuan rekening simpanan.

6) Bertanggungjawab terhadap pencapaian target pendanaan dan target-target operasional lainnya yang telah ditetapkan oleh cabang.

7) Petugas transaksi jaminan pembiayaan.

- 8) Memonitoring penggunaan materai.
- f. Penanggungjawab VBS dan teller pemindahan pembukuan
- 1) Bertanggungjawab atas transaksi non tunai/*back officer*, *back officer* memonitoring dan pemeliharaan ATI (Alat Tulis dan inventasris), jaringan VBS (*Virtual Banking System*) dan pemeliharaan komputer termasuk *up date* anti virus.
 - 2) Bertanggungjawab atas pembuatan dan pengiriman laporan LBUS (Laporan Bank Umum Syariah), SID (Sistem Informasi Debitur) mingguan, pajak-pajak termasuk mengadministrasikan file pajak, petugas transaksi jaminan.
 - 3) Bertanggungjawab terhadap pencapaian target pendanaan, tugas tambahan yang diberikan oleh atasan langsung.
- g. Administrasi Pembiayaan
- 1) Bertanggungjawab atas *supporting* pembiayaan, administrasi pembiayaan/pencairan pembiayaan, dokumentasi pembiayaan (legal file dan file pembiayaan) dan asuransi pembiayaan.
 - 2) Bertanggungjawab atas pembuatan dan pengiriman laporan SID (Sistem Informasi Debitur), LBUS (Laporan Bank Umum Syariah) mingguan.
 - 3) Bertanggungjawab terhadap pencapaian target pendanaan, tugas tambahan yang diberikan oleh atasan langsung.

h. Kasie Pemasaran

- 1) Bertanggungjawab terhadap pencapaian target unit sebesar Rp 38.100 Miliar untuk DP3 dan Rp 33,25 Miliar untuk pembiayaan. Laba Rp 1 Miliar dan target operasional lainnya yang telah ditetapkan, memonitoring ansuran nasabah.
- 2) Bertanggungjawab memantau dan melaporkan pelaksanaan pembiayaan (*monitoring*).
- 3) Bertanggungjawab dalam memastikan perikatan hukum (akad, hak tanggungan dan FEO) secara sempurna dan memastikan kesempurnaan penutupan asuransi terhadap debitur, sosialisasi nasabah *funding*, sosialisasi nasabah *lending*, monitoring target agar tepat waktu, mengontrol tugas dan kerja AO.
- 4) Melakukan penagihan ke nasabah dan juga menjaga hubungan baik antara Bank Sulselbar Syariah dan nasabah maupun anggota komite.

i. *Account officer*

- 1) Bertanggungjawab atas pencapaian target pendanaan dan target-target operasional lainnya yang telah ditetapkan oleh cabang.
- 2) Menerima berkas permohonan pembiayaan, melakukan sosialisasi terhadap permohonan yang masuk, membuat usulan pembiayaan yang dinilai layak untuk diberikan fasilitas pembiayaan.
- 3) Pembinaan dan mengawasi seluruh *account* pembiayaan yang telah disalurkan.

- 4) Membantu kasie pemasaran dan pencapaian target *funding*.
- 5) Bertanggungjawab dalam proses pemberian pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan pedoman produk pembiayaan Bank Sulselbar Syariah.

j. Staf Pemasaran

- 1) Bertanggungjawab terhadap pencapaian target pendanaan dan target-target operasional lainnya yang telah ditetapkan oleh cabang.
- 2) Melakukan pencairan nasabah pembiayaan dan melakukan pelunasan cepat pada VBS (*Virtual Banking System*).
- 3) Bertanggungjawab terhadap penyimpanan file pembiayaan dan dokumentasi pembiayaan, melakukan sosialisasi terhadap permohonan yang masuk.
- 4) Membuat usulan pembiayaan yang dinilai layak untuk diberikan fasilitas pembiayaan.
- 5) Membina dan mengawasi seluruh *account* pembiayaan yang telah disalurkan.
- 6) Membantu kasie pemasaran dalam pencapaian target *funding*.

B. Pembahasan Data Hasil Penelitian

1. Prosedur Penyaluran Dana Pembiayaan *Mudhārabah* Pada Bank Sulselbar Syariah

Kegiatan operasional pada PT Bank Sulselbar Syariah terdiri dari kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana. Dalam rangka melaksanakan kegiatan penghimpunan dana PT Bank Sulselbar Syariah menerima simpanan dari masyarakat yang didasari oleh prinsip *wadiah yad dhamanah* dan *mudhārabah mutlaqah*. Sedangkan dalam rangka penyaluran dana Bank Sulselbar Syariah, memberikan jasa dalam bentuk pembiayaan. Mekanisme penyaluran dana pada Bank Sulselbar Syariah mengenakan prosedur penyaluran seperti biasa yang diterapkan pada bank syariah lainnya. Proses penghimpunan dan penyaluran dana pada lembaga keuangan syariah memberikan dan mengenakan imbalan didasarkan pada tata cara bermuamalat secara Islami, yakni mengacu pada ketentuan Al-Qur'an dan hadist atau dengan kata lain, bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasian disesuaikan dengan prinsip syariat. Salah satunya yaitu dalam bentuk pembiayaan *mudhārabah*. Pelaksanaan pembiayaan *mudhārabah* pada Bank Sulselbar Syariah berdasarkan bagi hasil pendapatan (*revenue sharing*) dari hasil kegiatan bisnis yang dibiayai, yang penetapannya ditentukan berdasarkan kesepakatan antara bank dan nasabah.

Pada tahun 2015 jumlah debitur Bank Sulselbar syariah untuk kegiatan penyaluran dana kepada nasabah lebih khususnya dalam bentuk pembiayaan *mudhārabah* (Modal Kerja Mitra iB) dengan jumlah debitur sebesar 76 mitra usaha, sedangkan ditahun 2016 sebesar 128 mitra usaha, ini menandakan ditahun 2016 minat nasabah untuk menggunakan pembiayaan *mudhārabah* mengalami kenaikan. Selain itu

pendapatan bagi hasil naik sebesar Rp 624,91 juta atau 0,69% yaitu dari Rp 90,15 miliar menjadi Rp 90,77 miliar selama tahun 2016 seiring dengan kenaikan landai pada sektor Pembiayaan *mudhārabah*. Seperti halnya perbankan syariah lainnya, Bank Sulselbar Syariah memiliki peran untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yaitu dengan cara memaksimalkan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat. Bank Sulselbar syariah telah berupaya untuk meningkatkan pembiayaan *mudhārabah* yaitu memulai langkah awal dengan melakukan kerjasama dengan BPR dan koperasi, yang lebih khususnya mengembangkan berbagai sektor UMKM yang tersebar diberbagai daerah. Selanjutnya koperasi-koperasi tersebut dapat menyalurkan kembali danannya ke pada anggotanya. Dengan demikian dana *mudhārabah* dapat ditingkatkan meskipun dengan status risiko yang tinggi. Adapun langkah yang harus ditempuh nasabah ketika melakukan pengajuan pembiayaan dengan akad *mudhārabah*, yaitu nasabah harus melewati berbagai proses atau tahapan yang di mulai dari nasabah datang mengajukan pembiayaan sampai pada proses persetujuan apakah pembiayaan itu layak atau tidak untuk diberikan suntika dana. Adapun ketentuan pelaksanaan pembiayaan mudharabah (Modal Kerja Berkah iB) dari tahap pengajuan sampai pada realisasi pembiayaan yang dibuat Bank Sulselbar Syariah yaitu :

a. Tahap Permohonan Pembiayaan

Pada tahapan ini, calon nasabah datang untuk mengajukan pembiayaan dengan membawa beberapa persyaratan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh pihak Bank Sulselbar Syariah. Calon nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan harus terlebih dahulu mengisi formulir permohonan pembiayaan yang diajukan pihak Bank Sulselbar Syariah yang bersangkutan. Formulir tersebut berisi data pribadi dan juga data-data pendukung lainnya. Data pendukung tersebut adalah data yang berhubungan dengan legalitas calon nasabah yang terdiri atas : Kartu Tanda Penduduk

(KTP), Kartu Keluarga (KK), slip gaji dan data pendukung lainnya. Disamping itu pihak Bank Sulselbar Syariah juga mewajibkan calon nasabah untuk membawa barang jaminan serta menandatangani Surat Pernyataan Keaslian Dokumen yang dibuat oleh pihak bank.

b. Tahap Analisa Pembiayaan

Tahap berikutnya, yaitu proses analisa pembiayaan. Proses analisa ini harus dilakukan karena mengingat banyaknya risiko yang harus ditanggung oleh pihak Bank Sulselbar Syariah. Oleh karena itu sangat diperlukan prinsip kehati-hatian dalam menganalisa. Jika manajemen lembaga keuangan salah menganalisa maka kemungkinan bisa menimbulkan kemacetan pembayaran angsuran oleh nasabah dan tentunya perbankan sendiri yang menanggung risikonya. Untuk itu, Bank Sulselbar Syariah dalam melakukan proses awal analisa pembiayaan adalah dengan menganalisa dokumen yang telah diserahkan oleh calon nasabah. Pada tahap ini bank Sulselbar syariah mencari informasi tentang kebenaran data yang telah diberikan, yaitu salah satunya dengan melakukan wawancara dengan nasabah.

Tahap analisa selanjutnya yaitu Bank Sulselbar Syariah juga melakukan penggolongan analisa pembiayaan yang terdiri atas dua golongan data dan informasi yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Proses analisa data kuantitatif yaitu dengan melakukan analisa hal-hal yang berhubungan dengan proposal pembiayaan nasabah yang meliputi jenis usaha, jenis kebutuhan usaha, proyek laba, skema bagi hasil, jaminan dan sebagainya. Sementara untuk analisa data kualitatif yaitu menganalisa hal-hal yang berhubungan dengan etika dan moral nasabah. Ada beberapa hal yang dilakukan dalam menganalisa calon nasabah diantaranya meliputi informasi terhadap nasabah itu sendiri dan proyek usaha yang akan dibiayai. Apakah usaha yang dijalankan calon nasabah benar-benar sesuai dengan syariah serta tidak mengandung unsur maysir

(judi), gharar (penipuan), dan riba. Selain itu analisa dengan melalui Prose wawancara, ada beberapa hal yang diperhatikan oleh analis Bank Sulselbar Syariah dalam menilai calon nasabahnya, misalnya dari karakter nasabah. Karakter inilah yang akan mendeskripsikan bahwa nasabah memiliki karakter jujur, moral dan kesediaan calon nasabah untuk bekerja sama dengan pihak Bank Sulselbar Syariah. Untuk dapat menilai karakter dari calon nasabah pihak bank mengumpulkan informasi dari beberapa sumber yaitu dengan cara melakukan kunjungan ketempat nasabah seperti mencari informasi pada sumber yang telah mengenal nasabah, keluarga dekat sesuai dengan data yang diinformasikan pada waktu pengisian formulir. Selain itu pihak Bank Sulselbar Syariah menggunakan sistem *BI Checking* untuk mengetahui hubungan nasabah dengan bank-bank lainnya. Selanjutnya analis melakukan survei langsung kelapangan dan mencari informasi sedetail mungkin terutama mengenai dana pembiayaan yang diajukan apakah benar-benar dibutuhkan atau tidak, dan sekaligus mencari informasi bagaimana kelancaran calon nasabah dalam membayar kewajibannya serta data-data mengenai keahlian calon nasabah ataupun usaha yang dijalankan maka hasil survei tersebut diserahkan pada pihak komite pembiayaan untuk menentukan layak tidaknya nasabah untuk dibiayai.

c. Tahap Penyelidikan

Untuk menghindari segala risiko yang kemungkinan terjadi, maka pihak *managemen risk* Bank Sulselbar Syariah melakukan penilaian dan penyelidikan terhadap data-data yang telah diserahkan kepada pihak Bank Sulselbar Syariah. Data-data yang menurut pihak Bank Sulselbar Syariah sangat penting adalah kebenaran terkait aset yang dimiliki nasabah, seperti kebenaran akan adanya barang yang telah dijaminkan atau diangunkan dalam proposal pembiayaan tersebut. Tahap proses penyelidikan ini pihak Bank Sulselbar Syariah menaksir nilai jaminan yang diangunkan.

Sehingga dari sini dapat diketahui apakah nilai jaminan tersebut benar-benar senilai dengan jumlah pembiayaan.

d. Tahap Persetujuan dan Pencairan.

Proses selanjutnya yaitu tahap persetujuan, proses ini melibatkan beberapa staf dalam manajemen Bank Sulselbar Syariah yang tergabung dalam sebuah komite pembiayaan. Komite inilah yang menentukan layak tidaknya pembiayaan serta menentukan besar plafon yang akan diberikan kepada calon nasabah yang mengajukan pembiayaan tersebut. Jika dalam pembahasan rapat komite ternyata menyetujui pembiayaan terhadap calon nasabah, maka langkah selanjutnya pihak staf pembiayaan akan menerbitkan Surat Penawaran Persetujuan Pembiayaan (SP3). Jika nasabah telah menyetujui dengan besaran plafon yang diberikan, maka nasabah wajib mengembalikan SP3 dalam jangka waktu 14 hari sebagai syarat persetujuan dari nasabah. Selanjutnya nasabah mulai melengkapi beberapa dokumen yang diperlukan dalam proses pengikatan atau akad kerjasama. Pada proses ini memerlukan beberapa biaya-biaya yang biasanya ditanggung oleh calon nasabah, misalnya biaya materai atau biaya administrasi yang dianggap penting. Biaya-biaya tersebut disampaikan kepada calon nasabah ketika hendak melakukan akad kerjasama sehingga nasabah pun mengetahui dan menyiapkan biaya administrasi tersebut untuk kelancaran kontrak. Tetapi sebaliknya jika pembiayaan ditolak maka pihak bank akan menerbitkan surat penolakan kepada calon nasabah serta berkas-berkasnya akan dikembalikan. Setelah proses persetujuan selesai maka pihak Unit Support Bank Sulselbar Syariah menghubungi calon nasabah dan melakukan tanda tangan akad pembiayaan dan pengikatan jaminan, kemudian pihak nasabah akan mengajukan Surat Permohonan Realisasi Pembiayaan pada pihak Unit Support Bank Sulselbar Syariah, dan unit support akan menerbitkan persetujuan realisasi pembiayaan dan tanda terima uang oleh nasabah akan diberikan, selanjutnya

proyek dijalankan. Tahap selanjutnya yaitu proses monitoring dan pembinaaan akan dilakukan oleh analis. Setelah tahap monitoring, tahap berikutnya yaitu pembayaran ansuran oleh nasabah.

2. Shariah Governance Ditinjau dari Nilai Shiddiq, Amanah, Tabligh, Mas'uliyah dan Keadilan pada Pembiayaan Mudhārabah Bank Sulselbar Syariah

Pelaksanaan tata kelola perusahaan merupakan elemen terpenting bagi Bank Sulselbar Syariah. Lebih khusus tata kelola perusahaan berperan untuk menjaga kelangsungan usaha, menciptakan keberhasilan dalam pencapaian rencana bisnis, serta meningkatkan nilai kompetitif bank sulselbar syariah dalam persaingan industri perbankan syariah nasional. Seiring dengan perubahan paradigma akuntansi konvensional dengan akuntansi syariah sehingga konsep tata kelola yang dibangun dalam ranah syariah menjadikan sistem dan prosedur yang ditetapkan juga menganut konsep syariah. Konsep tata kelola yang dibangun dalam paradigma syariah memiliki berbagai implikasi, ini disebabkan kurangnya sumber daya manusia yang berkompeten dalam sebuah usaha membuat risiko pemberian kredit untuk modal kerja pada Bank Sulselbar Syariah sendiri sangat besar. Tapi dengan keadaan yang seperti itu pihak Bank Sulselbar Syariah tetap berusaha memberikan yang terbaik untuk dapat meningkatkan kualitas tata kelola perusahaan. Selain itu pihak Bank Sulselbar Syariah meyakini bahwa dengan adanya pelaksanaan tata kelola yang baik pada akhirnya juga akan meningkatkan *stakeholders value*, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap Bank Sulselbar Syariah meningkat. Konsep tata kelola perusahaan saat ini yang melibatkan seperangkat aturan dan sistem kontrol, verifikasi, penilaian, dan lain-lain yang diterapkan entitas agar dapat mencapai pengelolaan yang efisien dan efektif, dalam rangka untuk memastikan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan (Tania, 2015).

Untuk itu konsep tata kelola bagi Bank Sulselbar Syariah harus dikaitkan dengan manajemen risiko atau sistem pengendalian. Konsep tata kelola pemerintahan yang lemah dan tidak efektif selalu menjadi penyebab kegagalan lembaga keuangan dipasar keuangan (Bahari dan Baharudin, 2016)

Masalah keagenan yang melingkupi pembiayaan *mudhārabah* pada Bank Sulselbar Syariah sangat memerlukan terlaksananya prinsip-prinsip syariah sebagai sistem yang mengatur berjalan efektifnya perusahaan, untuk itu pelaksanaan *shariah governance* sangat diperlukan untuk lebih mengawasi terlaksananya prinsip-prinsip syariah. Prinsip-prinsip tersebut juga digunakan Bank Sulselbar Syariah sebagai bentuk pengendalian perusahaan dari segala risiko yang mungkin dapat terjadi serta untuk melindungi asset bagi perusahaan, mengelola informasi secara akurat dan memastikan kepatuhan hukum dan peraturan yang berlaku. Risiko yang melekat pada Bank Sulselbar Syariah dalam akad pembiayaan *mudharabah* potensial tinggi karena bisnis yang dijalankan hanya mengandalkan kepercayaan yang sangat tinggi sebagai jaminan moral. Pada Bank Sulselbar Syariah praktik penghianatan atau *moral hazard* biasa dikenal dengan cidera janji sehingga manajemen risiko sangat berperan aktif dalam mengatasi masalah tersebut. Selain itu penerapan mekanisme pengawasan korporasi yang efektif dilakukan sebagai mekanisme pengendalian untuk mengatur dan mengelola perusahaan agar mengurangi resiko pembiayaan. Penerapan prinsip-prinsip *shariah governance* menjadi suatu keharusan bagi bank syariah yang melandaskan operasinya sesuai dengan prinsip syariah. Dengan bisnis yang hanya mengandalkan kepercayaan sehingga pemenuhan prinsip, kejujuran, Amanah, Tabliq, mas'uliyah, dan Al-Adil sangat dibutuhkan sebagai bentuk pengendalian bagi Bank Sulselbar Syariah. Adapun bentuk pelaksanaan prinsip diatas sebagai wujud pelaksanaan *shariah governance* pada pembiayaan bermasalah (pembiayaan *mudhārabah*) Bank Sulselbar Syariah yaitu:

a. Shiddiq (Kejujuran)

Pelaksanaan nilai kejujuran pada Bank Sulselbar Syariah merupakan suatu keharusan dalam menilai hubungan kontraktual pembiayaan *mudhārabah*. Dengan menerapkan konsep bisnis amanah dan saling percaya, sikap kejujuran pada bank sulselbar syariah selalu dijunjung tinggi, hal ini dilakukan agar Bank Sulselbar Syariah dapat mempertahankan bisnis dan melindungi aset yang diamanatkan. Pada pembiayaan *mudhārabah* prinsip kejujuran harus dipenuhi oleh para pihak yang mengadakan perjanjian. Makna kejujuran pada umumnya sebagai bentuk itikad baik yang diwujudkan kedua belah pihak agar masing-masing pihak dapat saling mempercayai satu sama lain. Hal ini sejalan dengan ungkapan Ghoniyah dan Hartono (2014), yang menyatakan bahwa kejujuran merupakan integritas sikap seseorang terhadap pekerjaan yang diamanatkan kepadanya. Untuk itu, jika tidak terpenuhinya nilai kejujuran ini maka akan berdampak terhadap legalitas akad itu sendiri. Adanya cedera janji dapat menyebabkan salah satu pihak dapat menghentikan akad itu sendiri, karena pihak lainnya telah melakukan kebohongan, penipuan dan pemalsuan. Sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang baik harta, ilmu pengetahuan, dan hal-hal yang bersifat rahasia wajib dipelihara atau disampaikan kepada orang yang berhak menerimanya dan harus disampaikan apa adanya tidak dikurangi atau ditambah-tambahi.

Menegakan prinsip kejujuran merupakan salah satu bentuk kemaslahatan dalam hubungan antara manusia secara individu. Hasil dari analisa yang terjadi pada Bank Sulselbar Syariah ditemukan bahwa asas kejujuran yang dibangun dalam kontrak *mudhārabah* memiliki implikasi, salah satunya akibat adanya konflik kepentingan sehingga kejujuran yang ingin dibangun selalu diawali dengan sifat saling tidak percaya. Ini disebabkan akibat bank sendiri mengalami kesulitan mendapatkan mitra

bisnis yang memiliki karakter jujur. Hal ini seperti diungkapkan Rifqi Erdiansyah

(*Account Officer*) dalam wawancara singkat pada Bank Sulselbar Syariah yaitu:

“ Untuk menjalankan bisnis dengan modal kepercayaan pada saat sekarang ini akan sangat sulit, hal ini dikarenakan nasabah yang ditemui tidak semuanya memiliki itikad baik. Banyak nasabah dengan status usaha lancar tetapi dengan itikad buruk ujung-ujungnya juga dapat mengakibatkan ansuran macet, selain itu nasabah dengan status usaha buruk tetapi karena itikad baik maka nasabah dapat melakukan segala macam cara untuk memenuhi kewajibannya membayar ansuran pada bank. Hal seperti inilah yang tidak dapat kami prediksi tanpa melakukan analisa dan proses seleksi yang ketat pada awal pengajuan pembiayaan. Untuk itu yang paling utama dalam bisnis kepercayaan adalah dilihat dari karakter nasabah”.

Wawancara diatas menunjukan bahwa pelaksanaan nilai kejujuran pada pembiayaan *mudhārabah* Bank Sulselbar Syariah sangat ditekankan terutama pada sisi *mudharib*. *Mudharib* dengan karakter jujur merupakan dasar utama bagi pihak Bank Sulselbar Syariah sebagai dasar kepercayaan. Adapun nilai kejujuran yang tercermin dalam proses penyaluran dana pembiayaan *mudhārabah* pada bank sulselbar syariah yaitu tercermin pada proses pengisian formulir permohonan pembiayaan dan pengumpulan berkas. Pada tahap ini konsep kejujuran lahir dari data yang diserahkan nasabah kepada pihak bank. Nilai kejujuran mengalir dari pengisian formulir permohonan pembiayaan *mudhārabah* secara jujur yang dilakukan oleh nasabah dengan mengajukan data diri yang sebenar-benarnya seperti, pengisian data pribadi, data pekerjaan dan data penghasilan. Pada tahap ini kejujuran sangat ditekankan, agar pembiayaan yang diajukan dapat direspon baik oleh pihak Bank Sulselbar Syariah. Hal ini ditekankan Rifqi (*Account Officer*) dalam proses wawancara yang menyatakan:

“Ketika nasabah pada proses awal permohonan pembiayaan diketahui melakukan tindakan kecurangan dengan memberikan identitas palsu, maka kami pihak bank tidak akan melanjutkan proses pengajuan pada tahap selanjutnya, karena ketika kejujuran tidak dapat ditegakkan pada awal pembiayaan, bagaimana proses selanjutnya kemungkinan lebih parah dan kami pihak bank tidak mau mengambil resiko lebih lanjut”.

Berdasarkan pernyataan tersebut, maka diperoleh kesimpulan bahwa nilai kejujuran merupakan fondasi utama dalam memulai bisnis kepercayaan pada Bank Sulselbar Syariah. Lebih luas, makna kejujuran yang tergambar dari pernyataan responden mengandung nilai kepatuhan yang perlu diwujudkan *mudharib* sebagai dasar yang menentukan bahwa calon mitra Bank Sulselbar Syariah dapat dipercaya untuk menjalankan kewajibannya dalam mengelola sumber daya yang dibiayai. Untuk itu, implikasi dari ketidakjujuran adalah ketidakpercayaan, oleh karena itu pihak Bank Sulselbar Syariah telah menekankan risiko yang akan ditanggung nasabah yaitu permohonan pembiayaan tidak akan diproses, dan berkas akan dikembalikan kepada calon nasabah. Hal ini dilakukan pihak bank agar dapat menghindari risiko kemungkinan adanya kerugian bisnis ketika transaksi atau kerjasama telah berjalan. Selain itu Islam dengan tegas melarang adanya kebohongan dan penipuan dalam bentuk apapun. Karena Islam adalah nama lain dari kebenaran. Nilai kebenaran ini memberikan pengaruh pada pihak-pihak yang melakukan perjanjian untuk tidak berdusta, menipu dan melakukan pemalsuan (Ismanto, 2012). Seperti Allah selalu berbicara benar dan memerintahkan semua muslim untuk selalu jujur dalam segala urusan dan perkataan sebagaimana terdapat dalam surah Al-Ahzab ayat 70.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan Katakanlah perkataan yang benar” (QS. Al-Ahzab : 70).

Ayat di atas mengungkapkan bahwa dengan mengutarakan perkataan yang benar merupakan bentuk ketakwaan seseorang kepada Tuhannya. Selain itu makna kejujuran yang juga tercermin pada pembiayaan *mudhārabah* Bank Sulselbar Syariah dapat dilihat dari jaminan yang diajukan nasabah sebagai angunan pembiayaan *mudhārabah*. Kebenaran adanya jaminan yang di angunkan dalam pembiayaan *mudhārabah*

merupakan salah satu bentuk kejujuran yang diterapkan pihak nasabah yang memiliki makna jaminan moral sebagai landasan dalam memberikan kepercayaan pada pihak bank. Jaminan tidak serta merta diartikan sebagai sesuatu yang bernilai negatif sehingga dampaknya dapat memberatkan nasabah, tetapi juga memiliki sisi positif karena segala hal yang ada dalam kehidupan ini memiliki dua sisi yaitu sisi baik dan sisi buruk atau hitam dan putih. Jaminan yang diajukan dalam pembiayaan *mudhārabah* merupakan simbol bahwa nasabah akan bertindak jujur serta tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan pihak bank dikemudian hari.

Tahap selanjutnya yang dapat mencerminkan nilai kejujuran yaitu tahap realisasi dana pembiayaan *mudhārabah*, dimana penggunaan dana *mudhārabah* yang dilakukan secara jujur sesuai dengan akad yang telah disepakati bersama merupakan pengaplikasian nilai kejujuran yang dimiliki nasabah. Atas dasar inilah peneliti mengungkapkan bahwa kejujuran selalu diawali dengan saling tidak percaya, karena pada dasarnya selama pihak bank ingin menanamkan nilai kejujuran maka disitulah rasa ketidakpercayaan hadir, hal ini dibuktikan dari proses seleksi nasabah yang ketat serta jaminan yang diikut sertakan, sehingga nilai ketidakpercayaan belum dapat terealisasi menjadi nilai kejujuran sebelum pihak bank sendiri dihadapkan pada kebenaran yang ditunjukkan dengan hasil usaha yang dikelola *mudharib*. Nilai kejujuran tetaplah kejujuran yang tak dapat disejajarkan dengan nilai materi seberapa pun juga karena memang ia tak mengenal untung-rugi (Wulandari, 2012). Pada konsep tata kelola syariah (*Shariah Governance*) yang diterapkan dalam pembiayaan *mudharabah* tidak hanya ditekankan pada satu pihak tetapi harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang melaksanakan perjanjian, karena konsep tata kelola dapat mencakup semua lini yang terlibat dalam perusahaan. Untuk itu, penekanan nilai kejujuran ini, bukan hanya

melihat dari sisi *mudharib* tetapi *shahibul maal* sebagai *principal* (penyedia dana) juga perlu memegang teguh prinsip kejujuran.

Adapun nilai kejujuran yang menjadi cerminan Bank Sulselbar Syariah yaitu adanya jaminan mengenai kualitas barang atau jasa yang diberikan kepada nasabah, serta dengan menyampaikan secara jujur tanpa menutup-nutupi adanya kecatatan produk yang dimiliki dan menguraikan secara rinci tata cara penggunaan produk merupakan bentuk kejujuran yang dipenuhi agar nasabah dapat percaya dan menjalin kerjasama yang sehat antara kedua belah pihak. Hal inipun untuk membantu nasabah dalam memahami dan mengerti tata cara penggunaan sumber daya yang dibiayai dengan akad *mudhārabah*, selain itu risiko dan keuntungan yang telah dijelaskan secara rinci dan baik kepada nasabah, hal ini bertujuan agar nasabah tidak merasa bingung dan kecewa dikemudian hari. Konteks kejujuran seperti ini, telah diriwalkan Rasulullah SAW dalam riwayatnya bahwa Rasulullah SAW pernah melewati kawasan salah satu pasar di kota Madinah. Nabi melihat kejanggalan pada onggokan makanan yang dijual oleh salah seorang pedagang, lalu Nabi memasukkan tangannya ke dalam onggokan makanan tersebut. Ternyata pada bagian dalam dari onggokan makanan itu ternyata kurang baik, basah, selanjutnya Nabi bersabda yang artinya: “*Bukan dari golongan kami siapa yang menipu*”. Selain itu, Nabi juga memberi apresiasi yang sangat besar kepada orang yang jujur, dengan sugesti bahwa yang bersangkutan akan dimasukkan ke dalam syurga bersama para Nabi dan orang-orang yang mati syahid. Penekanan nilai kejujuran esensinya memiliki makna kemaslahatan didunia dan akhirat. Relasinya dalam bisnis Islam adalah adanya sifat kesukarelaan dan keramahtamahan. Dalam menganalisis fenomena bisnis yang hanya mengandalkan kepada kesukarelaan dan kejujuran maka esensinya, kerelaan yang terjadi seharusnya tidak menimbulkan eksploitasi antara

masing-masing pihak yang terlibat. Untuk itu akad yang diwujudkan tidak menimbulkan kebatilan sehingga salah satu pihak tidak merasa dirugikan.

b. Amanah (Dapat dipercaya)

Pelaksanaan prinsip amanah dan saling percaya bagi Bank Sulselbar Syariah merupakan hal yang paling utama diterapkan dalam hubungan kontrak antara *shahibul maal* dan *mudharib*, sebab kepercayaan merupakan elemen kunci untuk menjaga dan memelihara hubungan dalam suatu perjanjian bisnis. Konsep bisnis kepercayaan yang dijalankan Bank Sulselbar Syariah dapat dipahami bahwa kesedian bank untuk menggantungkan dirinya kepada orang lain dengan berbagai jumlah risiko yang dihadapinya. Dengan adanya kepercayaan status bisnis dalam jangka panjang dapat berjalan baik, sehingga pihak yang diamatkan dapat leluasa mencari keuntungan dengan cara yang baik pula. Selain itu kepercayaan dibutuhkan untuk dapat menumbuhkan loyalitas *mudharib*. Dalam meningkatkan kepercayaan *stakeholders*, Bank Sulselbar Syariah selalu menjaga dan memperbaiki perilaku dan kredibilitas bank dengan baik.

Pada penelitian kali ini pelaksanaan nilai amanah yang diwujudkan dalam kontrak *mudhārabah* yaitu dapat dilihat dari tahap persetujuan pembiayaan. Pada tahap ini peneliti menemukan nilai amanah yang diterapkan kedua pihak yaitu adanya persetujuan atau kesepakatan yang dibuktikan dengan diterbitkannya Surat Penawaran Persetujuan Pembiayaan (SP3) oleh pihak Bank Sulselbar Syariah kepada nasabah. Surat ini akan diproses pihak Bank ketika nasabah telah setuju dan menandatangani SP3, yang jangka waktu konfirmasi dihitung selama 14 hari setelah diterbitkannya. Surat tersebut sebagai simbol bahwa pihak Bank Sulselbar Syariah siap dan bersedia menjadikan nasabah sebagai mitra bisnis dan nasabah telah ditetapkan memenuhi kriteria calon pembiayaan *mudhārabah*. Secara langsung pihak Bank sendiri telah menanamkan kepercayaan kepada nasabah untuk diberikan amanah untuk mengelola

sumber daya entitas. Sebaliknya ketika respon nasabah mengembalikan SP3 yang dibuktikan adanya tanda tangan nasabah sebagai sah tanda terima persetujuan merupakan bentuk, bahwa nasabah telah menyetujui syarat dan ketentuan pihak bank untuk melanjutkan akad. Proses tersebut menandakan nilai kepercayaan dibuktikan dengan adanya keyakinan pada seseorang bahwa orang tersebut dapat menjalankan tugasnya. Dengan keyakinan tersebut maka akad dapat berlangsung antara *shahibul maal* dan *mudharib*. Hal ini sejalan dengan Asiyah (2014) yang mengungkapkan bahwa tanpa kepercayaan tidak akan ada kesepakatan atau kerja sama. Secara langsung pihak nasabah juga memerlukan persepsi yang baik dari pihak Bank Sulselbar Syariah sebagai jaminan bahwa Bank telah sepenuhnya memberikan hak kepada nasabah untuk menjalankan sumber daya yang dibiayai. Dengan kepercayaan yang saling diberikan antara kedua pihak, maka akan membawa pada kelanjutan kerjasama berikutnya.

c. **Tabligh (Transparan)**

Pelaksanaan nilai transparan merupakan suatu nilai yang harus dijalankan Bank Sulselbar Syariah untuk dapat mengarahkan pengelolaan bisnis dan perusahaan menjadi efektif. Konteks transparansi pada kontrak *mudhārabah* pada Bank Sulselbar Syariah memberikan makna keterbukaan memberikan informasi secara benar, jujur dan tidak diskriminasi yang dapat berakibat pada kerugian salah satu pihak yang terlibat. Berjalannya Prinsip transparansi dapat menciptakan kepercayaan antara bank sulselbar syariah dengan nasabah. Dalam praktiknya nilai transparansi pada kontrak *mudhārabah* seharusnya menjadi prinsip dasar yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap pihak dalam hal ini *shahibul maal* yang menjalankan perjanjian bisnis untuk dapat memperoleh informasi terkait dengan hasil-hasil usaha yang dicapai *mudharib*. Adanya transparansi dalam pembiayaan *mudhārabah* akan sangat membantu kelancaran usaha yang dilakukan *mudharib*.

Berdasarkan penggalian makna transparansi yang dilakukan peneliti pada pembiayaan *mudhārabah* Bank Sulselbar Syariah maka pelaksanaannya lebih dituntut pada keberadaan *mudharib* sebagai *agent* yang dalam hal ini nasabah yang memiliki pusat informasi usaha. Penerapan prinsip transparansi (Keterbukaan dan kejujuran) pada Bank Sulselbar syariah yaitu seperti yang dikemukakan responden Rifqi (*Account Officer*) yang menyatakan;

“ Bentuk keterbukaan nasabah biasanya diwujudkan dengan menyerahkan laporan keuangan in-house setiap semester atau menyampaikan laporan tersebut selambat-lambatnya 60 hari sejak tanggal periode laporan dan laporan tahunan yang telah diaudit diserahkan selambat-lambatnya 180 hari dari tanggal laporan, sementara bagi nasabah yang tidak dapat membuat laporan keuangannya sendiri ini biasanya terjadi pada nasabah yang memiliki usaha dengan skala kecil, maka kami pihak bank melakukan komunikasi langsung pada nasabah dengan menanyakan pertanyaan sederhana, contohnya ni....!! berapa persediaan yang masih ada ibu...?, berapa hppnya...?, berapa yang terjual tiap harinnya...?? dengan begitu kami bisa mengetahui omsetnya. Dengan pertanyaan mendasar seperti itu lah... maka kami pihak bank yang akan membantu mempermudah penyusunan laporan keuangan”.

Hasil wawancara diatas maka nilai tabligh (transparan) dapat dilihat dari kesediaan nasabah dalam memberikan informasi secara tertulis dan lisan. Kesediaan inilah yang dimaksud dengan adanya keinginan untuk berbagi informasi dengan orang lain. Transparansi dalam bentuk tulisan yaitu pengungkapan dalam bentuk laporan keuangan yang dibuat nasabah, sementara secara lisan dapat dilakukan dengan komunikasi langsung dengan nasabah. Menurut Amalia dan Herianingrum (2015) menyatakan bahwa nilai tabligh merupakan mengkomunikasikan dan menyampaikan segala sesuatu informasi dengan baik kepada siapapun. Informasi yang didapat melalui komunikasi langsung merupakan aspek yang penting untuk memberikan kejelasan terkait usaha yang dilakukan *mudharib*. Dengan komunikasi langsung pihak bank Sulselbar syariah dapat mengetahui informasi yang lebih banyak dibandingkan yang tertuang dalam laporan keuangan. Secara langsung bentuk transparansi dengan

komunikasi langsung merupakan pelengkap informasi yang diberikan nasabah dalam bentuk laporan keuangan. Hal ini jika dianalisis, transparansi yang terwujud dalam pelaksanaan pembiayaan *mudhārabah* pada Bank Sulselbar Syariah telah berjalan dengan cukup baik. Adanya pendekatan dengan cara komunikasi menandakan pihak bank memiliki sosialisasi yang baik dengan nasabahnya, sehingga informasi yang diperoleh dapat diakses dengan mudah.

Transparansi sangat menuntut nilai-nilai kejujuran atas setiap informasi dalam sebuah perusahaan (Mansur, 2013). Jika ditinjau dalam perspektif Islam transparansi tidak cukup dengan hanya memiliki karakter jujur tapi perlu disinyali dengan karakter amanah dan bertanggungjawab. Dengan karakter tersebut transparansi dapat menghindari terjadi kesalahpahaman antara perbankan syariah dan nasabah. Hal ini jika dilihat dari penerapan transparansi yang menjunjung tinggi nilai, kejujuran amanah dan tanggung jawab yaitu kejujuran lahir pencatatan informasi secara benar dan akurat, dari segi amanah nasabah mengelola sumber daya secara tepat sasaran serta tanggungjawab yaitu bagaimana nasabah merealisasikan hasilnya dengan sebaik-baiknya sebagai bentuk hubungan yang baik dengan tuhan, manusia dan alam. Hal ini mendakan bahwa dari nilai transparansi dapat mewujudkan akuntabilitas laporan.

d. Mas'uliyah (Akuntabilitas)

Konsep *shariah governance* tidak hanya diartikan sebagai sistem yang dapat menjamin bahwa bank syariah telah menerapkan nilai-nilai syariah dalam semua aktivitas yang dijalankannya, tetapi juga dalam memandang hubungan dengan pihak bank juga perlu menanamkan nilai-nilai syariah. Dalam menjalankan bisnis kepercayaan yang didasari dari *agency theory* memberikan tantangan besar bagi perbankan syariah lebih khususnya pada Bank Sulselbar Syariah. Untuk itu, relisasi yang diharapkan dapat memenuhi pelaksanaan nilai-nilai syariah. Adanya hubungan

yang dilandasi teoretis keagenan menjadikan banyak pihak memerlukan pelaksanaan nilai akuntabilitas. Dalam Islam nilai akuntabilitas dikenal dengan nilai mas'uliyah. Untuk itu realisasi akuntabilitas dalam Islam semata-mata untuk mencapai kemaslahatan baik didunia dan akhirat. Dunia bisnis modern sekarang ini diharapkan dapat mengedepankan keseimbangan. Keseimbangan disini dibuktikan dengan adanya nilai material yang dipasangkan dengan nilai spiritual.

Hasil analisis yang terjadi pada Bank Sulselbar Syariah, nilai akuntabilitas yang direalisasikan hanya sebagai kewajiban yang pengungkapannya hanya berfokus pada pihak pemberi amanah. Hal ini dilihat dari akuntabilitas yang dijalankan dalam bentuk fisik yaitu dalam bentuk laporan keuangan sebagai ukuran kinerja *mudharib*. Seperti yang diungkapkan responden (Rifqi) dalam wawancara yang menyatakan:

“Bentuk laporan pertanggungjawaban nasabah semuanya ditulis dan diwujudkan dengan laporan keuangan. Dari laporan keuangan tersebut kami analisis apakah terjadi peningkatan kinerja nasabah atau tidak, jika tidak maka akan tergambar pada laporan laba rugi yang mereka buat. Selain itu ada namanya pos neraca sehingga akan tergambar yang masuk dan yang keluar sekian. Selain itu untuk memastikan apakah nasabah telah menjalankan usahanya sesuai yang tertera dalam laporan keuangannya, maka kami utamakan proses monitoring langsung pada usaha nasabah”.

Hasil wawancara diatas dapat dinilai bahwa konsep akuntabilitas pada umumnya diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan. Pada pembiayaan *mudhārabah* dengan ciri kontrak dengan risiko tinggi, maka konsep akuntabilitas dalam kerangka hubungan keagenan antara pemilik (*Principal*) dan pengelola (*agent*) seringkali mengalami ketidakharmonisan dimana *agent* cenderung mengutamakan kepentingan pribadi. Tinjauan Islam mengungkapkan bahwa akuntabilitas yang diwujudkan dalam hubungan kontrak pembiayaan *mudhārabah* yang terjadi pada Bank Sulselbar Syariah ternyata masih terdapat superioritas, dimana akuntabilitas yang hanya berpusat pada manusia semata. Ini dibuktikan dari laporan fisik yang Bank Sulselbar Syariah. Sementara Islam

memiliki berbagai akuntabilitas yang didasari dari dua hubungan yaitu akuntabilitas yang berpusat pada Allah SWT sebagai hubungan vertikal dan horizontal yang diwujudkan kepada sesama manusia.

Dalam memahami nilai akuntabilitas secara spiritual dari kedua belah pihak yaitu *shahibul maal* dan *mudharib* maka peneliti menganalisis laporan keuangan yang disusun pihak Bank Sulselbar Syariah. Peneliti menemukan bahwa dalam laporan sumber dan penggunaan dana zakat serta laporan sumber dan dana kebajikan, ditemukan dengan kondisi nilai yang nihil untuk periode 2014-2016. Hal ini menunjukkan selama 3 tahun berturut-turut pihak Bank Sulselbar Syariah tidak mendonasikan kekayaannya sebagai bentuk kewajiban yang dilaksanakan sebagaimana yang dilakukan seorang muslim lainnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa akuntabilitas yang dijalankan pada Bank Sulselbar Syariah belum mencapai keseimbangan antara material dengan spiritual. Kondisi inipun diungkapkan pihak Bank Sulselbar Syariah bahwa nasabah lebih memilih untuk mendonasikan sendiri dana Zakat, infaq dan shadaqah (ZIS). Hal ini terjadi akibat kurangnya pembinaan nasabah mengenai aspek-aspek spiritual yang harus dijalankan pihak Bank Sulselbar Syariah dengan nasabah baik menanamkan bahwa pertanggungjawaban bukan hanya diwujudkan sesama manusia tetapi pada Allah SWT.

e. Al-Adil (Keadilan)

Nilai keadilan merupakan nilai yang sangat penting dalam etika kehidupan sosial dan bisnis Bank Sulselbar Syariah. Konsep keadilan berarti menempatkan sesuatu pada tempatnya atau posisinya. Pelaksanaan bisnis yang dijalankan Bank Sulselbar Syariah menjadikan prinsip-prinsip syariah sebagai basis dalam menentukan bisnis yang sesuai dengan sunnatullah. Hadirnya pembiayaan *mudhārabah* dengan sistem bagi hasil menunjukkan respon bahwa Bank Sulselbar Syariah juga menginginkan adanya

kesetaraan dalam melaksanakan bisnis. Kesetaraan dapat diartikan bahwa setiap orang yang menjalin perjanjian bisnis tidak boleh ada pihak yang dirugikan hak dan kepentingannya. Relasi eksternal dan internal Bank Sulselbar Syariah perlu diperlakukan sesuai dengan haknya masing-masing. Menurut Adam Smith (dalam Mardatilah, 2013) menganggap bahwa prinsip keadilan sebagai prinsip yang paling pokok. Pokok dari semua permasalahan *agency* perlu dilandasi nilai keadilan didalamnya.

Nilai keadilan yang terjadi dalam lingkup pembiayaan *mudharabah* pada Bank Sulselbar Syariah yaitu mekanisme sistem bagi hasil yang didasari atas tawar-menawar antara pihak Bank Sulselbar Syariah. Dengan adanya tawar-menawar yang berlaku antara pihak *shahibul maal* dan *mudharib* serta periode pembayaran yang ditentukan sesuai dengan kemampuan *mudharib* merupakan esensi dari keadilan yang sebenarnya. Selain itu nilai keadilan dapat dilihat dari dua tingkat yaitu terletak pada pembagian keuntungan dan risiko dari masing-masing pihak yang sedang melakukan kerjasama sesuai dengan penentuan proporsi keterlibatannya. Kedua belah pihak secara langsung akan menikmati keuntungan secara proporsional, jika kerjasama tersebut membuahkan hasil/keuntungan. Sebaliknya masing-masing pihak menerima kerugian proporsional, jika usaha yang digalang *mudharib* tidak mendapatkan hasil, maka dari sisi *shahibul maal* risiko yang ditanggungnya berupa kehilangan uang yang diinvestasikan. Sementara *mudharib* sendiri adanya kehilangan tenaga, pikiran pada saat mengelola sumber daya yang dibiayai. Nilai keadilan tidak dapat dikatakan seimbang jika keadilan hanya dilakukan salah satu pihak saja. tetapi pihak lainnya dalam hal ini nasabah perlu ditekankan. Adanya keseimbangan informasi usaha yang mencakup *stakeholder* dalam hal ini pihak Bank Sulselbar Syariah harus diungkapkan dengan sebenar-benarnya tanpa adanya kebohongan dan rekayasa, maka secara langsung akan

menciptakan nilai keadilan. Sehingga kesetaraan yang membingkai keadilan dapat terwujud. Hal ini juga diungkapkan dalam firman Allah SWT dalam QS. Ar-Rahman : 9

وَأَقِيمُوا آلُوزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ

Terjemahnya:

“Dan Tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu”.

Kata adil pada ayat diatas memiliki makna keseimbangan dan kesetaraan. Dalam bisnis yang dijalankan juga harus menciptakan kehidupan yang seimbang, yang mencakup antara lain keseimbangan fisik dengan mental, material dengan spiritual, individu dengan sosial, masa kini dengan masa depan, serta dunia dengan akhirat. Keseimbangan fisik dengan mental, atau material dengan spiritual akan menciptakan kesejahteraan holistik bagi manusia. Melalui pendekatan kontrak maka sebuah teori keadilan mampu menjamin pelaksanaan hak dan sekaligus mendistribusikan kewajiban secara adil bagi semua orang dalam melakukan perjanjian. Keadilan akan terwujud ketika nasabah membayar kewajibannya dengan tepat waktu dan tidak menunda-nunda pembayaran. Keadilan yang dimaksud disini memiliki esensi agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Keadilan merupakan salah satu ajaran tuhan yang menekankan agar manusia memiliki sifat ideal. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-qur'an yang menempatkan keadilan lebih dekat kepada bentuk ketakwaan atau patuh kepada Allah.

3. Tinjauan Syariah Governance dalam Permasalahan Principal-Agent Pembiayaan Mudhārabah pada Bank Sulselbar Syariah

Konflik kepentingan antara *principal* dan *agent* pada praktik pembiayaan *mudhārabah* berawal dari *principal* mendelegasikan wewenang kepada *agent* untuk mengelola sumber daya milik perusahaan (*Principal*), dengan kata lain *principal* memberikan amanah kepada *agent* untuk mengemban tugas tertentu sesuai dengan kontrak yang telah disepakati. Kontrak *mudhārabah* (bagi hasil), jika dikaitkan dengan

agency theory memiliki hubungan. Dalam bingkai *agency theory* kontrak *mudhārabah* dipandang sebagai kontrak *agency*, hal ini dikarenakan adanya penyimpangan-penyimpangan yang terjadi akibat *mudharib* lebih mementingkan kepentingan pribadinya dan mengabaikan kepentingan *stakeholders* (*shahibul maal*). Adanya konflik tersebut, maka *agency theory* dilahirkan sebagai suatu jembatan bagi para pelaku bisnis dalam menganalisa tindakan dari pihak-pihak yang terlibat dari hubungan keagenan tersebut. Dalam tataran konsep syariah, hal demikian dianggap tidak sejalan dengan bisnis yang menjalankan aktivitas pengoperasiannya membawa nama agama. Konsep *shariah governance* yang melandasi praktik perbankan syariah seharusnya menilai hubungan kontraktual tersebut sebagai hubungan yang terjalin atas niat saling tolong-menolong, suka sama suka serta melakukan kerjasama yang sehat dan membagi untung dan rugi yang setara diantara kedua belah pihak. Dengan konsep yang dibangun tersebut, maka bisnis yang terjalin akan lebih memberikan manfaat yang seimbang antara duniawi dan akhirat.

Kontrak *mudhārabah* yang dipraktikan Bank Sulselbar Syariah secara keseluruhan memiliki kesamaan dengan kontrak *mudhārabah* yang dijalankan bank syariah pada umumnya. Adanya penetapan modal secara keseluruhan dari pihak *shahibul maal* dan *mudharib* hanya melibatkan keahliannya saja, sehingga keuntungan informasi yang diperoleh *mudharib* lebih luas dibandingkan *shahibul maal*. Pada Bank Sulselbar Syariah konflik kepentingan lebih dikenal dengan “Cidera Janji” atau nasabah telah melanggar janji yang telah disepakati bersama. Hal ini lah yang menimbulkan kekhawatiran pihak bank dalam menyalurkan dannya dengan sistem bagi hasil. Konflik kepentingan seperti ini seharusnya tidak terjadi dalam bisnis atas dasar kepercayaan dan amanah. Hal ini dikarenakan konsep syariah yang membangun *shariah governance* dalam bisnis Bank Sulselbar Syariah telah terjadi pergeseran paradigm yaitu dari

konsep bisnis yang seras terhadap nilai menjadi bebas nilai, dari konsep bisnis yang mengutamakan nilai-nilai kepatuhan seperti kejujuran dan amanah menjadi bisnis yang bersifat kapitalis yang menutamakan sifat egois dan materialistik serta dari bisnis yang mengutamakan adanya kerelaan (Ikhlas) antara pihak *shaibul maal* sebagai *principal* dan pihak *mudharib* sebagai *agent* yang nyatanya menjadi saling mengesplotatif yang dapat menghilangkan kerelaan. Dari yang terjadi pada akad *mudhārabah* yang dijalankan Bank Sulselbar syariah maka terlihat suatu konflik yang terbentuk nyata akan merubah pola pikir seseorang menjadi suatu konsep yang dapat melegitimasi nilai-nilai syariah yang dibangun dalam konsep *shariah governance*. Hal ini pun seperti yang diungkapkan responden, Rifqi (*Account Officer*) terkait dengan konflik kepentingan yang terjadi yaitu:

“... Ya.. Jika memang pada saat pelaksanaan akad, kami menemukan adanya peristiwa “Cidera Janji” yang dalam hal ini nasabah telah terbukti atau riil melakukan kesalahan atau ingkar janji, dimana ditemukan adanya ketidaksesuaian antara apa yang pihak nasabah ajukan pada awal akad dengan yang dibuatnya dihari kemudian, maka kami pihak bank secara sepihak menetapkan pembatalan/menghentikan akad, maka nasabah harus melunasi semua utang-utang yang masih tersisa pada saat itu juga. Jika nasabah tidak mampu membayarnya maka kami pihak bank akan mencairkan jaminan sebagai solusi akhir”.

Hasil wawancara dengan responden diatas merupakan implikasi yang nyata mengenai konflik kepentingan yang nampak terjadi antara *principal* dan *agent*. Kondisi diatas menunjukkan hilangnya kerelaan yang terjadi antara kedua pihak yang menjalin hubungan serta adanya sikap egoistik yang terbentuk dari cara penyelesaian utang yang masih tersisa tanpa memberikan tempo/jangka waktu bagi pihak *mudharib* untuk dapat menyelesaikan utangnya. Hal ini memiliki dua makna yaitu *pertama*, Bank Sulselbar Syariah statusnya tidak ingin dirugikan lebih banyak dari kontrak yang dijalankan dan *Kedua*, Bank Sulselbar Syariah memiliki tanggungjawab menjaga asset yang telah diamanahkan pihak ketiga, sebab dana yang disalurkan pada pembiayaan *mudhārabah*

sebagian besar berasal dari simpanan pihak ketiga. Konsep bisnis yang dijalankan dalam tataran *shariah governance* memiliki makna berbeda ketika memandang hubungan yang terlanjur cacat antara kedua belah pihak, penyelesaian masalah *agency* seharusnya tidak menjadikan pihak *principal* juga bertindak eksploitatif dalam mengatasi masalah yang terbentuk dari hasil kontraktual.

Dalam konsep *shariah governance* nilai yang terbentuk tidak hanya terbatas pada nilai yang diterapkan pada *corporate governance* yang dijalankan lembaga konvensional yaitu mengacu pada 5 (Lima) prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi dan kewajaran tetapi *shariah governance* memiliki nilai syariah yang lebih luas lagi. Adanya konsep persaudaraan yang terjalin atas dasar musyawarah yang dijalankan dalam bisnis Bank Sulselbar Syariah, maka sejatinya penyelesaian yang diharapkan yaitu dengan mengedepankan nilai-nilai tauhid yang berdasarkan pada keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT, sehingga hubungan *agency* yang terbentuk lebih kepada sifat feminisme. Rasionalitas yang disebutkan *agency theory* tidak akan selaras dengan nilai spiritual yang mengutamakan konsep tauhid. Untuk itu sebagai seorang muslim yang mempercayai adanya hari akhir sejatinya Bank Sulselbar Syariah menjadikan segala yang terjadi merupakan kehendak yang kuasa, dan kita sebagai *khalifatul fil ardh* hanya bertugas menjaga dan menjalankannya.

4. Upaya Bank Sulselbar Syariah Dalam Mengatasi Permasalahan Principal-Agent Pembiayaan Mudhārabah

Pembiayaan *mudhārabah* pada bank Sulselbar syariah tidak terlepas dari risiko yang dihadapinya, risiko tersebut dapat berupa risiko ketidakjujuran akibat tindakan yang dilakukan nasabah dengan tujuan menguntungkan kepentingan pribadinya dan menimbulkan dampak kerugian yang akan ditanggung oleh *shahibul maal*. Pada

hubungan kontrak seperti ini diperlukan keterbukaan antara kedua belah pihak mengenai untung rugi bisnis yang dijalankan. Seperti halnya dalam perjanjian awal pihak nasabah mengajukan pembiayaan dengan konsep membangun usaha bandar udara tetapi ketika perjalanan ternyata nasabah menggunakan dana pembiayaan mudharabah untuk membangun usaha lainnya atau membeli barang untuk kepentingan pribadi yang tidak terdapat pada perjanjian awal. Dalam kasus tersebut bank telah menetapkan bahwa peristiwa tersebut termasuk dalam peristiwa cidera janji yang dalam artian nasabah telah ingkar dari perjanjian awalnya, untuk itu pihak bank telah menetapkan konsekuensi jika dalam prakteknya nasabah telah berbuat curang, dimana nasabah sepenuhnya yang akan menanggung kerugian, nasabah harus menyelesaikan semua utang yang masih ada pada saat itu juga tanpa rekomendasi lanjutan, jika nasabah tidak dapat membayar utangnya maka pihak bank akan melakukan pencairan jaminan sebagai solusi akhir dari masalah tersebut. Prosedur yang ketat, aturan dan hukuman yang jelas merupakan bentuk pengendalian pihak bank dalam mengatasi masalah *principal-agent* yang mungkin dapat terjadi. Masalah keagenan yang terjadi pada Bank Sulsebar Syariah disebabkan karena adanya hubungan antara pemilik modal dan nasabah sebagai pihak yang diberikan kepercayaan dalam mengelola modal tersebut akan tetapi, masalah yang akan terjadi jika kedua belah pihak masing-masing memiliki kepentingan yang berbeda dan kemungkinan nasabah memberikan informasi yang tidak sesuai dengan kenyataan. Adapun mitigasi Bank Sullselbar Syariah dalam mengatasi masalah *principal agent* pembiayaan mudharabah yaitu :

- a. Tahap awal permohonan pembiayaan mudharabah pada bank sulselbar syariah, nasabah telah diseleksi dengan ketat dengan bantuan sistem *BI chacking*. *BI chacking* adalah sistem yang ada pada Bank Indonesia yang dapat digunakan untuk mengetahui identitas nasabah secara keseluruhan salah

satunya menilai hubungan calon nasabah dengan bank-bank lain selain bank sulselbar syariah. Sistem ini akan menampilkan seluruh identitas calon nasabah hanya dengan menggunakan nomor Kartu Tanda penduduk (KTP) yang dimiliki nasabah.

- b. Berkaitan dengan calon nasabah yang dapat bertindak tidak jujur, maka pada proses pengumpulan berkas pembiayaan mudharabah pada Bank Sulselbar Syariah telah menetapkan peraturan bahwa calon nasabah harus menandatangani Surat Pernyataan Keaslian Dokumen (SPKD) yang berisi bahwa semua berkas yang dikumpul pada bank sulselbar syariah merupakan berkas asli tanpa rekayasa dan jika suatu hari nanti pihak bank menemukan hal yang demikian, maka bank akan memberhentikan pembiyaan secara sepihak, dan bank dibebaskan dari tuntutan apapun, selain itu nasabah harus membayar segala kerugian yang terjadi
- c. Pembiayaan *mudhārabah* pada Bank Sulselbar Syariah sebagian besar disalurkan pada koperasi-koperasi yang ada di setiap daerah, dan koperasi tersebut menyalurkan kembali ke anggotanya. Hal ini dilakukan Bank Sulselbar Syariah agar nasabah dapat dijangkau dan mudah dikontrol selain itu, bank juga mewajibkan setiap koperasi untuk menyeter daftar-daftar user yang dibiayai sekaligus nomor telponnya. Setelah itu pihak bank akan melakukan konfirmasi sampel untuk memastikan apakah benar sampel tersebut adalah anggota koperasi tersebut. Kerja sama dengan koperasi untuk pembiayaan *mudhārabah* merupakan langkah paling riil bagi Bank Sulselbar Syariah untuk dibantu suntikan dana. Hal inipun merupakan salah satu langkah agar dapat meningkatkan komposisi pembiayaan *mudhārabah* pada Bank Sulselbar Syariah.

- d. Berkaitan dengan calon nasabah yang lalai dalam memenuhi kewajibannya secara tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, maka pihak bank sulselbar syariah akan melakukan penilaian sesuai dengan status tingkat kolektibilitas. Ada pun tingkat kolektibilitas yang ditetapkan bank sulselbar syariah terdiri dari 5 (lima) tingkatan yaitu: (1) Kol 1: Lancar, (2) Kol 2: Dalam perhatian Khusus (1-90 hari), (3) Kol 3: kurang lancar (90-180 hari), (4) Kol 4: Diragukan (181-270 hari), (5) Kol 5: Macet (> 270 hari). Jika nasabah telah ditetapkan bahwa usaha yang dijalankan berada pada status kol 2, maka pihak Bank Sulselbar Syariah akan menerbitkan surat peringatan (1-3) yang berisi bahwa nasabah telah melewati batas waktu pembayaran dengan status kolektibilitasnya, untuk itu sebelum status kol berada pada tingkat 5 maka pihak bank sulselbar syariah akan mengupayakan cara-cara untuk menaikkan status nasabah pada Kol (1), dengan itu tahap monitoring akan dimaksimalkan sebagai tahap akhir untuk mengetahui penyebab menurunnya tingkat kolektibilitas usaha nasabah. Dengan menetapkan kolektibilitas nasabah, maka Bank Sulselbar Syariah dapat mengantisipasi status usaha nasabah dan melakukan perbaikan serta mencari solusi yang perlu dilakukan agar status usaha dapat dinaikkan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa penerapan *shariah governance* yang terjadi pada lingkup pembiayaan *mudhārabah* pada Bank Sulselbar Syariah sebagian besar masih belum terealisasi secara merata, hal ini diakibatkan karna bank sulselbar syariah masih sulit menangani problematika dari sistem mudharabah. Proses realisasi penggunaan dana zakat serta laporan sumber dan dana kebajikan sebagai bagian dari laporan syariah yang harus dijalankan Bank Sulselbar Syariah sebagai bisnis syariah masih minim dan nihil. Hal ini membuktikan bahwa Bank Sulsebar Syariah masih terfokus pada kelancaran bisnis dan mengejar keuntungan sehingga faktor syariah masih disampingkan. Konsep syariah yang dibangun belum mampu menstimulasi lahirnya *agency theory* yang terbentuk dalam pembiayaan *mudhārabah*.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang didapat, maka penulis dapat memberikan saran yaitu:

- a. Bank sulselbar syariah diharapkan lebih menjunjung tinggi nilai spiritual dalam menghadapi risiko yang terjadi dalam pembiayaan *mudhārabah*.
- b. Konsep tata kelola yang dibangun Bank Sulselbar Syariah sebagian besar masih menganut visi dan misi perusahaan induk dengan basis konvensional, untuk itu diharapkan Bank Sulselbar Syariah memiliki konsep yang berbeda salah satunya nilai-nilai spiritual yang seharusnya menjadi landasan utamanya.
- c. Penelitian kali ini menggunakan objek penelitian yang hanya terfokus pada pengalaman pihak bank saja, untuk itu bagi peneliti selanjutnya sebaiknya meninjau sisi nasabah.

DAFTAR PUSTAKA

- 'Aabid, Fachruddin Dan Noven Suprayogi. 2016. Penerapan Tata Kelola Lembaga Keuangan Islam (Studi Kasus Pada PT BPRS Jabal Nur Surabaya). *Jurnal Ekonomi Syariah Teoridan Terapan*. 3(5): 346-358.
- Achmad, Lailia. 2009. Teori Kepatuhan. <http://bidanlia.blogspot.co.id/2009/06/teori-kepatuhan.html> .Diakses Jam 12.21 Tanggal 1 Maret 2017.
- Afiyanti, Y. 2008. Validitas dan Reliabilitas dalam Penelitian Kualitatif.. *Afidburhanuddin .files .wordpress.com*. 12(2): 137-141.
- Al Mansour, Issa. 2015. Corporate Governance In Global Islamic Financial Institutions (Emirates Islamic Bank Is The Case Study). *Internastional Journal OfSains*. 3(11): 125-136.
- Alfie, Atieq Amjadallah dan Khanifah. 2007. Analisis Kepatuhan Pembiayaan Mudharabah dalam Pernyataan Standar akuntansi (PSAK No. 59) terhadap Aspek Syariah Ilmu Fiqih Syafi'iyah. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. 2(3): 28-44
- Anggraeni, Mariska dewi. 2011. Agency Theory Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Hukum Islam*. 9(2): 272-288.
- Agung, Ivan Muhammad dan Desma Husni. 2016. Pengukuran Konsep Amanah Dalam Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif. *Jurnal Psikologi*. 43(3): 194-206).
- Agung, Ivan Muhammad dan Jhon Herwanto. 2017. Perdagangan Yang Amanah :Studi Eksplorasi Dengan Pendekatan Psikologi *Indigenous. Jurnal Ilmiah Psikologi*. 4(1): 133-140.
- Amalia, Iffa Dan Sri Herianingrum. 2015. Implementasi Nilai Tabligh pada Tenaga Pengajar dalam Proses Belajar Mengajar Di Madrasah Aliyah Negeri Mojoker. *JESTT*. 2 (10): 828-849.
- Anhara.2015. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Manajemen Laba. *Jurnal Tekun*. 6(1):128-150.
- Ardiansyah, Misnen. 2014. Bayang-Bayang Teori Keagenan Pada Produk Pembiayaan Perbankan Syariah. *Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*. 14(2): 251-269.

- Ascarya dan Diana Yumanita. 2005. Mencari Solusi Rendahnya Pembiayaan Bagi Hasil Di Perbankan Syariah Indonesia. *Jurnal Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*.
- Asiyah, Siti., Djumilah Hadiwidjojo., Achmad Sudiro Dan Khusnul Ashar. 2014. Relationship Between Shariah Principles Anherence, Corporate Social Responsibility, Trus And Costumer Loyalty : Theretical Study At Indonesia BMT. *International Journal Of Business And Management Invention* . 3(10): 36-46.
- Buhari, Nor Fadilah Dan Nuzul Akhtar Baharuddin. 2016. Shariah Governance Frameworks The Rols Of Shariah Review And Shariah Auditing. *International Journal Conference On Management And Muamalah*. Pp. 357-387.
- Efferin, Sujoko. 2015. Akuntansi, Spiritualitas, dan Kearifan Lokal: Beberapa Agenda Penelitian Kritis. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*. 6(3): 466-480.
- Espa, Vitriyan. 2014. Formulasi Proses Belajar Mengajar Akuntansi Multiparadigma dengan Pendekatan Hipnoteacing. *Jurnal Audit dan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura*. 3(2): 85-122.
- Fatmawati, Evi., Neneng Nurhasanah Dan Nurdin. 2016. Analisis Implementasi Pinsip Transparansi Dalam Pengelolaan Zakat Di Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Bandung. *Prosiding Keuangan Dan Perbankan Syariah*. 2(1): 393-400.
- Friyanto. 2013. Pembiayaan Mudharabah, Risiko Dan Penanganannya. *Jurnal Managemen Dan Kewirausahaan*. 15(2) : 113-122.
- Ghonyiah, Nunung Dan Sri Hartono. 2014. The Role Of Islamic Corporate Governance In Smes To Improve The Welfare Of Society. *IJER*. 11(3): 601-613.
- Hadi, AChairul. 2011. Problematika Pembiayaan Mudharabah Di Perbankan Syariah Indonesia. *Jurnal Masalahah*. 2(1): 1-17.
- Halim, Julia., Carmel Meiden dan Rudolf Lumba Tobing. 2005. Pengaruh Manajemen Laba Pada Tingkat Pengungkapan laporan Keuangan Padaperusahaan Manufaktur Yang termasuk Dalam Indeks LQ-45. *Jurnal Simposium Nasional Akuntansi VIII*, Solo.
- Hulam, Taufiqulah. 2010. Jaminan dalam Transaksi Akad Mudharabah pada Perbankan Syariah. *Jurnal Mimbar Hukum*. 22(3): 520-533.

- Husain., Saddam Dan Wahuddin Abdullah. 2015. Metafora Amanah Pengelolaan Dana Pihak Ketiga (DPK) Sebagai Penopang Asset Perbankan Syariah Ditinjau Dari Aspek Triologi Akuntabilitas (Studi Kasus Pada PT Bank BNI Syariah Cabang Makassar. *Jurnal Iqtisaduna*. 1(2): 40-64.
- Ilham, Misbakhul. 2016. Kajian dan Kejujuran Perspektif Al-qur'an dan Al Hadis. <http://kajianumum313.blogspot.co.id/2016/01/keadilan-dan-kejujuran-perspektif-al.html>. Akses Tgl 15-Oktober-2017 jam 19.22.
- Isna, Agis Faradilla. 2016. Implementasi Goog Corporate Governance (GCG) dalam Pembiayaan Mudharabah Di BRI Syariah Cabang Purwokerto. *Skripsi*. IAIN Purwokerto.
- Ismanto, Kuat. 2012. Prospektus Reksadana Sebagai Prinsip Kejujuran Dalam Bisnis Syariah. *Jurnal Hukum Islam*. 10(2): 277-286.
- Ismanto, Kuat. 2012. Principle Of Utmost Good Faith Dalam Perjanjian Asuransi Studi Asas Hukum Perjanjian Syariah. *Jurnal Episteme*. 7(2) : 293-310.
- Jensen, Michael C And William H Meckling. 1976. Theory Of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs And Ownership Structure. *Journal Of Financial Economics*. 3(4): 1-76.
- Juliansyah, Asep Irwan., Titin Suprihatin dan Ifa Hanifia senjiati. 2016. Analisis Implementasi Kode Etik (Code Of Conduct) Good Corporate Governance dalam pencapaian Best Practice Islamic Bank Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia. *Jurnal Prosiding Keuangan dan Perbankan Syariah*. 2(2) 549-555.
- Junaidi. 2015. Analisis Pengungkapan Csr Perbankan Syariah Indonesia Berdasarkan Islamic Social Reporting Index. *Jurnal Akuntansi Dan Investasi*. 16(1): 75-85.
- Junusi, Rahman El. 2012. Implementasi Syariah Governance Serta Implikasinya Terhadap Reputasi Dan Kepercayaan Bank Syariah. *Jurnal Al-Tahrir*. 12(1): 87-111.
- Kholmi, Masiyah. 2010. Akuntabilitas dalam Perspektif Teori Agency. *Jurnal Ekonomi Bisnis*. 2(2): 357-370.
- Kiswanto dan Hasan Mukhibad. 2011. Analisis Budaya Islam Dan Akuntabilitas. *Jurnal Dinamika*. 3(2): 77-89.
- Laporan Keuangan Publikasi Unit Usaha Syaria PT Bank Sulselbar. 2017. <https://banksulselbar.co.id/images-data/files/2017/04/03/197/laporan-publikasi-triwulanan-31-des-2016.pdf>. Akses Tgl 16 juni 2017 jam 6.44
- Lewis, Mervyn. 2006. Accountability And Islam. *International Conference On Accounting And Finance In Transition*. Pp. 1-16

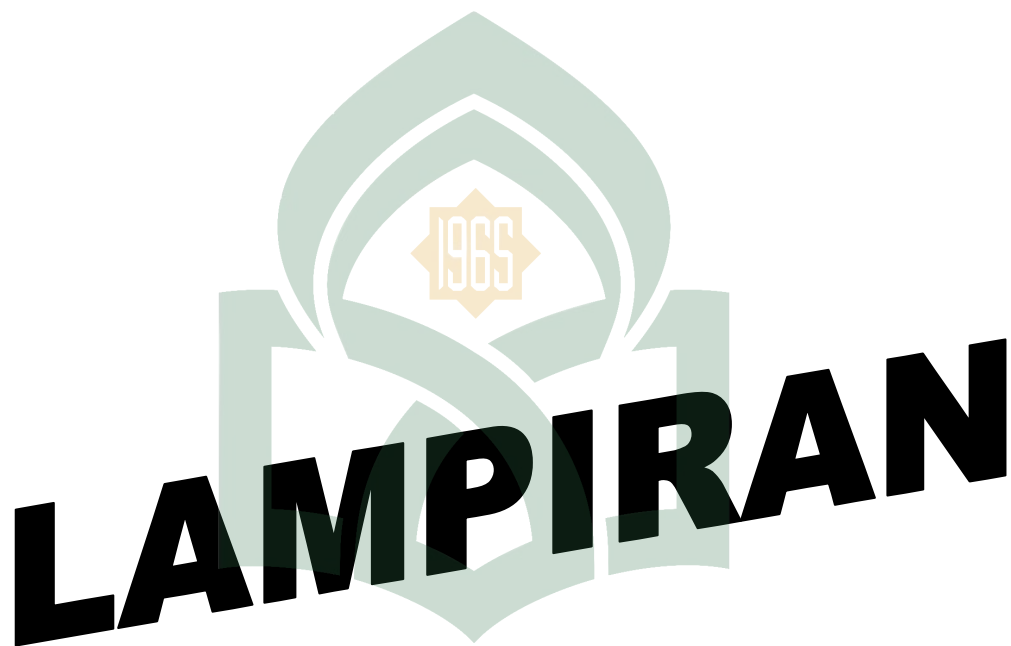
- Lewaru, Trisna Sari. 2015. Permasalahan Agency Theory pada Perbankan Syariah. *Jurnal Ekonomi*. 9(1): 43-49
- Lutfinanda, Akhirul Dan Andwiani Sinarasri. 2014. Analisis Pengaruh Pengungkapan Syari'ah Compliance Terhadap Kepatuhan Perbankan Syariah Pada Prinsip Syariah (Studi Kasus Di BPRS Kota Semarang). *Jurnal Maksimum*. 4(1): 23-28.
- Lukman, Amir Rahman dan Khaerunnisa. 2016. Rekonstruksi Nilai Keadilan dalam Penetapan Margin Murabahah Di PT Amanah Finance Makassar. *Jurnal Fenomena*. 8(2): 127-142.
- Maradita, Aldira. 2014. Karakteristik Good Corporate Governance Pada Bank Syariah Dan Bank Konvensional. *Jurnal Yuridika*. 29(2): 191-208.
- Maharani, Setia Nur. 2008. Menyibak Agency Problem Pada Pembiayaan Mudharabah. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*. 12(3) : 479-493.
- Mahfudhoh, Siti dan Thini Nurul Rohman. 2015. Faktor yang mempengaruhi keptuhan penulisan resepsesuai formularium. *Jurnal Administrasi Kesehatan Indonesia*. 3(1): 21-30.
- Mardatilah, Annisa. 2013. Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam. *JIS*. 6(1): 89-98..
- Mansur, Ilham. 2013. Perwujudan Nilai-Nilai Profetik Pada Laporan Keuangan Perusahaan. ilho071.blogspot.co.id/2013/05/essay-tentang-transparansi-dan.html. Akses Jam 16.35 Tgl 23 Oktober 2017.
- Muhammad. 2008. *Manajemen Pembiayaan Mudharabah Di Bank syariah (strategi memaksimalkan return dan meminimalkan risiko pembiayaan di bank syariah sebagai akibat masalah agency)*. Jakarta: PT Raja GrafindoPersada.
- Mulazid, Ade Sofyan. 2016. Pelaksanaan Syariah Compliance Pada Bank Syariah (Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri, Jakarta). *Jurnal Madania*. 20(1): 37-54.
- Multifiah., Asri Manzilati Dan Laili Hurriati. Masalah Keagenan Dan Penegakannya Pada Pembiayaan Mudharabah (Studi Padabaitul Mal Wa Tamwil Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri Cabang Malang. *International Journal Of Social And Local Economic Governance*. 1(1): 52-60.
- Mursal dan Suhadi. 2015. Implementasi Prinsip Islam Dalam Aktivitas Ekonomi : Alternatif Mewujudkan Keseimbangan Hidup. *Jurnal Penelitian*. 9(1): 67-92.
- Nofianti, Leny Dan Andi Irfan. 2014. Hubungan Antara Penerapan Model Prinsip-Prinsip Goog Corporate Syari'ah Dengan Kinerja Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Simposium Nasional Akuntansi*.

- Parawitasari, Dyah Ayu. 2017. Internalisasi Nilai-Nilai Keadilan dalam Praktik Pembiayaan Mudharabah dan Deposito Mudharabah. 2(1): 71-95.
- Purnamasari, Intan Dan Emile Satya Darma. 2015. Pengaruh Implementasi Syariah Governance Terhadap Loyalitas Nasabah. *Jurnal Akuntansi dan Investasi*. 16(1): 13-24
- Purnomo, Joko Hadi. 2016. Syariah Governance Pada Perbankan Syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah*. 1(1): 1-15
- Putriandini, Silviana dan Gugus Irianto. 2012. Fenomenologi Konvensional Dalam Implementasi Sistem Pengendalian Internal Pada Pembiayaan Musyarakah. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*. 3(1): 134-154.
- Rama, Ali Dan Yella Novela. 2015. Syariah Governance Dan Kualitas Tata Kelola Perbankan Syariah. *Jurnal Signifikan*. 4(2): 111-126.
- Rama, Ali. 2015. Analisis Sistem Tata Kelola Syari'ah Bagi Perbankan Syariah Di Indonesia dan Malaysia. *Jurnal Bisnis Islam*. 8(1): 87-120.
- Rama, Ali. 2015. Analisis Kerangka Regulasi Model Syariah Governance Lembaga Keuangan Syariah. *Journal Of Islamic Economics lariba*. 1(1) : 1-18.
- Saputro, Andik S Dwi. 2010. Penguatan Sharia Governance Melalui Reformasi Akuntansi. *Jurnal Simposium Nasional Akuntansi XIII*, Purwokerto.
- Saramawati, Dehdi Ana Meydan Ahmad Tamizi Lubis. 2014. Analisis Pengungkapan Syariah Compliance Dalam Pelaksanaan Good Corporate Governance Bank Syariah Di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*. 2(2):107-125.
- Siregar, Budi Gautama. 2015. Implemetasi Akuntansi Dalam Kehidupan Menurut Perspektif Islam. *Jurnal Al-Masharif*. 3(1): 1-16
- Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Manajemen. Bandung: Alfabeta.
- Tahir, Harsya K., Agus T Poputra Dan Jessy D L Waronga. 2016. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Accountability*. 3(2): 77-89.

- Taufiq, Imam. 2015. Transparency And Accounting In The Qur'an Dan ITS Role In Building Good Corporate Governance. *International Journal Of Business, Economic And Law*. 6(4): 73-81.
- Trianti, Khoiriyah dan Iwan Triyuwono. 2014. Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah. *Jurnal Ilmiah*. Universitas Brawijaya, Malang.
- Ummah, Muwahid. 2013. Analisis Praktik Islamic Corporate Governance Pada Perbankan Syariah. *Skripsi*. Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Ujiyantho, Muh Arief dan Bambang Agus Pramuka. 2007. Mekanisme Corporate Governance, Manajemen Laba dan Kinerja Keuangan. *Jurnal Simposium Nasional Akuntansi X*, Makassar.
- Yuliana. Rita. 2013. Muhasabah Bank Syariah Dalam Penerapan Prinsip Bagi Hasil. *Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi Islam*. 1(1): 51-61.
- Yunanda, RochaniaAyu., ZurinaShafi'i Dan Muhammad Ali Tareq. 2016. Accountability Of Islami Baseo Non Profit Setor:The Case Of Waqf Organizations. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*. 2(2): 105-124.
- Yulianti. 2013. Kajian Kantin Jujur Dalam Rangka Peningkatan Pendidikan Berkarakter Ditingkat Sekolah Dasar Untuk Mewujudkan Siswa Yang Kreatif. (Studi Kasus Di Sdn Panggungrejo 04 Kepanjen. *Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Sd*. 1(2): 48-58.
- Waluyo, Agus. 2016. Kepatuhan Bank Syariah Terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional Pasca Transformasi Kedalam Hukum Positif. *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*. 10(2): 517-538.
- Waluyo, Bambang. 2015. Implementasi Mudharabah Pada Pembiayaan Di Bank Syariah. *Jurnal Akuntansi Polteknik Negeri*, Jakarta.
- Wikipedia. 2013. Kepatuhan (Tata kelola perusahaan). <https://id.wikipedia.org/wiki/Kepatuhan>. Diakses Jam 13.11 Tanggal 1 Maret 2013
- Wulandari, Antonina Pantja Juni. 2012. Gambaran Kejujuran Sebagai Landasan Keutamaan Moral Mahasiswa Yang Sudah Pernah Mengambil Mata Kuliah Character Building. *Jurnal Humaniora*. 3(2): 566-572.
- Wulandari, Ani. 2010. Menyikap Nilai Keadilan (Dalam Perspektif Syariah Islam) Yang Terkandung Di Dalam Good Corporate Governance. *Jurnal Investasi*. 6(2): 95-100.

Zulhelmy dan Firdaus A Rahman. 2009. Sistem Corporate Governance Dalam Perspektif Akuntansi Syariah 75. *Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*. 15(1): 75-84.





UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

LAMPIRAN

Narasumber : Muh. Fiqri Erdiansyah

Jabatan : Account Officer

Tanggal : 18 juli 2017

Tempat : Bank Sulselba Syariah

HASIL WAWANCARA

Analisis Syariah Governance Pada Pembiayaan Mudharabah	
A. Shiddiq (Kejujuran)	
1. Apakah dalam tahap proses pemenuhan persyaratan/permohonan pembiayaan mudharabah terdapat perilaku tidak jujur yang dilakukan oleh calon nasabah terhadap dokumen tersebut ?	<p>Jawaban : Sejauh ini hal tersebut belum ada, karna bisnis yang kami jalankan atas dasar kepercayaan sehingga untuk menumbuhkan rasa kepercayaan antara bank dan nasabah maka pada saat pengajuan berkas kami mewajibkan setiap nasabah menandatangani surat yang namanya surat pernyataan keaslian dokumen yang menyatakan bahwa seluruh dokumen yang diserahkan dibank merupakan dokumen asli dan benar tanpa ada rekayasa.</p>
2. Apasaja mitigasi yang dilakukan oleh perbankan untuk mengatasi hal tersebut agar tidak terjadi ?	<p>Jawaban : Sebagai bentuk mitigasinya yaitu (1) nasabah harus menandatangani surat pernyataan keaslian dokumen yang dibuat pihak bank. Hal tersebut dilakukan agar nasabah dapat bertindak jujur. (2) melakukan wawancara pada nasabah.. (3) melakukan survei langsung pada kerabat serta tetangga nasabah.</p>

3. Apakah permohonan pembiayaan masih akan diproses jika nasabah diketahui telah melakukan tindakan yang tidak jujur ?

Jawaban : jika hal tersebut terjadi maka kami dari pihak bank tidak akan memproses pengajuan pembiayaan tersebut dan tidak ada rekomendasi lanjutan yang akan kami berikan kepada nasabah atau secara langsung kami membatalkan permohonan yang diajukan.

B. Amanah (Dapat dipercaya)

1. Bagaimana perbankan menyikapi jika ada perilaku nasabah yang mengelola dana pembiayaan mudharabah yang tidak sesuai dengan ketentuan akad?

Jawaban : jika pihak nasabah telah melakukan tindakan yang pada saat pengajuan pembiayaan dan realisasi anggaran tidak sesuai akad awal (cidera janji/ penyelewengan) maka kami pihak perbankan secara sepihak memberhentikan pembiayaan dan pihak nasabah harus melunasi semua utang-utangnya pada saat itu juga. Jika nasabah tidak dapat melunasi maka kami pihak bank akan menggunakan jaminan sebagai penyelesaian masalah tersebut.

2. Apakah perjanjian pada akad awal pembiayaan mudharabah dapat berubah ?

Jawaban : tidak ada perubahan akad, sebab kami pihak bank hanya akan bermitra dengan nasabah yang dapat kami percaya.

3. Bagaimana upaya perbankan untuk mengantisipasi adanya penundanaan pembayaran bagi hasil oleh nasabah ?

Jawaban : upaya yang kami lakukan yaitu dengan melakukan pengawasan (monitoring), setelah dilakukan pencairan, maka analis akan melakukan komunikasi dengan nasabah minimal sebulan sekali baik dengan telfon maupun turun langsung pada lokasi usaha dengan cara tersebut pihak

perbankan dapat mengetahui prospek usaha nasabahnya kedepan. Sehingga penunudaan ansuran tidak dapat terjadi. Selain itu kami telah membuat prosedur penyishan piutang dengan menentukan tingkat kolektibilitas pada setiap pembayaran yang dilakukan nasabah, . Ada pun kolektibilitas sendiri memiliki 5 (lima) tingkat yaitu :

- a. Kol 1: Lancar
 - b. Kol 2: Dalam perkhatian Khusus (1-90 hari)
 - c. Kol 3: kurang lancar (90-180 hari)
 - d. Kol 4: Diragukan (181-270 hari)
 - e. Kol 5: Macet (> 270 hari)
4. Kebijakan apa yang diambil perbankan jika hal tersebut terjadi?

Jawaban : kebijakan yang diambil yaitu menerbitkan surat peringatan (SP 1 sampai 3) ke nasabah yang menyampaikan bahwa ada tunggakan dengan menyertakan satutus kolektibilitasnya.

C. Tabligh (Transparan)

1. Informasi apasajakah yang perlu diungkap nasabah terkait dengan pengelolaan dana pembiayaan mudharabah ?

Jawaban : Bentuk transparan nasabah ada 2 (dua) yaitu lisan dan tulisan. Dalam bentuk tulisan biasanya diwujudkan dengan informasi pada laporan keuangan yang dibuat nasabah, sementara secara lisan bisannya diberikan nasabah ketika pada proses monitoring, transparn diwujudkan dengan kesediaan nasabah memberikan informasi secara langsung terkait usaha nasabah, dengan itu kami pihak bank dapat secara langsung menganalisa apakah semua informasi yang disampaikan riil seperti yg tertuang dalam laporan keuangan.

2. Kapan jangka waktu yang ditetapkan perbankan kepada nasabah untuk melaporkan informasi usahanya tersebut?

Jawaban: minimal 3 bulan sekali

3. Bagaimana cara perbankan mengukur informasi yang diberikan nasabah telah sesuai dengan keadaan sebenarnya (akurat) ?

Jawaban: kami melakukan evaluasi kembali dari laporan keuangan yang dibuat nasabah dengan melakukan monitoring langsung dan pengecekan fisik serta wawancara dengan nasabah dengan begitu kami pihak bank dapat mengetahui secara langsung antara informasi yang diberikan dengan faktanya.

D. Mas'uliyah (Akuntabilitas)

1. Bagaimana bentuk laporan pertanggungjawaban nasabah kepada perbankan terkait dengan pengelolaan dana pembiayaan mudharabah?

Jawaban: .Bentuk pertanggungjawaban nasabah dalam bentuk laporan keuangan semesteran yang dilaporkan sekurang-kurangnya 60 hari, untuk laporan keuangan tahunan yang telah diaudit sekurang-kurangnya 180 hari setelah tanggal laporan

2. Apakah laporan tersebut dapat memberikan kejelasan bahwa nasabah telah menggunakan dana pembiayaan mudharabah secara efektif ?

Jawaban : Informasi dalam laporan keuangan secara tidak langsung belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan penggunaannya, untuk itu kami pihak bank perlu melakukan monitoring secara langsung agar informasi yang kami terima dalam bentuk laporan keuangan dapat secara langsung menghindari praktik kecurangan yang dilakukan oleh nasabah. Dengan itu kami akan melakukan pencocokan antara laporan yang dibuat dengan kejadian sebenarnya yang terjadi dilapangan.

E. Al-Adil (keadilan)

1. Bagaimana tindakan perbankan, jika mengetahui terdapat perilaku nasabah yang menyembunyikan keuntungan usahanya?

Jawaban : Akibat praktik bisnis yang kami jalankan berasas kepercayaan, sehingga jika nasabah diketahui secara riil melakukan tindakan kecurangan maka kami pihak bank tidak akan melanjutkan akad tersebut atau dalam arti kata perjanjian akan langsung kami batalkan..

2. Bagaimana mekanisme pembagian untung dan rugi, jika hal tersebut terjadi?

Jawaban: jika hal tersebut terjadi, otomatis akad dibubarkan (dihentikan) seperti pada persyaratan tentang adanya peristiwa cidera janji yang mengakibatkan pihak bank dirugikan maka pihak nasabah harus menanggung kerugian serta melakukan membayar semua angsuran yang masih tersisa. Dan pihak bank akan dibebaskan dari segala tuntutan dan ganti rugi apapun.

3. Apakah nasabah juga mengkomunikasikan pada pihak bank jika terdapat kendala dalam mengelola usahanya?

Jawaban: sebenarnya dalam proses monitoring merupakan alat komunikasi yang paling diandalkan perbankan untuk lebih mengetahui informasi yang terjadi pada usaha nasabah. sehingga jika terdapat kendala yang dialami nasabah, biasanya pihak bank akan langsung menanyakan kendala apa yang dialami nasabah sehingga pihak bank juga dapat memberikan kontribusi untuk lebih memberikan arahan pada nasabah terkait apa yang harus dilakukan nasabah selanjutnya agar dapat meningkatkan usahanya.

Masalah principal-Agent Pembiayaan Mudharabah

1. Menurut anda, apa yang mempengaruhi rendahnya pembiayaan mudharabah ?

Jawaban: rendahnya pembiayaan mudharabah yaitu akibat adanya hubungan kontraktual dimana salah satu pihak dapat bertindak curang dengan mementingkan kepentingan pribadi, sehingga kami pihak Bank Sulselbar Syariah selaku pemilik juga tidak mau menanggung resiko kerugian yang besar terhadap transaksi yang berlangsung didalam pembiayaan mudharabah.

2. Bagaimana upaya yang dilakukan perbankan untuk meningkatkan komposisi penyaluran dana pembiayaan mudharabah ?

Jawaban: kami pihak bank telah melakukan langkah awal untuk tetap mempertahankan pembiayaan mudharabah serta meningkatkan komposisinya, salah satunya dengan menyalurkan pada setiap koperasi-koperasi yang ada di Makassar, kemudian koperasi tersebut menyalurkan kembali danannya kepada anggotanya. Dengan melakukan kerja sama dengan koperasi kami dapat dengan mudah menjangkau nasabah dengan begitu skim bagi hasil dapat lancar.

3. Bagaimana menurut anda, jaminan yang diikut sertakan sebagai salah satu persyaratan pembiayaan, apakah dapat mengurangi tindakan manipulasi oleh nasabah ?

Jawaban: jaminan itu sebagai bentuk antisipasi kami ketika menghadapi nasabah yang telah ditetapkan macet dan tidak dapat melunasi seluruh utangnya, secara tidak langsung dapat meminimalisir risio karena nasabah juga tidak mau kalau pihak bank menjual aset yang mereka miliki.

4. Menurut anda, bagaimana solusi yang tepat untuk mengatasi masalah prinsipal-agen peman adabiayaan mudharabah

Jawaban: selain menetapkan aturan dan seleksi yang ketat pada proses awal petidak rmohonan sampai pada pelaksanaan akad, meninjau kembali nasabah dengan bantuan BI chaking yang ada pada bank indonesia, juga memanfaatkan proses monitoring yang merupakan aspek penting untuk memantau apakah nasabah telah melakukan tugasnya sesuai dengan perjanjian. Pada tahap tersebut kami pihak bank juga akan melakukan komunikasi secara rutin kepada nasabah sekitar 3 kali dalam satu bulan, atau komunikasi yang dilakukan tiap 2 minggu sekali.









Nomor : SR/255 /B/SY-MKSN/II/2017
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

Makassar, 07 Juli 2017

Kepada Yth :
Dekan Fakultas Ekonomi & Bisnis
UIN Alauddin
Di- Makassar

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Semoga kita selalu mendapatkan Taufik dan Hidayah dari Allah SWT didalam menjalankan aktifitas sehari-hari, Amin

Menunjuk Surat Nomor : 4031/EB.I/PP.00.9/2017 Tanggal 03 Juli 2017 tentang Izin Penelitian Mahasiswa atas nama :

Nama : Al Ummul Nastainul
Nomor Induk : 10800113073
Jurusan : Akuntansi
Judul Penelitian : "Analisis Pelaksanaan Syariah Governance dalam Permasalahan Principa-Agent Pembiayaan Mudharabah pada Bank Sulselbar Syariah".

Maka dengan ini disampaikan bahwa pada dasarnya permohonan tersebut kami setuju dan pengambilan data dapat dilakukan diatas jam operasional (Jam 15.00 Wita – 17.00 Wita).

Demikian dsampaikan atas perhatiannya di ucapkan terima kasih.
Billahitauq Walhidayah
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN
M A K A S S A R

PT. Bank Sulselbar
Cabang Syariah Makassar

A. Justi Cokana
Pinsie Operasional

Tembusan :
1. Ybs
2. File

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI SELATAN DAN SULAWESI BARAT
Kantor Pusat : Jl. D.R. Ratulangi No. 16 - Makassar 90126
Tel. +62-411 859171 (Hunting) Fax. +62-411 859 178
Web Site : www.banksulselbar.co.id



SURAT KETERANGAN
No. SR/321/B/SY-MKS/VIII/2017

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : A. Justi Cokana
Pekerjaan : Pemimpin Seksi Operasional
Alamat : Jl.Dr.Ratulangi No 7 Ruko C1-C2, Makassar

Menerangkan bahwa :

Nama : Al Ummul Nastainul
No. Induk : 10800113073
Jurusan : Akuntansi
Judul Penelitian : "Analisis Pelaksanaan Syariah Governance dalam Permasalahan
Principa-Agent Pembiayaan Mudharabah pada Bank Sulselbar Syariah".

Bahwa benar telah melaksanakan penelitian.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

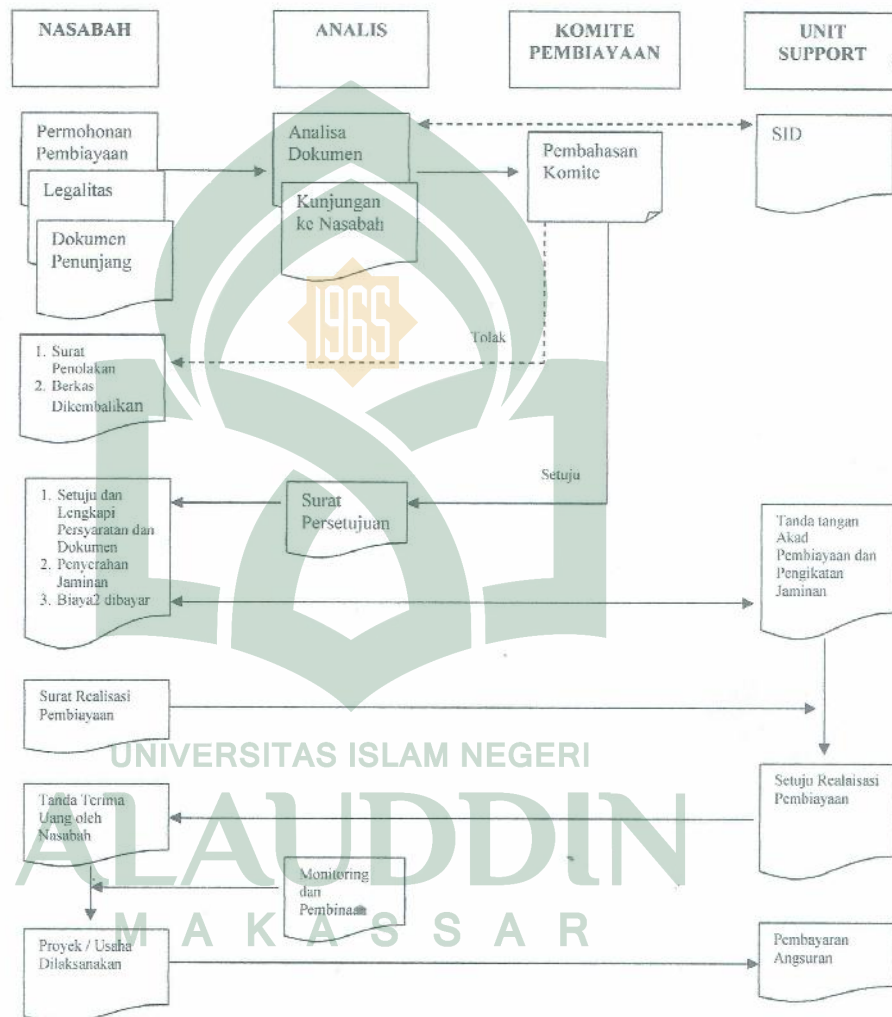
Makassar, 21 Agustus 2017

PT.Bank Sulselbar
Cabang Syariah Makassar

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

A. Justi Cokana
Pinsie Operasional

Flowchart Ketentuan Pelaksanaan :





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Kampus I : Jl. Sultan Alauddin No. 63 Makassar (0411) 864928 Fax 864923
Kampus II : Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36 Samata Sungguminasa – Gowa Tlp. 841879 Fax 8221400

Nomor : *4071* /EB.I/PP.00.9/2017

Samata, *03* Juli 2017

Lamp : -

Perihal : *Permohonan Izin Penelitian*

Kepada,

Yth. Kepala
Prov.

Di -

Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb

Dengan hormat disampaikan bahwa Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar yang tersebut namanya dibawah ini:

Nama : **Al Ummul Nastainul**
NIM : 10800113073
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Akuntansi
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : Jl. Manuruki 2 Lr. 7A

Bermaksud melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana. Adapun judul skripsinya “ **Analisis Pelaksanaan Syariah Governance dalam Permasalahan Principal-Agent Pembiayaan Mudharabah pada Bank Sulselbar Syariah**”

Dengan Dosen pembimbing: **1. Prof. Dr. H. Muslimin Kara, M.Ag.**
2. Sumarlin, SE., M.Ak.

Untuk maksud tersebut kami mengharapkan kiranya kepada mahasiswa yang bersangkutan dapat diberi izin melakukan penelitian di **Bank Sulselbar Syariah**.
Demikian harapan kami dan Terima Kasih.

Wassalam



Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag.

19581022 198703 1 002



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : 9690/S.01P/P2T/07/2017
Lampiran :
Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth.
Pimpinan PT. Bank Sulselbar Syariah

di-
Tempat

Berdasarkan surat Dekan Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar Nomor : 4031/EB.I/PP.00.9/2017 tanggal 03 Juli 2017 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : **AL UMMUL NASTAINUL**
Nomor Pokok : 10800113073
Program Studi : Akuntansi
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)
Alamat : Jl. Muh. Yasin Limpo No. 36 Samata, Sungguminasa-Gowa

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

" ANALISIS PELAKSANAAN SHARIAH GOVERNANCE DALAM PERMASALAHAN PRINCIPA-AGENT PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA BANK SULSELBAR SYARIAH "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **10 Juli s/d 10 Agustus 2017**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada tanggal : 04 Juli 2017

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU, PROVINSI SULAWESI SELATAN
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu



A. M. YAMIN, SE., MS.

Pangkat : Pembina Utama Madya
Nip : 19610513 199002 1 002

Tembusan Yth
1. Dekan Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar di Makassar;
2. *Pertinggal.*



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Kampus I : Jl. Sultan Alauddin No. 63 Makassar ■ (0411) 864924, Fax. 864923
Kampus II : Jl. H.M. Yasin Limpo Romang polong – Gowa . ■ 424835, Fax 424836

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan proposal skripsi saudara AL UMMUL NASTAINUL :
10800113073, Mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN
Alauddin Makassar, Setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi proposal skripsi
yang bersangkutan dengan Judul, “Analisis Pelaksanaan *Shariah Governance* Dalam
Permasalahan *Principal-Agen* Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Sulselbar Cabang
Syariah Makassar”, memandang bahwa proposal skripsi tersebut telah memenuhi
syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke seminar proposal.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Samata-Gowa, 9 Juni 2017

Pembimbing I



Prof. Dr. H. Muslimin Kara, M.Ag.
NIP. 19810402 200003 1002

Pembimbing II

Sumartin, SE., M.Ak.,
NIP. 1982051 920150 31001

M A K A S S A R



KEMENTERIAN AGAMA R.I.
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Kampus I : Jl. Slt. Alauddin No. 63 Makassar Tlp. (0411) 864924 Fax 864923
Kampus II : Jl. Slt. Alauddin No. 36 Samata Sungguminasa – Gowa Tlp. 424835 Fax.424836

LEMBAR PENGESAHAN PROPOSAL

Nomor : /IE/2017

ANALISI PELAKSANAAN *SHARIAH GOVERNANCE* DALAM
PERMASALAHAN *PRINCIPAL-AGENT* PEMBIAYAAN
MUDHARABAH PADA BANK SULSELBAR
SYARIAH MAKASSAR

Disusun dan diajukan oleh :

Makassar, Agustus 2017

Penyusun

Al Ummul Hastainul
Nim : 10800113073

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. H. Muslimin Kara, M.Ag.
Nip. 19710402 200003 1 002

Sumarlin, SE., M.Ak.,
Nip. 19820519 201503 1 001

Mengetahui,
Ketua Jurusan Akuntansi

Jamaluddin M, SE., M.Si.
NIP. 19720611 200801 1 013

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Alauddin Makassar

Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag
NIP. 19581022 198703 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Kampus I : Jl. Slt. Alauddin No. 63 Makassar Tlp. (0411) 864928 Fax 864923
Kampus II : Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36 Samata – Gowa Tlp. 841879 Fax.8221400

Nomor : 2942/EB.I/PP.00.9/2017
Lampiran : -
Hal : **Undangan Seminar Proposal**
A.n. Al Ummul Nastainul/10800113073

Samata, 4 Juni 2017

Kepada Yth:

1. Prof. Dr. H. Muslimin Kara, M.Ag. Sebagai Pembimbing I
2. Sumarlin, SE., M.Ak. Sebagai Pembimbing II

Di

Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Bersama ini kami mengundang bapak, untuk menghadiri seminar dan melaksanakan serta bertindak selaku pembimbing pada Seminar Draft Skripsi, yang insya Allah akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal	: Senin, 19 Juni 2017
Waktu	: 09.00 - Selesai
Judul Skripsi	: Analisis Pelaksanaan Syariah Governance dalam Permasalahan Principal-Agen Pembiayaan mudharabah pada Bank Sul-SelBar cabang Syariah Makassar
Tempat	: Ruang L.206

Atas segala perhatian dan kehadirannya diucapkan banyak terima kasih.

Wassalam,

Dekan

Kuasa Nomor : 2840/EB.1/Kp.07.6/2017

Tertanggal, 07 Juni 2017


Prof. Dr. H. Muslimin Kara, M.Ag.
NIP.19710402 200003 1 002

Catatan:

1. SK Pembimbing Draft Skripsi Terlampir
2. Pembimbing diharapkan hadir



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Kampus I : Jl. Slt. Alauddin No. 63 Makassar Tlp. (0411) 864928 Fax 864923
Kampus II : Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36 Samata – Gowa Tlp. 841879 Fax 8221400

Nomor : /EB.1/PP.00.9/2017

Samata, November 2017

Sifat : Penting

Lamp : -

Hal : Undangan Seminar Hasil

Kepada Yth
Bapak/Ibu Penguji dan Pembimbing
Di-
Makassar

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, kami mengundang Bapak/Ibu untuk menghadiri Seminar Hasil Penelitian Mahasiswa:

Nama : Al Ummul Nastainul
NIM : 10800113073
Jurusan : AKUNTANSI
Judul Skripsi : Analisis Pelaksanaan Syariah Governance dalam Permasalahan Principal Agen Pembiayaan Muharabah pada Bank SulSelBar Syariah

Yang Insya Allah akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 15 November 2017
Waktu : 09.00 - 16.00 WITA
Tempat : Ruang Seminar

Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

a.n Dekan
Kuas Nomor : 5839 /EB.1/Kp..07.6/2017
Tanggal : 13 November 2017

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Dr. H. Abdul Wahab, SE., M.Si
NIP. 19720421 200801 1 006



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN ALAUDDIN MAKASSAR
NOMOR : 1790 TAHUN 2017

TENTANG

PANITIA DAN TIM PENGUJI SEMINAR HASIL PENELITIAN DAN PENYUSUNAN SKRIPSI MAHASISWA
A.n. Al Ummul Nastainul, NIM : 10800113073
JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN ALAUDDIN MAKASSAR

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN ALAUDDIN MAKASSAR

- Membaca : Surat Permohonan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar, Nama : Al Ummul Nastainul, NIM : 10800113073, tertanggal 09 November 2016 untuk melaksanakan seminar hasil.
- Menimbang : Bahwa untuk pelaksanaan dan kelancaran seminar draft/hasil, perlu dibentuk panitia dan tim penguji seminar hasil dan penyusunan skripsi
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2010 yang disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010;
4. Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 2005 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Alauddin menjadi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar;
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Bahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Agama;
6. Peraturan Menteri Agama RI No. 25 Tahun 2013 dan Peraturan Menteri Agama R.I. No 85 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 93 Tahun 2007 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama : Membentuk Panitia dan Tim Penguji Seminar hasil, Jurusan **AKUNTANSI** Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar dengan komposisi :

Ketua : Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag.
Sekertaris : Dr. H. Abd. Wahab, SE., M.Si.
Pembimbing I : Prof. Dr. H. Muslimin Kara, M.Ag.
Pembimbing II : Sumarlin, SE., M.Ak.
Penguji I : Jamaluddin M., SE., M.Si.
Penguji II : Saiful, SE., M.SA., Ak.
Pelaksana : Amidar Hamid, A.Md.

1. Panitia bertugas melaksanakan seminar hasil, memberi bimbingan, petunjuk-petunjuk, perbaikan mengenai materi, metode, bahasa dan dan kemampuan menguasai masalah penyusunan skripsi
2. Biaya pelaksanaan seminar hasil penelitian dibebankan kepada anggaran Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar
3. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya

- Kedua : 1. Panitia bertugas melaksanakan seminar hasil, memberi bimbingan, petunjuk-petunjuk, perbaikan mengenai materi, metode, bahasa

Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Ditetapkan di : Samata-Gowa
Pada tanggal : 10 November 2017

Dekan,

Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag.
NIP. 19581022 198703 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Kampus I Jl. Slt Alauddin No.63 Makassar Tlp. (0411) 864924 Fax 864923
Kampus II Jl. YasinLimp0 Samata Sungguminasa-Gowa Tlp. (0411) 424835 Fax 424836

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulis skripsi Saudari Al Ummul Nastainul, NIM: 10800113073, mahasiswa Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar, setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama skripsi berjudul, "**Analisis Pelaksanaan Shariah Governance dalam Permasalahan Principal-Agent Pembiayaan Mudhārabah Pada Bank Sulselbar Syariah**" memandang bahwa Skripsi Penelitian tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan telah mendapat persetujuan untuk ujian MUNAQASYAH.


Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Samata, November 2017

Pembimbing I

Pembimbing II


Prof. Dr. H. Muslimin Kara, M.Ag
NIP. 19710402 200003 1 002


Sumarlin., SE., M.Ak.
NIP. 19820519 201503 1 001

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Kampus I : Jl. Sit. Alauddin No. 63 Makassar Tlp. (0411) 864928 Fax 86-1923
Kampus II : Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36 Samata Sungguminasa - Gowa Tlp. 841879 Fax. 8221400

Nomor : 716/EB.1/PP.00.9/2017

Samata, 28 November 2017

Sifat : Penting

Lamp : -

Hal : Undangan Ujian Munaqasyah

Kepada Yth

Bapak/Ibu Penguji dan Pembimbing
Di-

Makassar

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, kami mengundang Bapak/Ibu untuk menghadiri Ujian
Munaqasyah Mahasiswa:

Nama	: Al Ummul Nastainul
NIM	: 10800113073
Jurusan	: AKUNTANSI
Judul Skripsi	: "Analisis Pelaksanaan Shar'iah Governance dalam Permasalahan Principal Agen Pembiayaan Mudharabah pada Bank SulSelbar Syariah"

Yang Insya Allah akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal	: Rabu, 29 November 2017
Waktu	: 09.00-11.00 Wita
Tempat	: L. 206

Demikian atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Wassalam
a.n Dekan,
Wakil Dekan Bid. Akademik

Prof. Dr. H. Muslimin Kara, M.Ag.
NIR 197104022000031002

UNIVERSITAS ISLAM

ALAUDDIN
M A K A S S A R



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
NOMOR : 2076 TAHUN 2017

TENTANG

PANITIA DAN TIM PENGUJI MUNAQASYAH
JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN ALAUDDIN MAKASSAR

- Membaca : Surat permohonan : Al Ummul Nastainul
NIM : 10800113073
Tanggal : 23 November 2017
Mahasiswa Jurusan : Akuntansi
Untuk Ujian Skripsi/ Munaqasyah yang berjudul "**Analisis Pelaksanaan Shari'ah Governance dalam Permasalahan Principal Agen Pembiayaan Mudharabah pada Bank SulSelBar Syariah**"
- Menimbang : 1. Bahwa saudara tersebut diatas telah memenuhi persyaratan Ujian Skripsi/ Munaqasyah
2. Bahwa untuk pelaksanaan dan kelancaran ujian/ Munaqasyah perlu dibentuk panitia ujian.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 2005 tentang Perubahan IAIN Alauddin menjadi UIN Alauddin Makassar;
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Bahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Agama;
5. Keputusan Menteri Agama RI. No 5 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;
6. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 93 Tahun 2007 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;
7. Keputusan Menteri Keuangan No.330/05/2008 tentang penetapan UIN Alauddin Makassar pada Departemen Agama sebagai instansi Pemerintah yang menerapkan pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU).
8. Surat Keputusan Rektor UIN Alauddin Nomor 241 B Tahun 2010 Tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Membentuk Panitia Ujian Skripsi/ Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar dengan komposisi :

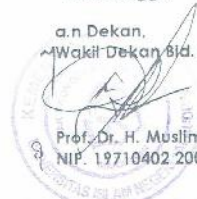
Ketua : Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag.
Sekretaris : Dr. H. Abd. Wahab, SE., M.Si.
Penguji I : Jamaluddin M., SE., M.Si.
Penguji II : Saiful, SE., M.SA., Ak.
Pembimbing I : Prof. Dr. H. Muslimin Kara, M.Ag.
Pembimbing II : Sumarlin, SE., M.Ak.
Pelaksana : Arnidar Hamid, A.Md.

2. Panitia bertugas melaksanakan ujian Skripsi/Munaqasyah bagi saudara yang namanya tersebut diatas.
3. Biaya pelaksanaan ujian dibebankan kepada anggaran Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar.
4. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana na mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di : Samata-Gowa
Pada tanggal : 24 November 2017

a.n Dekan,
Wakil Dekan Bkd. Akademik



Prof. Dr. H. Muslimin Kara, M.Ag.
NIP. 19710402 200003 1 002

RIWAYAT HIDUP



Al Ummul Nastainul, dilahirkan di Desa Rato Kec. Bolo Kab. Bima Prov. Nusa Tenggara Barat, pada tanggal 03 Juni 1995. Penulis merupakan anak ke-empat dari enam bersaudara, buah hati dari ayahanda Maryono dan ibunda Hajnah. Penulis memulai pendidikan di sekolah dasar Negeri Inpres Rato dan tamat pada tahun 2007. Penulis melanjutkan pendidikan ada SMP Negeri 1 Bolo hingga tahun 2010, kemudian pada tahun tersebut, penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bolo hingga tahun 2011, kemudian penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan akan segera menyelesaikan studi pada tahun 2017. Selama menempuh pendidikan penulis mengikuti organisasi-organisasi yaitu KOPMA (Koperasi Mahasiswa) pada tahun 2013, dan menjabat sebagai Staf Keuangan Lembaga pada periode 2015. Selain itu penulis juga mengikuti Organisasi Bakti Sosial seperti penyantunan Anak Yatim pada tahun 2013.